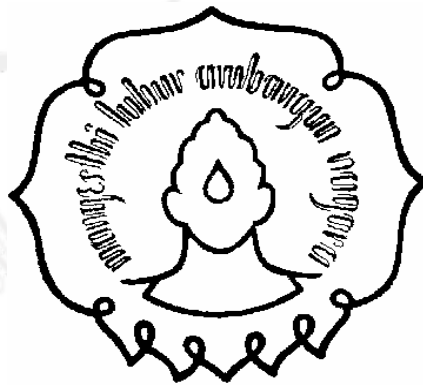


ORGANISASI PAPUA MERDEKA
1964-1998
(Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)



Oleh:

NGATIYEM
K4402512

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007

ORGANISASI PAPUA MERDEKA
1964-1998
(Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)

Oleh:

NGATIYEM

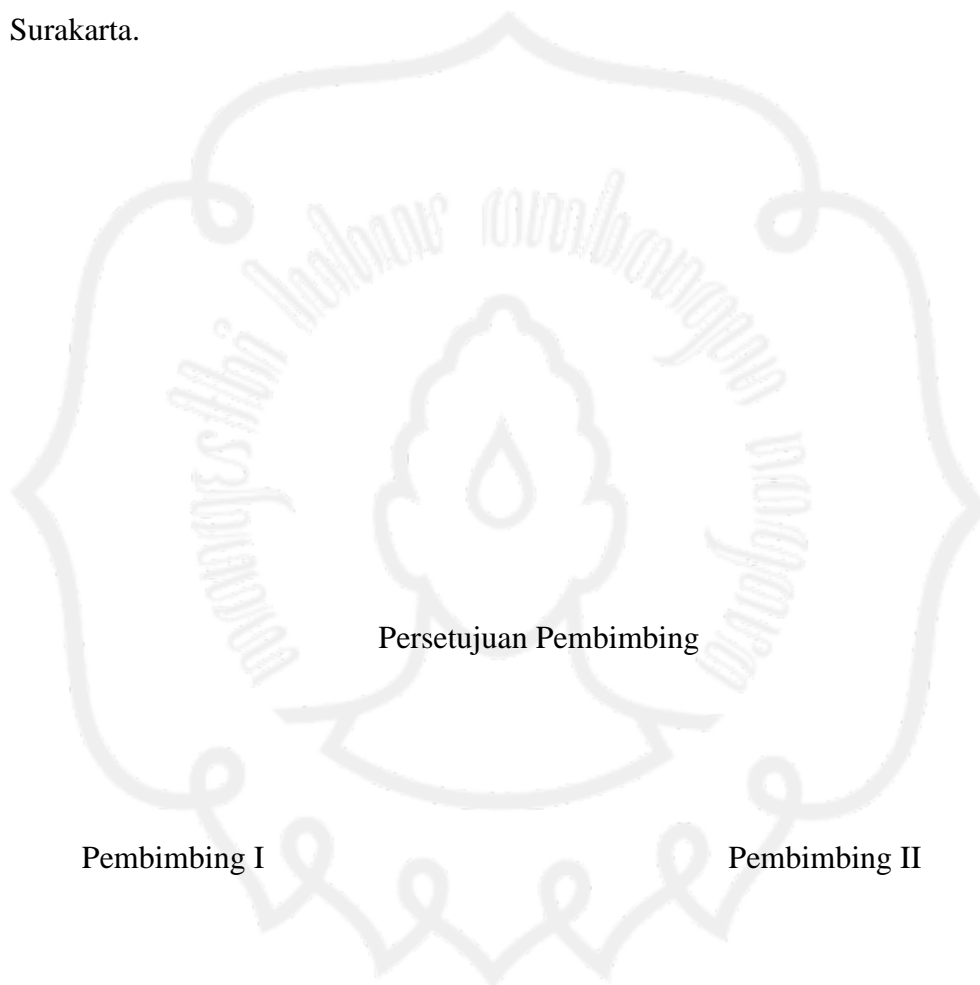
K 4402512

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hermanu Yoebagyo, M.Pd

NIP. 131 642 340

Dra. Sri Wahyuni, M.Pd

NIP. 131 571 610

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Peguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua : Dra.Hj. Sariyatun, M. Pd, M.Hum ()

Sekretaris : Drs. Djono, M. Pd ()

Anggota I : Drs. Hermanu Yoebagy, M. Pd ()

Anggota II : Dra. Sri Wahyuni, M. Pd ()

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Dr. H. Trisno Martono

NIP 130 529 720

ABSTRAK

Ngatiyem. **ORGANISASI PAPUA MERDEKA 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)**. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April 2007.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Apa yang melatar belakangi munculnya Organisasi Papua Merdeka; (2) Bagaimana Perjuangan Organisasi Papua Merdeka; (3) Bagaimana Usaha Pemerintah RI Dalam Memadamkan Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi empat tahap kegiatan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis primer dan sekunder berupa buku-buku, majalah dan koran yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang munculnya Organisasi Papua Merdeka adalah: a. Pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Residen J. P. Eechoud yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan kepada Papua Barat selambat-lambatnya tahun 1970-an, namun cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara yang merdeka telah dihadang oleh Perjanjian New York (15 Agustus 1962) antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia; b. Kekecewaan rakyat Irian Jaya kepada Pemerintah Indonesia yaitu pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas Irian Jaya/Papua Barat dan tidak ingin melepaskan Irian Jaya kepada pihak lain (Belanda) maupun kepada rakyat Papua Barat sebagai negara yang merdeka. Indonesia mengambil tanah Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa Papua yang terjajah oleh Belanda, tetapi karena alasan ekonomi. Untuk menentukan status Papua Barat setelah perjanjian New York, yaitu merdeka atau berintegrasi dengan Indonesia, maka Indonesia melaksanakan PEPERA pada tahun 1969. Dalam perjanjian New York telah terjadi kesepakatan untuk menentukan status Papua yaitu dengan sistem *ONE MAN ONE VOTE* (satu orang satu suara). Namun oleh pemerintah Indonesia diganti dengan sistem musyawarah (perwakilan). Indonesia membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berjumlah 1025 orang yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan pilihan rakyat Papua. Dan untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA, pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, teror, ancaman atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak 19 November 1969 Papua menjadi wilayah/berintegrasi dengan NKRI. Setelah berintegrasi dengan Indonesia terjadi dominasi politik oleh etnis non-Irian baik di pusat maupun di Pemda Irian. Dengan berputarnya waktu, di Irian Jaya muncul aspirasi rakyat Irian Jaya untuk merdeka lepas dari NKRI;

(2) Perjuangan Organisasi Papua Merdeka adalah: a. Melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah Indonesia diantaranya pemberontakan fisik yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI yang menjaga pos keamanan di Irian Jaya yang menimbulkan korban jiwa dari TNI. Sedangkan pemberontakan non-fisik yaitu melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, penculikan dan proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktoria; b. Mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka dalam mencari dukungan rakyat Irian Jaya yaitu dengan cara mempengaruhi rakyat yang tinggal dipedalaman, karena mudah diprovokasi; c. Mencari dukungan kepada dunia internasional, yaitu negara-negara yang serumpun, Negara Eropa Barat, dan negara Afrika. (3) Usaha pemerintah RI dalam memadamkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan yaitu mengirim pasukan TNI untuk melakukan Berbagai operasi untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka dan pendekatan kesejahteraan, yaitu pemerintah melibatkan TNI untuk melakukan operasi di daerah sasaran operasi kemudian setelah daerah itu dikuasai oleh TNI, baru diselenggarakan pembangunan.

Dari kesimpulan di atas muncul implikasi bahwa penyelesaian separatis Organisasi Papua Merdeka seharusnya pemerintah melakukan tindakan dengan cara “cinta kasih” atau atas dasar persamaan dan persaudaraan bukan dengan cara militer. Karena dengan cara militer dapat menimbulkan rasa dendam dari penduduk Irian Jaya, apabila ada keluarganya yang menjadi korban dari operasi militer pemerintah Indonesia yang menyebabkan rakyat Irian Jaya yang dahulu mendukung Indonesia justru bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dan ingin mendirikan negara yang merdeka yaitu Papua. Rakyat Irian Jaya juga tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, karena pembangunan terpusat di Jawa. Maka cara yang efektif yang dilakukan oleh rakyat Irian Jaya adalah melakukan perlawanan bersama Organisasi Papua Merdeka.

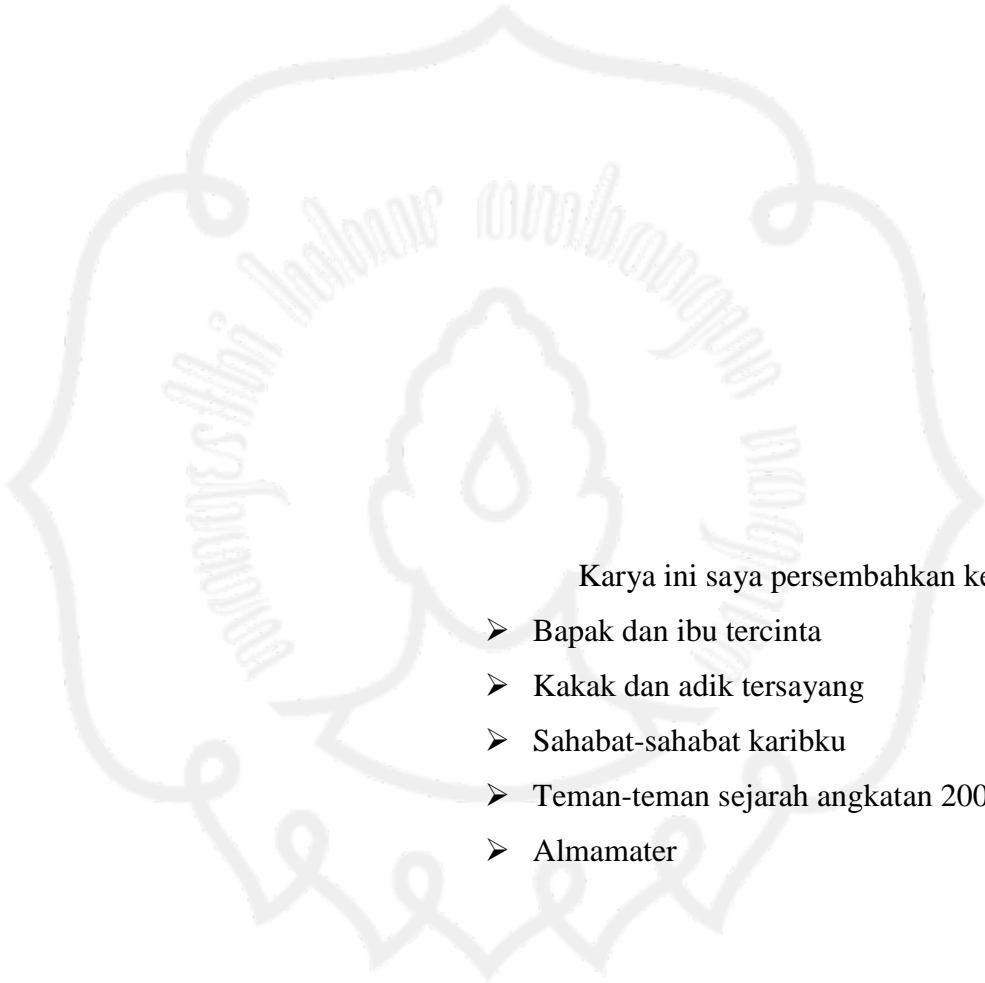
MOTTO

Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa
(Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma)

Perdamaian tidak dapat di jaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih
dengan pengertian
(Einstein)



PERSEMBAHAN



Karya ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu tercinta
- Kakak dan adik tersayang
- Sahabat-sahabat karibku
- Teman-teman sejarah angkatan 2002
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T yang telah mmberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya segala kesulitan-kesulitan yang ada dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya disampaikan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hermanu Yoebagyo, M.Pd selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Pd selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah dengan penuh kasih sayang memberikan semangat dan doa.

8. Teman-teman seperjuangan Program Sejarah angkatan 2002 atas bantuan dan kerjasamanya..

9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut di atas mendapat pahala dari Allah S. W. T.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Surakarta, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	8
1. Integrasi Nasional	8
2. Stabilitas.....	12
B. Kerangka Berfikir.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
1. Tempat Penelitian	18
2. Waktu Penelitian.....	18
B. Metode Penelitian	19
C. Sumber Data	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21

1. Studi Pustaka.....	21
2. Wawancara	22
E. Teknik Analisis Data	22
F. Prosedur Penelitian	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Latar Belakang Munculnya Organisasi Papua Merdeka	27
1. Pengaruh Pemerintahan Belanda di Irian Jaya.....	27
2. Kekecewaan Rakyat Irian Jaya Kepada pemerintah Indonesia	36
B. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka	46
1. Pemberontakan atau Perlawanan	46
a. Pemberontakan Fisik	50
b. Pemberontakan Non fisik	55
2. Mencari Dukungan Kepada Rakyat Irian Jaya	61
3. Mencari Dukungan Kepada Dunia Internasional.....	64
C. Usaha Pemerintah Indonesia Dalam Memadamkan Organisasi Papua Merdeka	70
1. Pendekatan Keamanan	72
2. Pendekatan Kesejahteraan	75
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi	81
C. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peta Irian Jaya	88
Lampiran 2	Rapat gelap rencanakan “Negara Papua Merdeka”	89
Lampiran 3	Organisasi Papua Merdeka ternyata dikendalikan oleh warga negara Belanda.....	90
Lampiran 4	Bukti pengacauan OPM.....	91
Lampiran 5	Cukong OPM di Ir-Bar ditahan	92
Lampiran 6	Gambar lambang negara Papua Barat	93
Lampiran 7	Gambar bendera (Bintang Kejora) negara Papua Barat	94
Lampiran 8	Gambar Komandan Distrik OPM Yance Hembring di depan bendera Papua Barat, dan gambar Mozes Weror	96
Lampiran 9	Gambar kamp pengungsi di PNG, dan gambar tentara melakukan desersi untuk bergabung dengan OPM.....	97
Lampiran 10	Gambar upacara bendera dalam peringatan ”Kemerdekaan OPM” di Kamp Viktoria 1 Juli 1972.....	98
Lampiran11	Gambar pelintas batas Ir-Ja di Kamp Black Water, dan gambar gerombolan OPM bersenjata senapan serta tombak	99
Lampiran 12	Perjuangan OPM di luar Negeri	100
Lampiran 13	Nama Organisasi Papua Merdeka	105
Lampiran 14	Konflik Papua	109
Lampiran 15	Latar belakang OPM.....	111
Lampiran 16	Organisasi Papua Merdeka	113
Lampiran 17	Papua	114
Lampiran 18	Daftar Informan	115
Lampiran 19	Surat Permohonan Skripsi	116
Lampiran 20	Surat Ijin Menyusun Skripsi	117
Lampiran 21	Surat Ijin Research	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puncak permasalahan integrasi politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Hatta tidak mau mundur dari sikap yang pernah dipegang jauh hari sebelum proklamasi, wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Penolakan Belanda atas keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menunda pembicaraan sampai setahun kemudian. Penundaan pembicaraan masalah Irian Jaya ini disetujui kedua belah pihak untuk mengakhiri KMB dengan berhasil pada tanggal yang telah disepakati yakni 2 November 1949 (Nazarudin Syamsuddin, 1989: 90-91).

Usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia melalui jalan damai tidak mungkin lagi. Oleh karena itu Indonesia mencari jalan lain, yaitu mengambil *action outside the United Nations*. Seperti yang telah diucapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr Soebandrio dalam kata sambutannya atas penolakan Majelis Umum PBB (Departemen Luar Negeri, 1971: 91).

Berbagai perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai status wilayah Nieuw Guinea tidak pernah membawa hasil bagi pemerintah Indonesia, hal ini terlihat bahwa pemerintah Belanda bersikukuh mempertahankan wilayah Nieuw Guinea. Terbukti pemerintah Belanda menjalin mitra dengan Australia untuk menyusun rencana bersama yaitu memisahkan wilayah New Guinea dari Republik Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001: 17).

Di pihak Indonesia dalam menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada

tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. TRIKORA berisi tentang: 1) gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial. 2) kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3) bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa (JRG. Djopari, 1993: 37). TRIKORA merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia. Sebab dengan Trikora, Pemerintah Belanda di paksa untuk menandatangani perjanjian di PBB. Perjanjian itu di kenal dengan Perjanjian New York, yang di tandatangi pada tanggal 15 Agustus 1962 yaitu mengenai Nieuw Guinea. TRIKORA juga merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer terbatas dari Indonesia, untuk melawan Belanda di Irian Barat pada akhir tahun 1961. Dicetuskannya TRIKORA telah mempercepat pencapaian Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat atau Nieuw Guinea (Tuhana Taufik A, 2001:18).

Salah satu Persetujuan dari perjanjian New York, adalah Belanda akan mengalihkan administrasi Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Setelah tanggal 1 Mei 1963, UNTEA dan Indonesia akan memerintah Irian Barat secara bersama-sama. Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat pada Juli-Agustus 1969. Hasil PEPERA akhirnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969 dengan perincian 84 (setuju), 0 (menentang), dan 30 (abstain). Dengan demikian secara hukum internasional sejak saat itu Irian Barat menjadi Irian Jaya yang resmi menjadi wilayah Indonesia (Syamsudin Haris, 1999:190).

Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu melalui penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda ke RI pada tanggal 1 Mei 1963 dengan melalui suatu badan PBB yang bernama UNTEA. Pembangunan yang diselenggarakan di Irian Barat dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Salah satu bentuk permasalahannya adalah tantangan terhadap kegiatan integrasi di Irian Barat (JRG. Djopari, 1993:1)

Puncak tuntutan rakyat Irian Barat terjadi pada tahun 1960-an. Saat itu, banyak tuntutan yang datang kepada Belanda sebagai pihak yang memegang

kendali administratif, dan politik di Irian Barat. Tuntutan rakyat Irian Barat adalah Papua diberi kemerdekaan sebagai negara yang merdeka. Tuntutan ini, maka pemerintah Belanda membentuk sebuah badan atau organisasi. Organisasi ini merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Irian Barat, yang diberi nama *Nieuw Guinea Raad* (Dewan Nieuw Guinea). Organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1949 dengan jumlah 21 orang, tetapi tidak bisa terealisasi karena kondisi masyarakat Papua tidak mungkin untuk diselenggarakan Pemilu. Selanjutnya dewan ini terbentuk 25 Februari 1961, dan disyahkan pada tanggal 5 April 1961 (Yakobus F. Dumupa, 2006:29-30). Tanggal 19 Oktober 1961, dibentuk komite nasional yang beranggotakan 21 orang, komite ini dilengkapi 70 putra Irian Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifestasi yang isinya; menentukan nama negara: Papua Barat, menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua, menentukan bendera: Bintang Kejora, menentukan lambang negara: Burung Mambruk, Semboyan: One People One Seoul (Safroedin Bahar, 1996: 220).

Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, lembaga operasi khusus (opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan di Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau dengan sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan bersifat ilegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001: 119).

Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965, gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korp*) ciptaan Belanda. Pemberontakan OPM yang berawal di Manokwari, kemudian menjalar keseluruh kabupaten di Irian Barat yaitu: Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen-Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura (JRG. Djopari, 1993:1-2)

Nama OPM, belakangan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi atau fraksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri. OPM adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan, memerdekakan Irian Jaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001:120). OPM lahir dan tumbuh berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya, OPM ini terdiri dari dua fraksi, 1) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Aser Demotekay tahun 1963 di Jayapura, 2) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggoar di Manokwari tahun 1964. kedua fraksi ini bergerak dibawah tanah (JRG. Djopari, 1993: 101-102).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan sparatis yang relatif tua. OPM sejak akhir tahun 60-an telah melakukan aksi gerilya guna menuntut pemisahan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). OPM di dirikan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang di alami oleh penduduk Irian Jaya (Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, 2000: 146). Meletusnya gerakan separatis OPM ternyata sebagai akibat terbatasnya komunikasi, khususnya dalam arti politik. Padahal komunikasi justru di harapkan memberi obyek terhadap pengalamam politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya (Syamsudin Haris, 1999: 198).

Kondisi penduduk Irian Jaya yang terbelakang serta infrakstruktur yang minim, sungguh sangat ironis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kondisi ini, telah menyebabkan terjadinya eskalasi kekecewaan rakyat Irian Jaya. Hal ini di tengarai juga dengan beberapa negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat berada di belakang maraknya aksi sparatis ini (Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, 2000:147)

Berseminya Papua, telah menunjukkan suatu kelemahan pada pemerintah Indonesia dan kurangnya penerimaan Papua terhadap pemerintah Indonesia. Penerapan otoritas Jakarta yang di laksanakan dengan titik berat pada pemaksaan, dan kekerasan negara (Khusnul Mar'iyah, 2005: 73).

Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB, pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut-sebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat

(Pepera). Pepera dilakukan dengan cara mengabaikan bangsa Papua dari kebebasan berbicara, kebebasan bergerak dan berkumpul (Tim SKP, 2006:116).

Pergolakan yang timbul dan terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) berbasis pada persoalan yang sama, yakni "dieksploitasi" habis-habisan. SDA dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit kekuasaan seputar "Cendana" di Jakarta, sehingga rakyat di daerah tidak memperoleh peluang dan kesempatan untuk menikmati kekayaan di daerahnya (Frans Maniagasi, 2001: 54).

Dalam mencapai tujuannya, OPM melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan OPM bersifat pemberontakan fisik dan pemberontakan non fisik. Pemberontakan fisik yang dilakukan oleh OPM terhadap pemerintah Indonesia yaitu pemberontakan di Kebar Manokwari, di Arfai Manokwari, di Pos Makbon, di pos Sausa Por, di pos Iru Anggi, di Erambo Marauke, di Dubu Unrub Jayapura, di Enarotali, Pyramid Jayapura, di Biak Utara dan Biak Utara, Merauke, Nabire dan Serui Jayawijaya (JRG. Djopari, 1993:109). Pemberontakan yang bersifat non fisik dilakukan oleh OPM terhadap pemerintah Indonesia, yaitu pemberontakan di Arfai Manokwari, Sorong, Merauke, Jayawijaya, Jayapura (Tuhana Taufik A, 2001:128).

Bukti-bukti mengenai pergolakan OPM, adalah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan berupa perusakan lapangan terbang, mengintimidasi penduduk, menculik dan merencanakan untuk merusak alat - alat komunikasi. Maka di bentuklah "Komando Pembebasan Papua Barat" (Kompas, 1969).

Perjuangan OPM dalam mencapai tujuannya juga mencari dukungan sebagian besar masyarakat Irian Jaya, terutama rakyat yang anti Indonesia atau pro Papua. Di antara dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya kepada OPM adalah terlibat dalam aksi-aksi OPM, memberikan dukungan sandang, pangan, obat-obatan dan dana, memberikan dukungan semangat dan dorongan kepada OPM, memberi pemikiran (Tuhana Taufik A, 2006: 142-143). Dukungan terhadap OPM bukan saja diberikan oleh rakyat Irian Jaya di desa, tetapi juga oleh aparat

pemerintah sipil dan kaum terpelajar yaitu cendekiawan, mahasiswa dan pelajar termasuk kelompok kecil ABRI dan polisi (JRG. Djopari, 1993: 129).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) guna mencapai cita-citanya yaitu kemerdekaan Papua Barat, OPM mencari dukungan politik luar negeri selain aktivitasnya di dalam negeri (Irian Jaya). Pencarian dukungan ke luar negeri seperti dilakukan OPM sejak tahun 1951, tujuan OPM terutama untuk mencari dukungan politik, dan mencari dukungan senjata atau bantuan persenjataan (Tuhana Taufik A, 2001: 143).

Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh pemerintah RI, yaitu untuk mengatasi separatis rakyat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi brutal OPM. Usaha pemerintah RI untuk memadamkan OPM dilakukan sejak awal Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, yaitu pada tahun 1963 (Tuhana Taufik A, 2001: 145) Usaha pemerintah RI untuk memadamkan pemberontakan OPM, menggunakan dua pendekatan, dua pendekatan itu adalah pendekatan sekuriti dan pendekatan kesejahteraan. Di mana kedua pendekatan itu dilakukan sejak Irian Jaya masuk menjadi wilayah NKRI (JRG. Djopari, 1993:154).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan Papua dalam penulisan skripsi dengan judul **"Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya Organisasi Papua Merdeka?
2. Bagaimana perjuangan Organisasi Papua Merdeka?
3. Bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam memadamkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dari rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Organisasi Papua Merdeka
2. Untuk mengetahui perjuangan Organisasi Papua Merdeka
3. Untuk mengetahui usaha pemerintah Indonesia dalam memadamkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang munculnya Organisasi Papua Merdeka.
 - b. Memperluas wawasan bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. *Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan sejarah pada Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.*
 - b. *Menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Integrasi Nasional

Konsep integrasi biasanya menunjuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya, maupun politik kedalam satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. Selain itu, istilah integrasi sering dipergunakan untuk menunjuk pada upaya membangun satu otoritas atau kewenangan nasional; penyatuan pemerintah dengan yang diperintah; konsensus tentang nilai-nilai kolektif; dan soal kesadaran setiap anggota masyarakat untuk memperkokoh ikatan diantara mereka. (Syamsuddin Haris, 1999:7-8)

Menurut James J. Coleman dan Carl G. Rosberg seperti dikutip Nazarudin Syamsudin (1989 : 4) menyatakan bahwa proses penyatuan bangsa di suatu negara (integrasi) terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal. Integrasi dalam dimensi vertikal (elit massa) mencakup masalah-masalah yang ada dalam bidang yang vertikal dan bertujuan menjembatani celah perbedaan yang ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik yang berpartisipasi. Mereka menanamkan integrasi dalam dimensi vertikal ini dengan sebutan integrasi politik. Sedangkan dalam dimensi horisontal (teritorial) adalah integrasi dalam bidang horisontal dan bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik homogen. Jadi dalam konsep ini integrasi politik menurut mereka hanya merupakan salah satu bagian dari integrasi nasional.

Sementara itu menurut Howard Wriggin seperti dikutip Syamsudin Haris (1999 : 9) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang menentukan berhasilnya integrasi bangsa. Sedangkan lima faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Upaya penciptaan musuh bersama dari luar
- b. Gaya politik para pemimpin yang memperkecil perbedaan, dan pemberian penghargaan serta rasa hormat terhadap semua suku bangsa yang berbeda-beda
- c. Lembaga-lembaga politik, partai politik, dan birokrasi nasional, termasuk militer yang aspiratif, luwes, dan akomodatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman daerah
- d. Ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara-cara pencapaiannya
- e. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perluasan kesempatan bagi semua orang secara adil. (Howard Wriggins dalam Syamsuddin Haris, 1999 :10).

Dalam konteks Indonesia, integrasi politik itu lazim disebut sebagai integrasi nasional, yang cakupan dimensinya bukan saja integrasi bangsa dan integrasi wilayah (teritorial), melainkan juga integrasi penguasa (elite) dengan rakyat yang dikuasai (massa). Dengan menggunakan perspektif Coleman dan Rosbeg, William Liddle melihat persoalan integrasi nasional di Indonesia berkaitan dengan dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi disintegrasi, yaitu, pertama adanya perbedaan horisontal yang berasal dari perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Kedua, pembelahan yang bersifat vertikal yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pandangan antara elite yang berorientasi perkotaan dan massa yang masih berorientasi pedesaan serta tradisional. (Syamsuddin Haris, 1999 :10)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan masyarakat dalam suatu teritorial negara tertentu yang mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lainnya sehingga terbentuk suatu komunitas masyarakat yang harmonis dalam negara.

2. Organisasi

Menurut Sutarto (1979 : 36) menyatakan bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai hasil kreasi masyarakat (sosial convention) dan merupakan alat yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai selain dengan cara itu. (Litterer dan Muhyadi, 1989: 8)

Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dicapai individu secara perorangan (Gibson, Ivanceevich & Donnelly, 1985 : 7). Organisasi mula-mula dipandang sebagai struktur kerjasama, kemudian sebagai proses kerjasama dan saat ini organisasi dapat diartikan sebagai suatu kasatuan (whole) yang didalamnya terdapat sejumlah komponen (manusia dan non manusia) yang satu sama lain saling berintraksi dan berpengaruh, kesemuannya bergerak kearah tujuan yang telah ditentukan (Muhyadi, 1989 :12).

Organisasi terdiri dari kelompok individu yang bekerjasama. Organisasi juga ditentukan orang –orang yang termasuk kedalam sebuah organisasi dan orang-orang yang berada diluarnya. Organisasi selalu dicirikan dengan fakta bahwa organisasiitu memiliki tujuan (Gibson et all, 1985 : 7).

Dengan berpijak dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa organisasi adalah sistem saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerjasama dengan menggunakan atau mentaati peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Nasionalisme

Secara etimologi kata nasionalisme berasal dari bahasa *natie*, yang berarti bangsa yang dipersatukan karenakelahiran, tetapi arti dan hakikat yang melekat pada kata nasionalisme sudah berubah menurut zaman dan tempat serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nasionalisme adalah formalisasi dari kesadaran nasional yang kemudian membentuk *natie* dalam arti politik yaitu negara nasional (F. Isjwara, 1982 :125-126).

Menurut Iswara (1982 : 127) dalam bukunya pengantar ilmu politik mendefinisikan nasionalisme adalah suatu pergerakan sosial suatu aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat kedalam *natie* yang membangkitkan rasa kedalam keadaan politik dan sosial yang aktif. Dengan nasionalisme, negara menjadi milik rakyat secara keseluruhan. Dan rakyat dalam hubungan ini menjadi bangsa *natie* karena itu nasionalisme dipandang sebagai landasan idiil dari setiap negara nasional.

Nasionalisme sebagai manifestasi dari kesadaran nasional mengandung cita-cita yang merupakan ilham untuk mendorong kemajuan bangsa. Menurut Herz dalam F. Iswara (1982 :127) ada empat macam cita-cita nasionalisme yaitu:

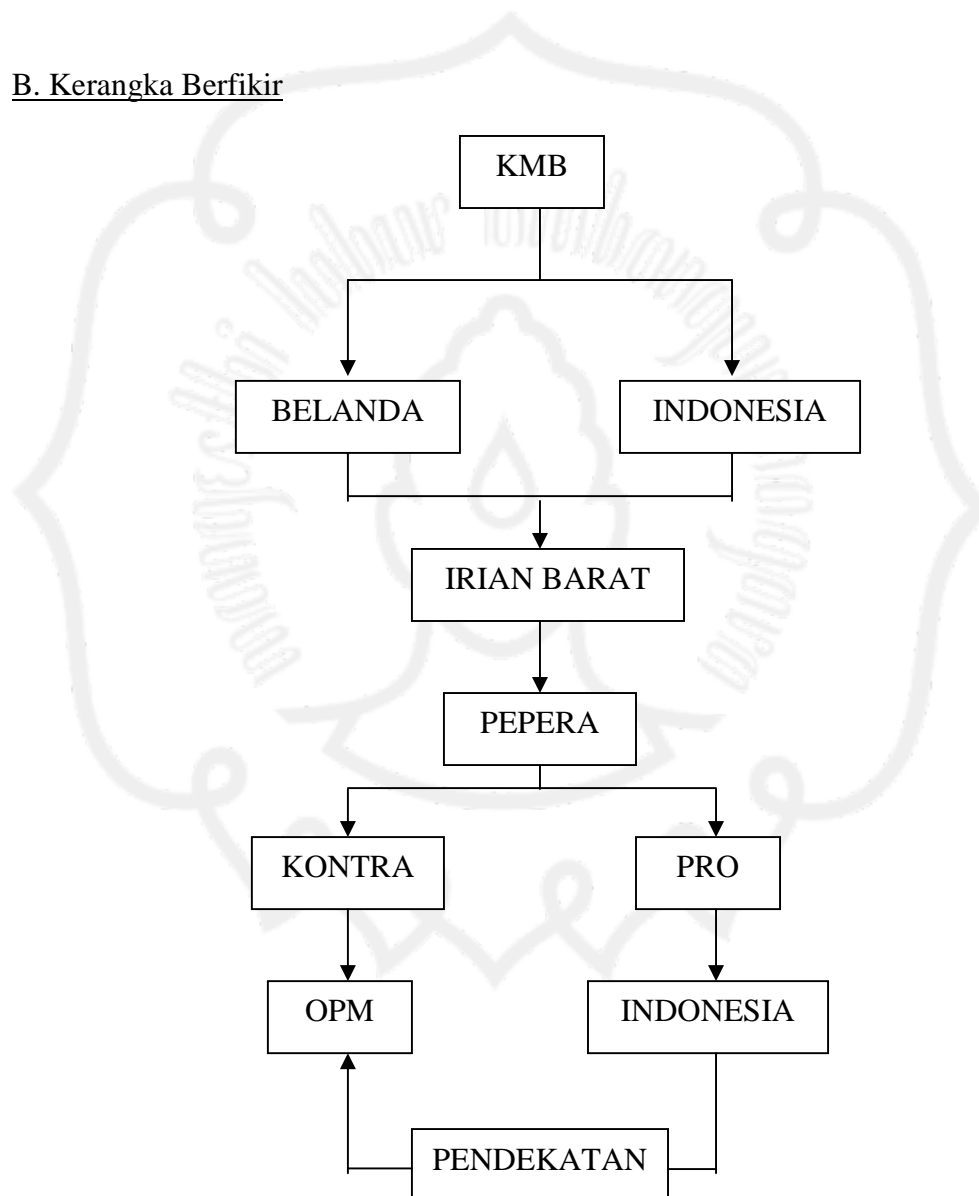
- a. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional atau hendak mengesampingkan bangsa dan negara.
- c. Perjuangan mewujudkan kesendirian, perbedaan, individualitas, keaslian atau keistimewaan.
- d. Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan diantara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan , kewibawaan , gengsi dan pengaruh.

Nasionalisme merupakan suatu ideologi, dalam arti suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang lain dari yang lain biasa mempengaruhi semua ideologi lainnya. Nasionalisme mempunyai sifat yang unik, karena selain mempengaruhi semua ideologi, nasionalisme juga merupakan bagian dari ideologi. Nasionalisme tidak secara tersendiri mengandung pandangan tentang suatu persoalan seperti sistem politik, kecuali jika digabungkan dengan ideologi lainnya. Pada saat banyak konflik diantara negara dan ideologi, nasionalisme hampir selalu merupakan bagian dari konflik tersebut. Oleh karena

itu untuk memahami konflik tersebut harus memahami nasionalisme. (Sargent,1987:15-16).

Berpijak dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu ideologi yang mempersatukan rakyat untuk mewujudkan kebebasan nasional (kebebasan dari penguasa asing atrau campur tangan luar) guna memperoleh kehormatan, kewibawaan dan pengaruh.

B. Kerangka Berfikir



Keterangan:

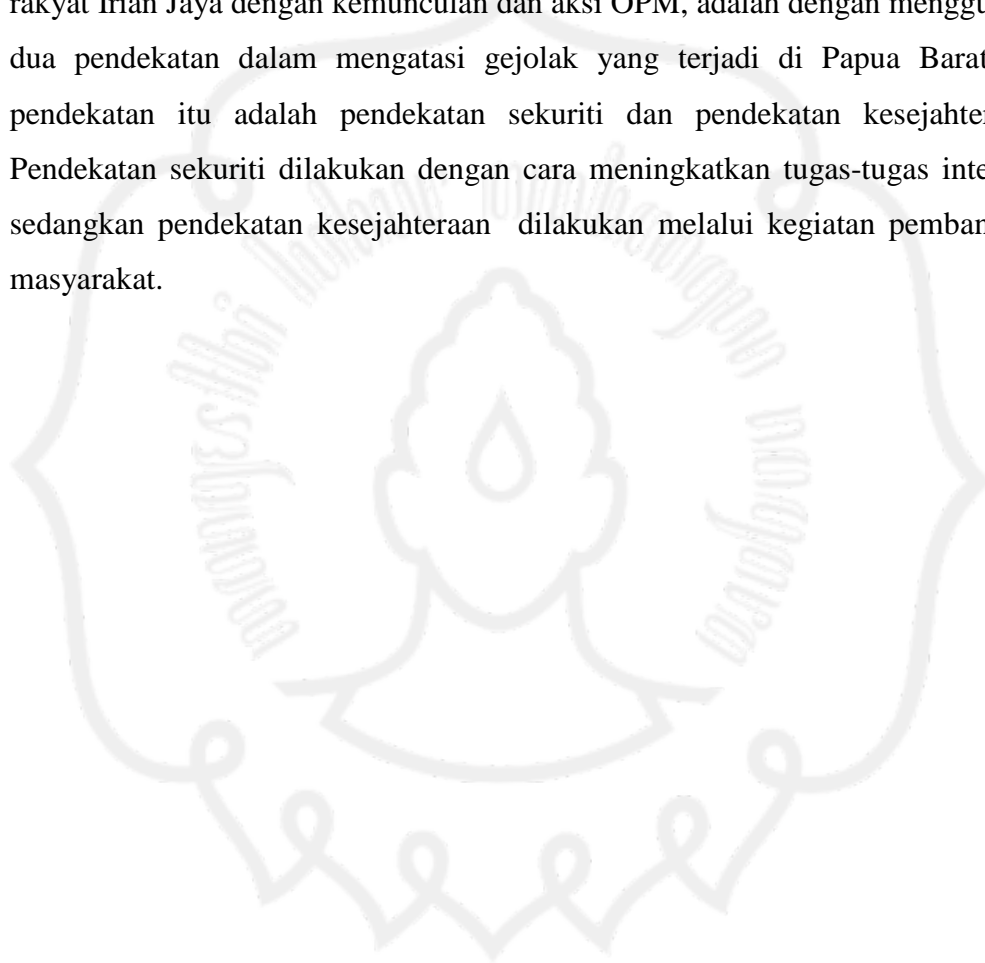
Puncak permasalahan politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang di ketuai oleh Moh. Hatta tidak mau mundur dari sikap yang pernah dipegang para nasionalis sebelum proklamasi. Bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya telah melahirkan kesepakatan dengan Belanda, bahwa penyelesaian tentang Irian Barat di tunda setahun kemudian.

Penundaan penyelesaian Irian Barat telah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga untuk mempersiapkan orang-orang Irian dalam menghadapi kemerdekaan. Dipihak lain untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Dimana Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian New York. Dengan perjanjian New York ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dan Indonesia berkewajiban melaksanakan Pepera, akhirnya Pepera dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis umum PBB . Hasil Pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dengan hasil Pepera yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara rakyat Irian Barat iti sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan . Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian

Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memadamkan geliat rakyat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi OPM, adalah dengan menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi gejolak yang terjadi di Papua Barat. Dua pendekatan itu adalah pendekatan sekuriti dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan sekuriti dilakukan dengan cara meningkatkan tugas-tugas intelijen, sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan pembangunan masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia) dilakukan dengan kajian pustaka. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang buku-buku literatur, majalah dan surat kabar yang tersimpan diberbagai perpustakaan. Perpustakaan yang digunakan sebagai penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Program Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- d. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta
- e. Perpustakaan Monumen Pers

2. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian dimulai daridisetujuinya judul sampai penyusunan laporan hasil penelitian direncanakan sepuluh bulan, pada bulan Juni 2006 sampai Maret 2007.

B. Metode Penelitian

Menurut Louis Gottschalk (1975:32) metode historia sebagai suatu kajian untuk mengumpulkan, menguji dan menganalisa data yang duperoleh dari masa lampau. Kemudian merekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi.

Menurut Dudung Abdurrahman (1991) metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman masa lampau. Kemudian merekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi.

Metode penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain tujuan penelitian obyek penelitian dan waktu terjadinya peristiwa yang diteliti berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menggunakan metode sejarah.

Berdasarkan penjelasan metode sejarah, maka penulis menggunakan metode sejarah dengan alasan bahwa penelitian bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di Indonesia Bagian Timur yaitu Organisasi Papua Merdeka, sedangkan obyek penelitian dan waktu terjadi peristiwa yang diteliti yaitu Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia 1966-1998.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan, menguji, menganalisa secara kritis mengenai data dan peninggalan-peninggalan masa lampau serta melakukan penyajian dalam bentuk tulisan sejarah mengenai Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia).

C. Sumber Data

Dudung Abdurrahman (1999:30) mengatakan sumber sejarah disebut juga data sejarah. Louis Gottschalk (1975:35) sumber sejarah adalah bahan-bahan yang digunakan sejarawan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu obyek yang berupa dokumen-dokumen resmi, dokumen pribadi dan bahan-bahan yang bersifat arkeologis.

Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang merupakan saksi pandangan mata atau orang yang menceritakannya bahkan menuliskan kejadian tertentu yang tidak terlibat dalam peristiwa itu.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa majalah dan surat kabar, sedang sumber sekunder berupa buku-buku literatur.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Moh. Nazir (1988:211) pengumpulan adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

*Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, majalah-majalah, surat kabar dokuman dan bentuk pustaka lainnya. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan studi tentang sumber primer dan sekunder yang berupa buku-buku literatur, majalah, surat kabar yang terdapat diperpustakaan dan monumen pers. Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder yang berupa buku-buku literatur dan majalah yang berkaitan dengan tema *Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia*) yang tersimpan di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan mengumpulkan surat kabar dilakukan di Monumen Pers Surakarta. Setelah menyimpulkan sumber, langkah selanjutnya membaca, mencatat, meminjam, dan memfotocopy buku-buku yang relevan dengan tema.*

E. Tehnik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya apabila tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Mohammad Nazir, 1998:405).

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis, maka tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis data historis.

Tehnik data historis adalah suatu tehnik analisa data sejarah yang mengutamakan ketajaman dalam memberi makna atau melakukan interpretasi terhadap fakta, sehingga diperoleh fakta sejarah atau sintesis sejarah.

Penulisan fakta sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data sejarah yang obyektif, sehingga unsur subyektifitasnya dalam menganalisis data sejarah perlu dikurangi. Dalam proses analisis data harus selalu diperhatikan unsur-unsur yang relevan dalam sumber data sejarah dan apakah unsur tersebut kredibel. Suatu unsur disebut kredibel, apabila unsur tersebut paling dekat dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Unsur tersebut untuk dapat diketahui kredibel tidaknya diperoleh berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber sejarah yang ada (Louis Gottscalk, 1986:42).

Kegiatan menganalisa data di dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 1). Kritik ekstern yaitu menganalisa data tertulis untuk mendapatkan data yang otentik atau asli. Analisa ini dilakukan dengan cara menyeleksi sumber data tertulis berupa buku-buku literatur, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber yang diperoleh kemudian diidentifikasi tentang penulis atau pengarang sumber data tertulis tersebut tahun, dan tempat penulisan, serta orisinalitas penulis apakah asli ditulis penulis sumber data tersebut atau bukan. 2). Kritik intern yaitu menganalisa isi sumber data sejarah tertulis untuk mendapat data sejarah yang dapat dipercaya. Analisa dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi gaya, tata bahasa, ide yang digunakan penulis, pendidikan penulis, situasi disaat penulisan dan tujuan penulis dalam mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka 1966-1998. Berdasarkan seleksi tersebut dihasilkan fakta. 3). Interpretasi fakta dilakukan dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa Organisasi Papua Merdeka yang menjadi obyek penelitian.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai penulisan hasil penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Bagi peneliti apabila tema yang akan diteliti sudah ditemukan, maka selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan sumber tertulis berupa buku-buku, majalah serta bentuk kepastakaan yang lain.

Pada tahap ini dicari dan dikumpulkan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu dengan mengadakan studi tentang buku-buku literatur dan majalah yang tersimpan di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, juga dicari dan dikumpulkan surat kabar tahun 1966 sampai 1998 di Monumen Pers Surakarta.

2. Kritik

Kritik adalah kegiatan untuk memilih, menyeleksi, meneliti, mengidentifikasi, menilai dan membandingkan sumber data yang digunakan dalam penulisan. Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyeleksi sumber data tertulis berupa buku-buku literatur, majalah dan surat kabar. Sumber data tersebut dikelompokkan ke dalam jenis sumber primer atau sumber sekunder. Sumber data tersebut diidentifikasi meliputi pengarang, tahun dan tempat penulisan atau penerbitan sumber data tertulis. Apakah asli ditulis pengarang atau tidak.

Kritik intern dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya., kegiatan tersebut dilakukan agar dapat diketahui isi

sumber data dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya bahasa yang digunakan penulis, situasi disaat penulisan dan tujuan dalam mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan tema Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi Tentang Pembangunan Politik Di Indonesia). Kemudian isi dan pernyataan penulisan sumber data tertulis yang satu dibandingkan dengan isi pernyataan penulis yang lain. Hasil kritik sumber akan menghasilkan fakta.

3. Interpretasi

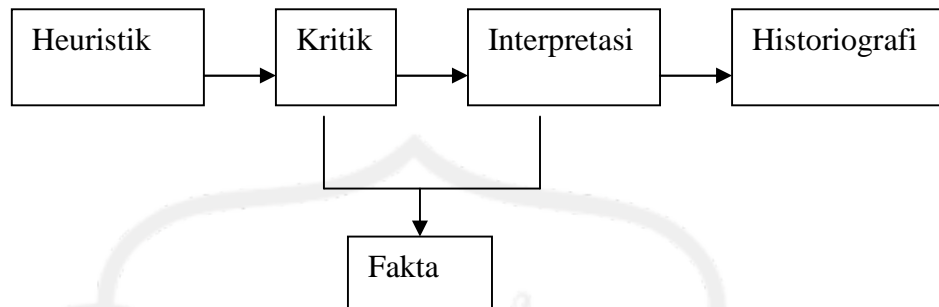
Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah ini berarti menggunakan secara terminologi, berbeda dengan sistesis yang berarti menyatukan. Namun kedua analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995).

Interpretasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat diketahui Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi Tentang Pembangunan Politik Di Indonesia) yang menjadi obyek penelitian. Kemudian fakta-fakta tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya. Sehingga dapat dipahami maknanya sesuai dengan tema yang relevan, logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah.

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti-bukti yang berupa sumber-sumber data sejarah yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk penulisan dengan judul Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia).

Dari uraian tersebut di atas, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

A. Surat Kabar:

- "Irian Barat Tak Dilupakan". 1967. Mei. 2. *Kompas*. Hal: 2
- "Rapat Gelap Rentjanakan, Negara Papua Merdeka". 1967. September. 30. *Kompas*. Hal: 1
- "Bukti Pengacauan OPM". 1969. Mei. 9. *Kompas*. Hal: 1
- "Tjukong-tjukong OPM di Irian Barat Ditahan". 1970. Juli. 10. *Kompas*. Hal: 1

B. Sumber Buku

- Chusnul Mar'iyah. 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos
- F. Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Bina Cipta
- Frans Maniagasi. 2001. *Masa Depan Papua*. Jakarta: Millenium Publisher
- George Junus Aditjondro. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam
- Goots Schalk. 1970. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Moch Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- JRG. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nazarudin Syamsudin. 1989. *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Saafroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional: Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syamsuddin Haris, et all. 1999. *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga
- Tim SKP Jayapura. 2005. *Membangun Budaya Damai dan rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: Tim SKP

Tuhan Taufik a. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media

Yakobus F Dumupa. 2006. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
1. Integrasi Nasional	8
2. Organisasi.....	10
3. Nasionalisme.....	10
B. Kerangka Berfikir	12
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
B. Metode Penelitian	15
C. Sumber Data.....	16
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	17
E. Tehnik Analisis Data.....	17
F. Prosedur Penelitian	19

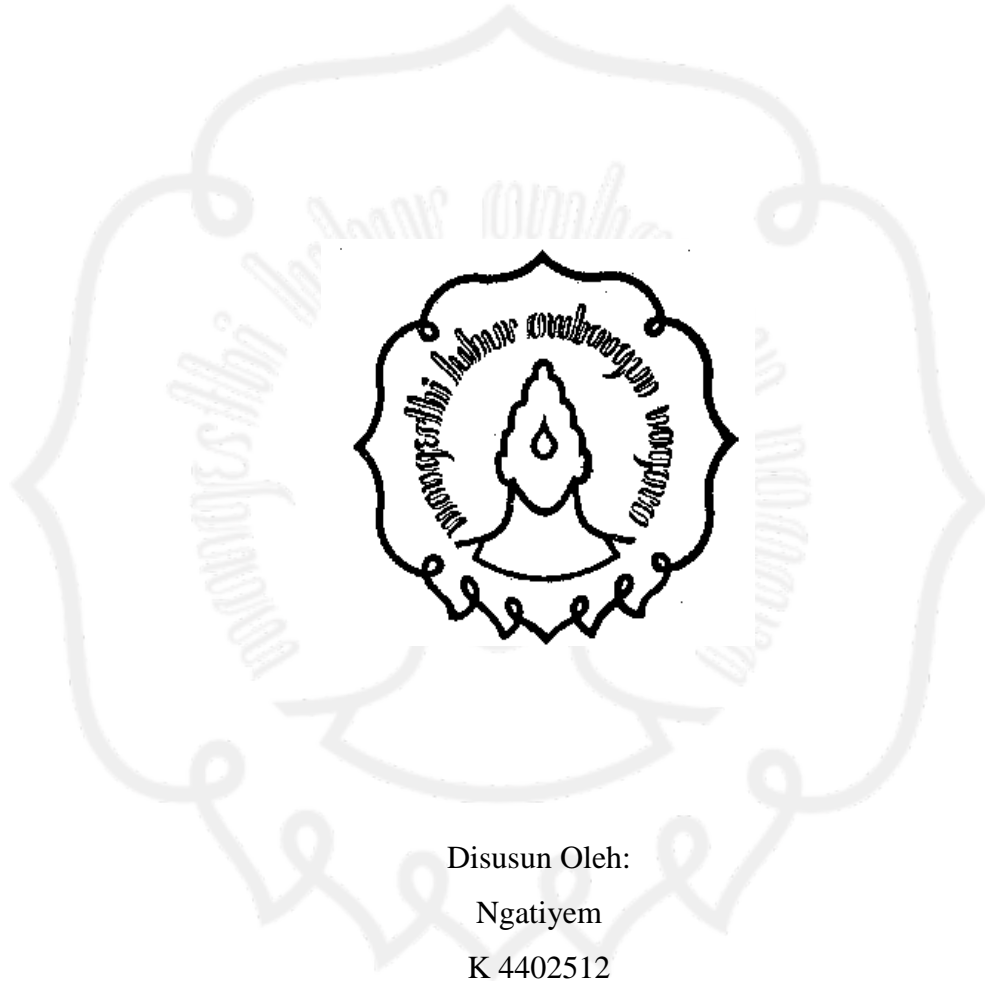
DAFTAR PUSTAKA

PROPOSAL SKRIPSI

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

1966-1998

(Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)



Disusun Oleh:

Ngatiyem

K 4402512

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006**

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal ini disetujui pada :

Hari :

Tanggal :

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hermanu Yubagyo M. Pd

NIP. 131 642 340

Dra. Sri Wahyuni, M.Pd

NIP. 131 571 610

Mengetahui
Ketua Program

Dra. Hj. Sariyatun, M.Pd, M.Hum
NIP. 131 842 673

Nama : NGATIYEM

ii

Nim : K 4402512

Pembimbing I : Drs. Hermanu Yubagyo, M. Pd

Pembimbing II : Dra. Sri Wahyuni, M.Pd

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

1966-1998

(Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)

Nama : NGATIYEM

Nim : K 4402512

Pembimbing I : Drs. Hermanu Yubagyo, M. Pd

PembimbingII : Dra. Sri Wahyuni, M. Pd

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

1966-1998

(Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Integrasi Nasional

Dalam KBBI (1996:383) integrasi merupakan "proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional". Menurut A Heuken SJ (1988: 184) dalam bahasa Inggris *to integrated* berarti "menggabungkan semua bagian menjadi sebuah keseluruhan. Bagian-bagian itu diberi tempatnya masing-masing sehingga membentuk kesatuan yang teratur dan harmonis atau seimbang".

Negara-negara baru senantiasa didorong oleh dua motif yang berbeda, yang kerap kali bertentangan dan menimbulkan kegoncangan: 1) adalah keinginan untuk diakui sebagai pelaku-pelaku yang bertanggung jawab, yang hasrat dan pendapatnya diperhitungkan. Hal ini didasarkan pada hakikat rakyat yang berkaitan dengan hubungan primordial; 2) adalah kehendak untuk membina negara modern yang efisien dan dinamis, berdasarkan pada semakin pentingnya peranan negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Upaya integrasi bangsa itu biasanya menghadapi dilema karena setiap proses penciptaan satu negara kebangsaan yang berdaulat semakin meningkatkan sentimen primordial. Karena negara baru membawa hak baru yang dapat diperebutkan oleh berbagai kelompok primordial (Clifford Geertz dalam Moh. Mahfud MD, 1998:212-213).

Menurut Miron Weiner dalam Muh. Mahfud MD (1998:210) bahwa integrasi ada beberapa tipe:

- 1) integrasi mungkin menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, dan pada pembentukan identitas nasional. Disini integritas bangsa menunjuk

pada masalah pembangunan rasa kebangsaan dengan menghapus kesetiaan-kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit; 2) integrasi dapat pula menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah politik yang lebih kecil mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu; 3) integrasi dapat menunjuk pada upaya menghubungkan perintah dengan yang diperintah, yakni menjembatani gaya antara elite dan massa yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan mencolok dalam aspirasi dan nilai-nilai mereka; 4) kadangkala integrasi digunakan pula untuk menunjuk adanya konsensus nilai minimum yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial; 5) integrasi nasional dapat juga menunjuk pada pembicaraan mengenai tingkah laku berorganisasi untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Secara garis besar menurut Weiner, ada dua macam strategi yang dapat dipilih pemerintah dalam membangun integrasi yaitu: 1) penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas-komunitas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional; 2) penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus kebudayaan komunitas yang ada.

Integrasi nasional merupakan suatu terminologi yang sering dipergunakan di dalam masyarakat, baik oleh kalangan ilmiah maupun masyarakat lainnya. Meskipun integrasi nasional sudah menjadi istilah yang baku dalam bahasa politik, namun pemahaman yang diberikan oleh para ahli ilmu politik masih sangat bervariasi. Banyak kalangan yang belakangan ini lebih menyukai istilah lainnya seperti integrasi politik dari pada integrasi nasional (Nazaruddin Syamsudin, 1989:4). Sedangkan menurut Saafroedin Bahar (1992: 142) Integrasi nasional merupakan suatu proses berencana untuk menyatukan pemerintah negara, dengan rakyat dan antara golongan rakyat yang satu dengan golongan rakyat lainnya yang mendiami teritorial suatu negara nasional yang sama sehingga menjadi suatu komunitas politik yang handal.

Konsep integrasi biasanya menunjuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya, maupun politik ke dalam satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. Selain itu, istilah integrasi sering dipergunakan untuk menunjuk pada upaya membangun status otoritas atau kewenangan nasional; penyatuan pemerintah dengan yang diperintah; konsesus tentang nilai-nilai kolektif; dan soal kesadaran setiap anggota masyarakat untuk memperkokoh ikatan persaudaraan (Syamsuddin Haris, 1999:7-8).

Rudini dalam Saafroedin Bahar (1996:ix) masalah integrasi nasional Indonesia terutama berasal dari corak pluralitas sebagai "proses yang tidak pernah selesai". Masalah sara adalah sumber kerawanan integrasi nasional. Ada tiga aspek dari integrasi nasional, yaitu: 1) kesadaran akan pentingnya memelihara akan eksistensi bangsa dan segala bentuk ancaman; 2) kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat; dan 3) kemampuan desentralisasi pemerintahan sebagai salah satu faktor untuk memperbesar kesadaran, kreatifitas, dan distribusi masyarakat sebagai salah satu pilar utama integrasi nasional.

James J. Coleman dan Carl G. Rosberg dalam Nazarudin Syamsudin (1989 : 4) berpendapat bahwa:

Proses penyatuan bangsa di suatu negara (integrasi) terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal. Integrasi dalam dimensi vertikal (elit massa) mencakup masalah-masalah yang ada dalam bidang yang vertikal dan bertujuan menjebatani celah perbedaan yang ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu poses politik yang berpartisipasi. Mereka menanamkan integrasi dalam dimensi vertikal ini dengan sebutan integrasi politik. Sedangkan dalam dimensi horisontal (teritorial) adalah integrasi dalam bidang horisontal dan bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka poses penciptaan suatu masyarakat politik homogen . Jadi dalam konsep ini integrasi politik menurut mereka hanya merupakan salah satu bagian dari integrasi nasional.

Nazarudin Syamsudin dalam Haris Munandar (1994: 251-252) integrasi nasional menunjuk pada integritas atau keterpaduan dalam segala aspek kehidupan bangsa, yang secara umum meliputi aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sebagai suatu proses, integrasi nasional menekankan pada suatu

persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, 1) hubungan antara rakyat dengan negara; 2) pembinaan kesepakatan di antara sesama warga negara berkenaan dengan perilaku yang diperlukan oleh sistem politik, agar sistem menjalankan segenap fungsinya dengan baik.

Menurut Howard Wriggin dalam Syamsudin Haris (1999 : 9), sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang menentukan berhasilnya integrasi bangsa, yaitu: 1) upaya penciptaan musuh bersama dari luar; 2) gaya politik para pemimpin yang memperkecil perbedaan, dan pemberian penghargaan serta rasa hormat terhadap semua suku bangsa yang berbeda-beda; 3) lembaga-lembaga politik, partai politik dan birokrasi nasional, termasuk militer yang aspiratif, luwes, dan akomodatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman daerah; 4) ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara-cara pencapaiannya; 5) pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perluasan kesempatan bagi semua orang secara adil.

Konsep integrasi teritorial atau integrasi dalam bidang horisontal lebih dipakai oleh para sarjana untuk mendefinisikan integrasi nasional. Sarjana-sarjana tersebut misalnya seperti Rupert Emerson dan KH Silvert yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan bangsa dalam suatu negara dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dan kesukuan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang homogen (Nazaruddin Syamsudin, 1989: 4).

Dalam konteks Indonesia, integrasi politik itu lazim disebut sebagai integrasi nasional, yang cakupan dimensinya bukan saja integrasi bangsa dan integrasi wilayah (teritorial), melainkan juga integrasi penguasa (elite) dengan rakyat yang dikuasai (massa). Dengan menggunakan perspektif Coleman dan Rosbeg, William Liddle dalam Syamsuddin Haris (1999:10) integrasi nasional di Indonesia berkaitan dengan dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi disintegrasi, yaitu: 1) adanya perbedaan horisontal yang berasal dari perbedaan suku, ras, agama, dan geografi; 2) pembelahan yang bersifat vertikal yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pandangan antara elite yang

berorientasi perkotaan dan massa yang masih berorientasi pedesaan serta tradisional.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan masyarakat dalam suatu teritorial negara tertentu yang mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, sehingga terbentuk suatu komunitas masyarakat yang harmonis dalam negara.

2. Stabilitas

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996:96) stabilitas adalah "menciptakan suatu kestabilan nasional yang dinamis, bukanlah semata-mata tugas pemerintah dan aparatnya, melainkan tugas segenap anggota masyarakat". W. J. S. Poerwadarminto (2003: 1144) stabilitas merupakan "kemantapan, kestabilan, keamanan politik dan ekonomi perlu bagi terlaksananya rencana pembangunan dalam suatu negara". Jack C Plano (1989: 249) Stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam, atau kembali pada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalan suatu sistem politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan.

Sebuah negara muda yang masyarakatnya bangsanya bersifat pluralistis dapat bergerak maju, apabila ada tiga faktor penentu, yaitu adanya kepemimpinan nasional yang efektif, adanya angkatan bersenjata yang utuh dengan loyalitas yang tinggi, serta adanya partai politik yang berpengaruh dominan. Negara yang sedang membangun seperti negara kita memerlukan stabilitas yang memadai atau stabilitas yang berkelanjutan dan semakin dinamis untuk mendukung setiap proses penjejahteraan bangsa. Ciri-ciri negara yang sedang membangun senantiasa memerlukan unsur penopang yang berupa kondisi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis yang dapat menjadi wadah dan memadai bagi setiap momentum

kemajuan (Saafroedin Bahar, 1996: 64-65). Strategi pembangunan ekonomi sebagai sasaran utama Orde Baru berorientasi pada "pertumbuhan" yakni strategi yang menekankan bahwa pembangunan bermula dari pertumbuhan yang disuntikkan pada teknologi dan modal asing. Dalam strategi yang demikian pemerintah harus memikirkan cara untuk memberi jaminan agar modal (asing) tersebut selamat, sehingga mendapat kepercayaan dari negara-negara penanam modal. Cara menjamin keselamatan itu adalah memantapkan stabilitas nasional (Moh. Mahfud MD, 1998: 209).

Stabilitas sangat dominan pada suatu negara atau wilayah agar tercipta antar negara atau kawasan berjalan dengan tertib, maka Rizal Sukma dalam T May Rudy (2002: 119) bahwa stabilitas politik adalah "suatu kondisi yang ditandai kemampuan sistem regional atau internasional untuk mencegah setiap kemampuan atau tindakan destruktif oleh kekuatan dari luar atau dari dalam sistem, tidak hanya dengan cara menentang atau menghindari perubahan, tetapi dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan melalui pengetahuan kembali". Stabilitas politik sangat diperlukan dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional. Dengan situasi politik yang aman dan stabil, pembangunan akan mudah dilakukan dalam rangka pertumbuhan. Hal ini kita temukan pada awal pelaksanaan dari repelita Indonesia dalam Trilogi pembangunan: stabilitas, pemerataan dan pertumbuhan (Afan Gaffar, 2000: 40-41).

Stabilitas politik (*political stability*) biasanya menyangkut stabilitas kondisi politik atau percaturan politik dalam negeri (kondisi domestik). Stabilitas politik berkaitan erat dan sangat menentukan kelangsungan kebijakan pemerintah dan program pembangunan. Stabilitas bukan "status quo" (tidak berubah dari status semula), tetapi kondisi yang ajeg untuk mampu menghindari gangguan yang merugikan atau yang menghambat kemajuan. Stabilitas politik diperlukan untuk bisa lebih banyak mencurahkan lebih banyak perhatian dan tindakan dalam masalah non politik. Stabilitas politik merupakan kondisi prasarat untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam tatanan global atau sistem internasional (T May Rudy, 2002: 118).

Stabilitas nasional harus selalu dipandang dalam hubungan timbal balik dengan pembangunan nasional. Stabilitas demi pembangunan yakni demi perubahan, pembangunan untuk mencapai keadaan yang lebih tentram. Stabilitas dalam bidang politik ditentukan dalam rangka memantapkan stabilitas yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi pancasila, perlu makin memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Demikian pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional serta dimantapkan berfungsinya dan saling berhubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (A Heuken SJ, 1991: 20-21).

Stabilitas politik dalam negeri sangat tergantung pada derajat partisipasi politik dan pelembagaan politik dan lembaga tersebut adalah legislatif, eksekutif, yudikatif sebagai tempat dalam mengkoordinir berbagai kepentingan masyarakat pada suatu negara. Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni: perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun struktur politik dan partisipasi politik (T May Rudy, 2002: 119-120). Stabilitas politik yang sedang berkembang sangat tergantung atas kokohnya partai politik yang dimiliki. Negara yang sedang berkembang mencapai derajat stabilitas politik yang tinggi paling tidak memiliki satu partai politik yang berwenang (Samuel P. Huntington, 1983:630).

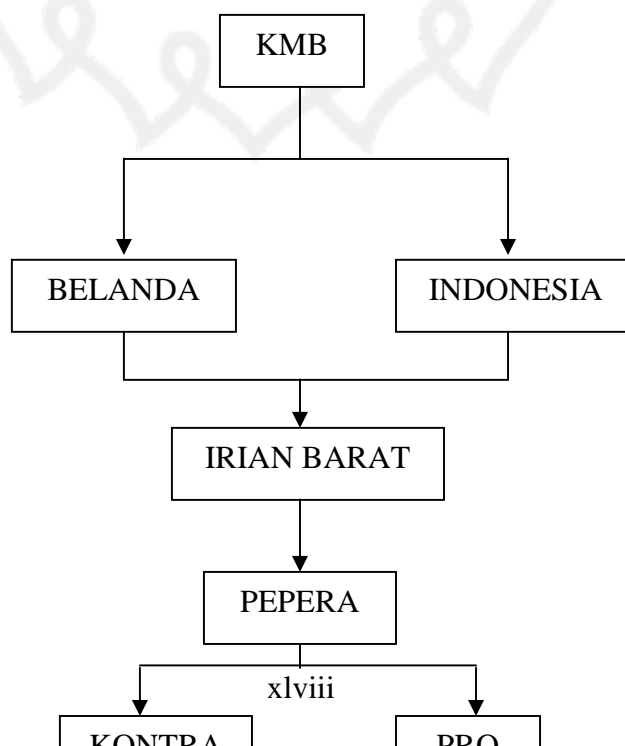
Stabilitas tidak dapat disangsikan, bahwa stabilitas politik akan sangat tergantung pada jenis dan intensitas tantangan yang dihadapinya. Pembangunan semata-mata hanya merupakan proses ekonomi dan tertib sosial belaka. Sandaran politis daripada pandangan seperti ini biasanya berpusat pada konsep stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan dalam tertib sosial yang pasti. Stabilitas yang merupakan stagnasi dan dukungan sepihak pada status quo bukanlah merupakan pembangunan yang sebenarnya, kecuali jika pilihannya adalah penciptaan suasana jauh lebih baik dari suasana yang sekarang. Tetapi tekanan suatu unsur stabilitas masih diterima hubungannya dengan konsep pembangunan, di mana setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial tergantung

pada suatu lingkungan yang mampu mengendalikan ketidakpastian dan menjamin terselenggaranya perencanaan yang didasarkan pada predikat yang relatif aman (Afan Gaffar, 1983: 45).

Program pembangunan nasional di masa orba diterapkan pendekatan pencapaian stabilitas keamanan nasional sebagai salah satu prasarat yang harus dicapai lebih dahulu (pendekatan sekuriti) dalam program pembangunan nasional, dengan membasmi musuh-musuh negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (M. Wresniwiro, 1998:9). Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah pergolakan politik di Indonesia ditandai oleh banyaknya gerakan-gerakan disintegratif, sehingga pembangunan stabilitas nasional akan sulit tanpa didasarkan pada integrasi nasional yang mantap. Integrasi nasional (yang sering dipakai dalam arti sama dengan istilah persatuan dan kesatuan bangsa) menjadi sasaran pembangunan yang harus dicapai berapapun biayanya, sebab semakin solid tingkat integrasi suatu bangsa akan semakin tinggi kualitas stabilitas nasionalnya (Muh. Mahfud Md, 1998:210).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stabilitas adalah kemampuan untuk menciptakan kestabilan suatu negara dalam rangka menyukkseskan pembangunan ekonomi, karena dengan situasi yang aman dan stabil pembangunan akan mudah dilaksanakan.

B. Kerangka Berfikir





Keterangan:

Puncak permasalahan politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang di ketuai oleh Moh. Hatta tidak mau mundur dari sikap yang pernah dipegang para nasionalis sebelum proklamasi. Bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya telah melahirkan kesepakatan dengan Belanda, bahwa penyelesaian tentang Irian Barat di tunda setahun kemudian.

Penundaan penyelesaian Irian Barat telah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga untuk mempersiapkan orang-orang Irian dalam menghadapi kemerdekaan. Dipihak lain untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Dimana Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian New York. Dengan perjanjian New York ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dan Indonesia berkewajiban melaksanakan Pepera, akhirnya Pepera dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis umum PBB . Hasil Pepera menunjukkan bahwa rakyat IRIAN Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dengan hasil Pepera yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara rakyat Irian Barat iti sendiri. Aladsan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian

Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memadamkan geliat rakyat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi OPM, adalah dengan menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi gejolak yang terjadi di Papua Barat. Dua pendekatan itu adalah pendekatan sekuriti dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan sekuriti dilakukan dengan cara meningkatkan tugas-tugas intelijen, sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan pembangunan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

3. Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia) dilakukan dengan kajian pustaka. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang buku-buku literatur, majalah dan surat kabar yang tersimpan diberbagai perpustakaan. Perpustakaan yang digunakan sebagai penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- d. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

- e. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta
- f. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta
- g. Pusat Informasi Kompas Yogyakarta
- h. Buku-buku koleksi sendiri

4. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian dimulai dari disetujuinya judul sampai penyusunan laporan hasil penelitian direncanakan sepuluh bulan, pada bulan Juni 2006 sampai April 2007.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji serta tujuan yang akan dicapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian historis atau metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1975:32) metode sejarah adalah “suatu kajian untuk mengumpulkan, menguji dan menganalisis data yang diperoleh dari masa lampau kemudian merekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan historiografi”. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam Dudung Abdurrahman (1999: 43) metodologi penelitian sejarah adalah “seperangkat aturan atau prinsip sistematis yang menyimpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesa dan hasil-hasil yang di capai bentuk tulisan”.

Menurut Helius Sjamsudin (1996:3) metode histories adalah “suatu cara untuk mengetahui sejarah dengan pemikiran prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan teknik=teknik tertentu, pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik arsip-arsip, perpustakaan maupun wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa sejarah itu”.

Menurut Hadari Nawawi (1995: 79) metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat digunakan untuk

meramalkan kejadian atau keadaan yang akan datang. Sumadi Suryabrata (1983: 16) tujuan penelitian historis adalah “untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode sejarah adalah proses mengumpulkan, menguji, menganalisis, dan menafsirkan gejala-gejala atau peristiwa masa lampau secara kritis didasarkan dari data yang diperoleh serta menyatakan suatu sintesa hasil yang dicapai dalam penulisan sejarah sehingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

C. Sumber Data

Menurut Heliuss Samsudin (1996:73) sumber data sejarah merupakan ”segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu”. Dudung Abdurrahman (1999:30) mengatakan ”sumber sejarah disebut juga data sejarah”. Louis Gottschalk (1975:35) berpendapat bahwa ” sumber sejarah adalah bahan-bahan yang di gunakan sejarawan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu obyek yang berupa dokumen-dokumen resmi, dokumen pribadi dan bahan-bahan yang bersifat arkeologis”.

Menurut Suharsimi Arikunto (1986: 102) sumber data atau sumber sejarah adalah ”segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan penulisan, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Hadari Nawawi (1995: 79) sumber data dalam penelitian historis dapat dikelompokkan menjadi tiga: (1) peninggalan material antara lain berupa candi, piramid, fosil, monumen, senjata bangunan tempat tinggal, peralatan atau perkakas kelengkapan kehidupan, benda-benda budaya, tempat-tempat keramat; (2) peninggalan tertulis antara lain berupa prasasti, relief, daun tertulis, kitab-kitab, naskah-naskah perjanjian, arsip negara; (3) peninggalan tak tertulis atau budaya antara lain berupa cerita rakyat atau dongeng, bahasa, adat istiadat, hukum kepercayaan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang tertulis. Menurut Louis Gotschalk (1983:35), sumber tertulis dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer yaitu kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri, atau dengan panca indera lain, atau dengan alat mekanik menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Sedangkan sumber tertulis sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.

Menurut Lexy J. Moleong (1989:31) "sumber tertulis berupa buku-buku, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi (dikeluarkan pemerintah) dan dokumen pribadi". Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang diperoleh di Pusat Informasi Kompas Yogyakarta yaitu koran Kompas: 2 Mei 1967, 30 September 1967, 9 Mei 1969, 10 Juni 1970, di Monumen Pers surakarta diperoleh Suara Merdeka: 25 april 1969, 10 Mei 1969, 19 Mei 1969. Sedangkan sumber sekunder berupa majalah yang diperoleh dari: Dokumen Monumen Pers: Tifa Irian: 22 Januari 1996 dan Tempo: 17 November 1984, berupa buku-buku diperoleh dari Perpustakaan Monumen Pers Surakarta: Pemberontakan organisasi Papua Merdeka, Cahaya Bintang Kejora; Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah: Indonesia Diambang Perpecahan; Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Integrasi Nasional; Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta: Masa Depan Papua, Integrasi Politik Di Indonesia; Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta: Mengapa Papua Bergolak. Selain sumber data tertulis di atas, peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian. Wawancara dilakukan dengan: 1) Sudarmono, SU; 2) M.T. Arifin. Serta wawancara dengan alat telekomunikasi yaitu telephon dengan Praka Tyanri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode sejarah, teknik pengumpulan data disebut Heuristik. Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu

penelitian. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan pengumpulan data digunakan dua macam cara yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca bahan yang berasal dari buku, surat kabar, dan majalah yang terbit dimasa itu atau terbit kemudian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan buku-buku, majalah, surat kabar yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian membaca dan mencatat sumber data yang akan dibutuhkan dan memfotocopy untuk dijadikan data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

2. Wawancara

Menurut Kartono kartini (1976:209) metode wawancara atau interview adalah "suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, interview ini merupakan proses tanya jawab secara lesan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik". Menurut Lexy Maleong (2001: 135) wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu".

Maksud dari wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motif, tuntutan kepedulian. Suatu wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sehingga memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan maka diadakan pemilihan personil yang akan diwawancarai.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara. Artinya daftar pertanyaan sudah disusun, tetapi dalam pelaksanaannya berkembang sesuai kebutuhan. Dengan demikian peneliti sebagai instrumen wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Mohammad Nazir, 1998:405).

Penulisan fakta sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data sejarah yang obyektif, sehingga unsur subyektifitasnya dalam menganalisis data sejarah perlu dikurangi. Dalam proses analisis data harus selalu diperhatikan unsur-unsur yang relevan dalam sumber data sejarah dan apakah unsur tersebut kredibel. Suatu unsur disebut kredibel, apabila unsur tersebut paling dekat dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Unsur tersebut untuk dapat diketahui kredibel tidaknya diperoleh berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber sejarah yang ada (Louis Gottscalk, 1986:42).

Fakta merupakan bahan utama yang di jadikan oleh sejarawan dalam menyusun historiografi. Fakta itu sendiri merupakan hasil pemikiran para sejarawan, sehinggannya fakta yang terkumpul mengandung subyektivitas. Setiap fakta yang terekontruksi oleh sejarawan akan menghasilkan kontruksi. Setiap kontruksi mengandung unsur-unsur dari penyusunan kontruksi tersebut, sehingga dalam menganalisis di perlukan konsep seperti penyeleksian, pengidentifikasian (Sartono Kartodirdjo, 1992: 92). Dudung Abdurrahman tujuan dari analisis data dalam penelitian sejarah adalah untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang di peroleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori di susunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan pengklasifikasian data. Analisis dimulai dengan menyeleksi dan membandingkan data kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan keterangan lengkap mengenai data yang akan dijadikan fakta sejarah.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai penulisan hasil penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Heuristik

Menurut Dudung Abdurrahman (1999:55) Heuristik berasal dari kata Yunani "Heurischein" artinya memperoleh. Helius Sjamsudin (1996:99), heuristik adalah "pengumpulan sumber-sumber sejarah". Menurut Nugroho Notosusanto (1978:76) bahwa heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa masa lampau atau mencari sumber. Jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber bagi penulisan sejarah. Sumber sejarah perlu adanya pengklasifikasian atau penggolongan berbagai macam sumber agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami kasulitan, sebab sumber sejarah bisa berupa bagian politik, sosial, ekonomi, budaya maupun militer. Bagi peneliti apabila tema yang akan diteliti sudah ditemukan, maka selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan sumber tertulis berupa buku-buku, majalah serta bentuk kepastakaan yang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian heuristik dapat penulis simpulkan kegiatan menemukan, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau jejk-jejak sejarah untuk mengisahkan kembali peristiwa sejarah masa lampau. Hasil yang penulis peroleh dalam pencarian jejak sejarah atau sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu mengenai Organisasi Papua Merdeka 1966-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia) adalah berupa sumber-sumber tertulis yang meliputi buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

6. Kritik

Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah langkah verifikasi atau kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Menurut Helius Sjamsudin (1994:103) keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan sumber. Kritik terhadap sumber data di lakukan dengan dua cara ,yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Menurut Helius Sjamsudin (1996:105) kritik ekstern adalah suatu penilaian atas asal usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada waktu sejak awal mula sumber telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Uji ontensitas dilakukan dengan melihat jenis kertas,

bentuk tulisan, bahasa yang digunakan, tahun pembuatan, siapa yang membuat, serta dimana arsip, buku, majalah dan surat kabar dibuat.

Kritik intern adalah cara melakukan verifikasi atau pengajuan terhadap aspek-aspek dalam arti sumber data sejarah. Kritik intern dilakukan untuk mendapatkan sumber data sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat diketahui bagaimana isi sumber data sejarah dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kritik intern sumber data tertulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang di gunakan penulis, sumber data, kecenderungan politik, permasalahan sama. Kemudian isi dan pernyataan dari sumber data tertulis maupun lisan tersebut di bandingkan dengan sumber-sumber data yang lainnya. Hasil dari kritik sumber data sejarah adalah fakta sejarah. Sumber yang dibandingkan diantaranya seperti buku karangan Syamsudun Haris yang menyebutkan bahwa meletusnya gerakan sparatis OPM sebagai akibat terbatasnya komunikasi, khususnya dalam arti politik. Padahal kominikasi politikmemberi obyek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya, kemudian buku ini dibandingkan dengan buku karangan Chusnul Mar'iyah, yang menyebutkan bahwa berseminya Papua menunjukkan suatu kelemahan pada pemerintah Indonesia dan kurangnya penerimaan Papua terhadap pemerintah Indonesia. Berdasarkan dua informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa meletusnya gerakan sparatis OPM sebagai akibat terbatasnya komunikasi politik dan kurangnya penerimaan Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Pada tahap kritik inilah merupakan langkah verifikasi atau kritik guna mempeoleh keabsahan sumber tentang masalah Organisasi Papua Merdeka 1966-1998)Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia).

7. Interpretasi

Setelah data terseleksi dam memenuhi syarat kevaliditasannya, maka langkah selanjutnya yaitu interpretasi data yang dilakukan dengan menafsirkan, memberi makna dari fakta yang diperoleh seta menghubungkannya di antara sumber satu dengan sumber lainnya, yang dikaitkan dengan teori maupun konsep yang mendukung sehingga muncul fakta sejarah (Nugroho Notosusanto,

1978:21). Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal.

Interpretasi yaitu kegiatan memberikan penafsiran terhadap data sejarah yang telah diteliti keasliannya. Hal tersebut dilakukan karena data yang diperoleh harus dimengerti oleh sejarawan dan perlu dipilahkan antara sumber yang relevan dan yang tidak relevan.

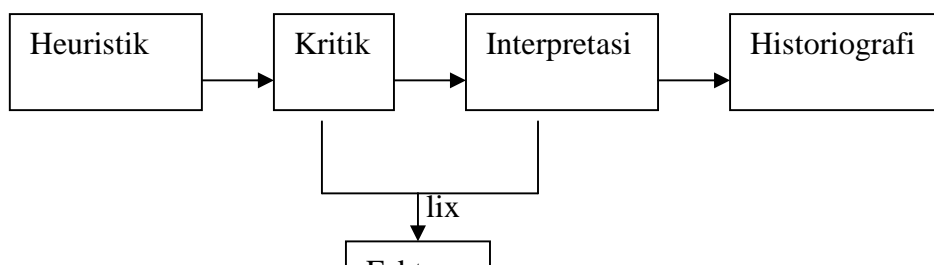
Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam tahap interpretasi ini adalah penulis harus membaca berbagai buku yang sesuai dengan tema-tema, kemudian penulis akan membandingkan buku yang satu dengan buku yang lain, apabila ada perbedaan pendapat dari salah satu buku, maka penulis harus mencari buku-buku lain yang sesuai dengan pendapat tersebut kemudian diperbandingkan lagi sehingga terlihat seberapa banyak pendapat yang menyatakan sama tentang pokok permasalahan tersebut, setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan kebenaran tentang peristiwa sejarah tersebut.

Tahap interpretasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh fakta yang valid tentang Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)

8. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti-bukti yang berupa sumber-sumber data sejarah yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk penulisan dengan judul Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia).

Dari uraian tersebut di atas, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:





DAFTAR PUSTAKA

B. Surat Kabar:

Sudjarwo Tjondronegoro. 1969. Mei 9 “*Bukti-bukti Pengatjauan OPM*”. *Kompas*. 1.

B. Sumber Buku

Chusnul Mar’iyah. 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit

Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos

F. Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Bina Cipta

Frans Maniagasi. 2001. *Masa Depan Papua*. Jakarta: Millenium Publisher

George Junus Aditjondro. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam

Louis Gottschalk. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press

Moch Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

JRG. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Nazarudin Syamsudin. 1989. *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Saafroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional: Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Syamsuddin Haris. 1999. *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga

Tim SKP Jayapura. 2005. *Membangun Budaya Damai dan rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: Tim SKP

Tuhan Taufik A. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media

Yakobus F Dumupa. 2006. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Munculnya Organisasi Papua Merdeka

1. Pengaruh Pemerintahan Belanda Di Irian Jaya

Sejak abad ke-18, pulau Pasifik Selatan Papua telah menjadi korban ambisi penjajahan dan pernah dikuasai oleh Inggris, Jerman, Belanda dan Jepang.

Sepuluh bagian Barat Papua tetap berada di bawah pemerintahan Belanda, bahkan setelah kawasan lain Hindia Belanda berada di dalam kedaulatan Republik Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Baru pada tahun 1950-an, pemerintah Belanda mulai melepaskan kekuasaan atas bagian akhir dari bekas kerajaannya di Asia Pasifik. Orang-orang Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Papua melalui proses dekolonisasi menuju kemerdekaan (Irfan Abubakar, 2005: 114).

Menurut Syamsudin Haris (1999: 180) Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda mempersiapkan untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Irian Barat. Ada tiga kepentingan Belanda di Irian Barat antara lain:

1. Menjadikan Irian Barat sebagai pusat penampungan atau “Tropical Holland” untuk keturunan Eurasia yang tidak dapat kembali ke Holland.
2. Menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan para wiraswastawan Belanda yang meninggalkan Indonesia.
3. Menjadikan Irian Barat sebagai basis untuk kemungkinan intervensi militer Indonesia, apabila republik yang baru berdiri tersebut runtuh.

Tekad Belanda untuk mencegah jatuhnya Irian Jaya kepada Indonesia diwarnai pula keinginan untuk memberikan hak untuk berpemerintahan sendiri kepada Irian Jaya dalam tahun 1950-an. Oleh sebab itu Belanda merencanakan untuk memberikan status pemerintahan sendiri kepada Irian Jaya selambat-lambatnya tahun 1970-an, dan status pemerintahan itu pun tergantung pada proses kemajuan “irianisasi” pemerintahan di Irian Jaya (Nazarudin Syamsudin, 1989: 93).

Sejarah masuknya Irian Barat ke Indonesia amatlah sederhana. Pada kenyataannya hal ini merupakan jalan panjang dan rumit. Indonesia bukan saja menggunakan cara-cara diplomasi²⁷ mendapatkan Irian Barat, tetapi juga menggunakan cara-cara militer. Pada fase pembebasan ini, yaitu tahun 1949-1963, sudah muncul benih-benih separatisme di Irian Jaya. Benih-benih separatisme ini dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda saat itu bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Jaya, tetapi juga melakukan pembangunan politik (Saafroedin Bahar, 1996: 220).

Menurut Syamsudin Haris (1999: 182-183) Untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan di Irian Barat, subsidi Belanda untuk Irian Barat meningkat dari US\$ 4,3 juta pada tahun 1950 menjadi hampir US\$ 28 juta pada tahun 1962. Belanda membangun sekolah administrasi di Abepura, dan memperbolehkan berdirinya partai politik sebagai bagian dari pembangunan politik di Irian Barat. Sejak awal tahun 1950 Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di Irian Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia mendapatkan dukungan dari luar negeri atas persoalan Irian Barat, yaitu dengan cara meningkatkan persepsi bahwa wilayah Irian Barat dapat merdeka sendiri. Beberapa partai politik pada saat itu ada yang pro-Indonesia dan sebagian lainnya pro-Belanda. Di antara gerakan politik pro-Indonesia adalah gerakan pemuda Iryan (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh pemimpin nasional Indonesia di Irian Barat, maka dilarang oleh Belanda pada tahun 1961. Pada bulan Januari Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Irian Barat. Partai politik itu antara lain:

- a. Partai Demokrasi Rakyat, ketua: Arnold Runtubuy; sekretaris: Mozes Rumainum; bendahara: Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun 1957 dan mempunyai tujuan untuk bersatu dengan Papua Niugini dalam Federasi Melanesia.
- b. Partai Nasional, ketua: Herman Wajoi; wakil ketua: Amos Indey; sekretaris: S. Martin Bela dan Frits M. Kirihio. Partai ini mempunyai tujuan untuk mempersiapkan orang-orang Papua menuju penentuan nasib sendiri dibawah pengawasan dan petunjuk Belanda.
- c. Partai New Guinea Bersatu, ketua: Ludwijk Mandatjan; wakil ketua: H. F.W. Gosewisch. Partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan politik sebelum tahun 1975 dalam kaitannya dengan Belanda, Antilles dan Suriname.
- d. Partai Serikat Pemuda Papua, ketua: Johan Wamaer, anggota terbatas pada orang-orang Papua dan partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan dibawah pengawasan PBB.

- e. Partai Persatuan Orang New Guinea, ketua: Johan Ariks. Partai ini mempunyai tujuan untuk merdeka tanpa target tanggal dan anggotanya terbatas pada orang-orang Papua.
- f. Partai Kekuatan Menuju Persatuan atau Kena U Embay, ketua: Ezau Itaar; wakil ketua: Anas Kereuta; bendahara: Willem Ossoway. Partai ini mempunyai tujuan menuju kemerdekaan sesudah itu bekerja dalam kaitan dengan Belanda.
- g. Partai Rakyat, ketua: Husain Warwey; wakil ketua: Luis Rumaropen; sekretaris: M. Ongge, dan Z. Abaa.
- h. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat, ketua: Muhammed Nur Majalibit; sekretaris: J. Rajar; penasehat pertama: Abdullah Arfan. Partai ini bekerja sama dengan Belanda untuk mencapai kemakmuran di New Guinea Belanda, dan bersandar pada hasil-hasil daerah.

Puncak tuntutan rakyat Papua Barat terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu banyak tuntutan yang datang kepada pemerintah Belanda sebagai pihak yang memegang kendali administratif dan politik di Papua Barat, agar Papua Barat diberi kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Upaya Belanda terhadap tuntutan itu adalah Belanda mulai memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang datang dari atas ke bawah. Bentuk demokrasi itu adalah Belanda membentuk sebuah badan yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Papua Barat yang diberi nama *Nieuw Guinea Raad* atau Dewan Nieuw Guinea. Perencanaan berdirinya organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1946 dengan jumlah 21 orang, tetapi tidak bisa terealisasi karena kondisi masyarakat Papua yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan pemilihan umum (Yakobus F. Dumupa, 2006: 29-30). Pada bulan Februari 1961 Belanda melangsungkan pemilihan umum baik pemilihan langsung maupun tidak langsung untuk membentuk sebuah parlemen Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nieuw Guinea. Menurut Van Der Veur, sekitar 54.000 orang Papua berpartisipasi dalam pemilihan umum dan ketika Dewan Nieuw Guinea diresmikan pada tanggal 5 april 1961, orang-orang Papua menduduki 22 kursi dari 28 kursi yang tersedia (Syamsudin Haris, 1999: 184).

Dewan Nieuw Guinea adalah suatu badan dengan fungsi-fungsi legislatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran “nasional” Irian dengan memperkenalkan proses demokrasi. Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea dengan harapan dapat menjauhkan perhatian orang-orang Irian terhadap Indonesia dan sebaliknya mendekatkan orang Irian kepada Papua dan New Guinea yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Australia (Nazarudin Syamsudin, 1989: 92). Secara garis besar Nieuw Guinea Raad memiliki kekuasaan legislatif bersama dengan pemerintah dan melaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran Belanja. Di dalam perencanaan pembentukan Nieuw Guinea Raad, Belanda menyadari bahwa lembaga itu pada awalnya mempunyai sarana latihan demokrasi. Pada tahun 1960 telah dibentuk sebuah batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korps*) dan berkedudukan di Arfai-Manokwari. Maka setelah pembentukan Nieuw Guinea Raad, pada awal tahun 1962 dilanjutkan dengan pembentukan dewan daerah (*streekraad*). Implementasi dari demokrasi kolonial ini bertujuan untuk menindas perasaan anti-Indonesia (JRG. Djopari, 1993: 35).

Menurut Nazarudin Syamsudin (1989: 95) Upaya Belanda dalam rangka penanaman rasa anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian, yaitu Belanda menempuh tiga cara yaitu:

- 1) Mengalihkan orientasi dari Indonesia pada wilayah Pasifik, meskipun sebelumnya Belanda telah ikut memperkuat orientasi Irian kepada Nusantara ini.
- 2) Berusaha mendekatkan Irian kepada Papua dan Niugini yang dikuasai Australia dengan harapan dapat menggabungkan semuanya dalam suatu negara.
- 3) Merencanakan suatu negara Papua setelah melalui suatu proses.

Dewan Nieuw Guinea yang didirikan oleh Belanda sebagai upaya untuk mendirikan negara boneka Papua, dapat dianggap sebagai “boom waktu” yang sengaja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di Irian Barat. Beberapa tokoh Irian yang pro-Belanda pada saat itu antara lain: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tangahma, dan Elieser Jan Bonay (Saafroedin Bahar, 1996:

220). Di samping itu Belanda juga mendirikan lembaga baru untuk mempersiapkan orang-orang Irian menghadapi “kemerdekaan”. Selain itu Belanda juga memberikan pendidikan untuk para calon Pamong Praja, Belanda mendirikan polisi Papua dan Batalyon Papua. (Nazarudin Syamsudin, 1989: 92).

Pada tanggal 19 Oktober 1961 Belanda membentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang. Komite Nasional ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka, yang dilengkapi 70 putra Papua Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto yang isinya: menentukan nama negara: Papua Barat; menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua; menentukan bendera: Bintang Kejora; menentukan lambang negara: Burung Mambruk, dengan semboyan One Peole One Soul dan menentukan bendera Bintang Kejora dikibarkan pada tanggal 1 November 1961 (Yakobus F. Dumupa, 2006: 30). Sebuah konstitusi yang terdiri dari 129 pasal dan juga disusun, dan kongres mengumumkan secara resmi “kebersamaan” sebagai prinsip utama negara yang baru berdiri (Theodor Rathgeber, 2006: 44).

Ternyata rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 November 1961 tidak terlaksana karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan di Holladia dan lagu Hai Tanahku Papua dinyanyikan bersamaan dengan lagu Wilhelmus. Kegiatan pengibaran dan menyanyikan lagu kemerdekaan Papua Barat dilakukan terus menerus selama satu minggu sampai dengan dimulainya pemerintahan United Nations Temporary Execitive Asosiations (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962 (Yakobus F. Dumupa, 2006: 30-31).

Upaya Belanda untuk menanamkan perasaan anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian mulai menunjukkan hasilnya, yaitu menjelang akhir kekuasaan Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1962 terjadi demonstrasi anti-Indonesia di beberapa tempat. Para demonstrans membawa bendera Papua Merdeka dan menyebarkan pamflet-pamflet. Sebelum demonstrasi terjadi, di beberapa tempat telah berlangsung rapat-rapat pendahuluan yang dikoordinasi oleh anggota Dewan Nieuw Guinea (Nazarudin Syamsudin, 1989: 94).

Aspek-aspek internasional yang menumbuhkan benih separatisme pada masa pergolakan politik, contohnya dari pengaruh internasional adalah adanya upaya Belanda untuk bekerjasama dengan Australia dibidang administrasi perbatasan, khususnya masalah karantina, kesehatan, kerjasama tehnik, dan juga pertukaran informasi mengenai perbatasan. Namun perjanjian itu dibuat pada bulan November 1957 itu tidak membahas masalah politik, karena Australia sebagai penguasa kolonial di PNG (saat itu bernama *The Territory of Papua and New Guinea*) takut akan adanya ketegangan dengan Indonesia apabila Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat. Alasan Australia adalah menjaga keamanan regional dengan Belanda dari pada dengan Indonesia, karena Australia takut bahwa Indonesia juga akan mengklaim PNG dan akan menyebarkan komunisme. Namun perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam masalah Irian Barat dari “Netralis Pasif” ke “Mediasi Aktif” telah mengubah sikap Australia untuk mendukung Indonesia dalam klaim Irian Barat (teritorial ini). Akhirnya Australia juga menghentikan kerjasama dengan Belanda pada tahun 1961. Melemahnya dukungan dari sekutu-sekutu Barat telah menyebabkan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Joseph Luns mengajukan “Luns Plans” kepada Majelis Umum PBB. Luns mengusulkan supaya sebuah organisasi atau badan internasional yang bernaung dibawah PBB, untuk mengambil alih kekuasaan atas Irian Barat dengan maksud untuk mempersiapkan rakyat Irian Barat untuk mengadakan penentuan nasib sendiri secepatnya dibawah kondisi yang stabil. Usulan Luns telah meningkatkan atau membangkitkan aktifitas para tokoh Irian yang pro-Belanda termasuk: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma, dan Elieser Jan Bonay melakukan konsolidasi dan juga telah mempersiapkan “kemerdekaan Papua Barat” (Saafroedin Bahar, 1996: 220-221).

Cita-cita menjadi bangsa (*nations state*) yang merdeka dan berdaulat penuh itulah yang di hadang oleh perjanjian New York (15 Januari 1962) yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Papua. Padahal perjanjian itu menyangkut nasib dan masa depan bangsa Papua, bukan nasib Indonesia atau Belanda. Inilah sebuah “konspirasi politik” antara Indonesia,

Amerika Serikat dan Belanda yang mewujudkan Papua merdeka (Frans Maniagasi, 2001: 25).

Kepergian Belanda dari Irian Jaya pada akhir bulan Desember 1962 yang diikuti pula beberapa tokoh yang anti-Indonesia termasuk di dalam kelompok ini adalah mantan anggota Dewan Nieuw Guinea, seperti Marcus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wamsiwor, dan juga Ben Tanggahma, Dick Sarwon, Jufuwai. Setibanya tokoh anti-Indonesia itu di negeri Belanda, mulailah terdengar adanya gerakan yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan untuk memisahkan Irian Jaya dari Indonesia (Nazarudin Syamsudin, 1989: 96). Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Dengan pengalaman politik yang diajarkan oleh pemerintah Belanda telah membangkitkan para elit Irian Jaya didikan Belanda untuk mendirikan Organisasi Papua Merdeka. Tujuan daripada mendirikan Organisasi Papua Merdeka adalah untuk membentuk suatu negara Papua yang merdeka lepas dari Indonesia maupun Belanda, dan awal perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 1965 yang dipelopori oleh Ferry Awom (Totok Sarsito, 24 Januari 2007).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikendalikan oleh warganegara Belanda. Warganegara Belanda tersebut menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengandalkan diri untuk membebaskan tanah Papua dan juga menonjolkan diri sebagai tokoh pejuang Papua Merdeka yang meminta dan menerima kewarganegaraan Belanda. Sekurang-kurangnya ada 6 tokoh pimpinan OPM sebagai warganegara Belanda. Tokoh tersebut adalah: J.E. Papare bertempat tinggal di Apedoorn, Herman Wasiwor bertempat tinggal di Den Haag, Bernadus Tangahma bertempat tinggal di Den Haag, F. Malaiholo bertempat tinggal di Hoogeveen, W.J. Aringaneng bertempat tinggal di Hoogeveen, dan O.A. Dakilwadjiir bertempat tinggal di Hoogeveen (Suara Merdeka, 25 April 1969).

Organisasi Papua Merdeka lahir dan tumbuh di Irian Jaya yang pada awalnya terdiri dari dua faksi. Faksi itu adalah: 1) Organisasi atau faksi yang

didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Faksi ini menempuh jalan kooperasi dengan pemerintah Indonesia, serta mengaitkan perjuangannya dengan gerakan yang bercirikan spiritual yaitu campuran antar agama adat atau gerakan dan agama Kristen. Perjuangan Aser Demotekay untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat atau Irian Jaya dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Irian Jaya sesuai dengan janji Al Kitab, janji leluhur dan janji tanah ini bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan menuju akhir zaman adalah Papua Barat. Secara organisasi, kegiatan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Aser Demotekay merupakan kegiatan pemujaan versi baru dan sangat tergantung pada Aser Demotekay. 2) Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE) di Manokwari pada tahun 1964. Organisasi ini pada awalnya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara fisik bersenjata. Kegiatan ini diberi nama “Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Merdeka”, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (JRG.Djopari, 1993: 101).

Menurut Tuhana Taufik A (2001: 123-124) Organisasi atau faksi yang dipimpin oleh Terianus Aronggear mempunyai susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Umum	: Terianus Aronggear (SE)
Ketua I	: Melkianus Horota
Ketua II	: Kaleb Taran
Ketua III	: Melkianus Watofa
Sekretaris	: Hendrik Joku
Bendahara	: Korinus Krey
Penghubung	: A.G. Samadudo
Wakil Penghubung	: M. Jenu
Logistik	: Go Siem San (Nyong Putih)
Panglima Perang	: Permanes ferry Awom
Wakil Panglima I	: Julianus Wanma

Wakil Panglima II	: Gerodus Wompere
Komandan Sektor Militer I	: J. Arumisore
Komandan Sektor Militer II	: Simson Wanma
Komandan Sektor Militer III	: A. Wabdaron
Komandan Sektor Militer IV	: G. Boseran
Kepala Polisi	: J. Rumbobiar

Terianus Aronggear selain sebagai ketua umum organisasi, juga menyusun suatu dokumen perjuangan yang akan diselundupkan ke badan PBB di New York untuk menanyakan tentang status Irian Jaya dan meminta peninjauan Persetujuan New York 15 Agustus 1962. Persetujuan itu dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan sebagai pihak yang dipersengketakan. Dokumen itu berisi suatu rancangan tentang kemerdekaan negara Papua Barat dengan susunan kabinet sebagai berikut:

Presiden	: Markus Kaisiepo
Wakil Presiden	: Nicolaas Jouwe
Menteri Luar Negeri	: Terianus Aronggear (SE)
Menteri Perdagangan	: Herman Womsiwor
Menteri Perekonomian	: Kaleb Taran
Menteri Kehutanan	: Melkianus Horota
Menteri Pendidikan	: Melkianus Watofa
Panglima Perang	: Permanes Ferry Awom

Namun sebelum dokumen itu diserahkan oleh Terianus Aronggear (SE) kepada Hendrik Joku di Jayapura, untuk selanjutnya diselundupkan ke luar negeri melalui perbatasan Papua New Guinea, Terianus Aronggear (SE) ditangkap oleh pihak keamanan di Biak pada tanggal 12 Mei 1965 (JRG. Djopari, 1993: 103-104).

Pada tanggal 9 September 1968, telah diselenggarakan rapat gelap yang menghasilkan propaganda untuk mengembalikan rasa benci rakyat Irian Jaya terhadap pemerintah (RI) pusat, dan berusaha mendirikan apa yang disebut "Negara Papua Merdeka". Rapat itu juga dihadiri oleh kurang lebih 19 orang, yang terdiri dari oknum-oknum yang berasal dari Irian Jaya, serta beberapa orang lainnya merupakan antek-antek orde lama (Kompas, 30 September 1967).

Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi, baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Organisasi Papua Merdeka semakin populer yaitu pada saat meletusnya pemberontakan senjata di Manokwari yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom pada tahun 1963 di Manokwari, serta pemberontakan atau aksi militer sporadis lainnya diberbagai wilayah Irian Jaya (Tuhana Taufik A, 2001: 120).

Menurut Viktor Kaisiepo, Organisasi Papua Merdeka lahir dari faksi perjuangan yang ada dan dibentuk di Irian Jaya atau Papua Barat. Faksi-faksi itulah yang mengirim berita atau informasi kepada pemimpin Papua yang memilih tinggal di Belanda, supaya bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Maka setelah mendapat informasi tentang perjuangan di Irian Jaya, Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo mulai menyusun rencana perjuangan baik politik maupun militer untuk mendukung aktifitas perjuangan kemerdekaan di Irian Jaya yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka untuk menggunakan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai suatu nama kesatuan dalam perjuangan bangsa Papua Barat (JRG. Djopari, 1993:104-105).

2. Kekecewaan Rakyat Irian Jaya Kepada Pemerintah Indonesia

Pemerintah baru Republik Indonesia memandang kebijakan Belanda untuk kemerdekaan Papua sebagai siasat licik untuk menyelenggarakan kekuasaan kolonial Belanda di Pasifik. Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 dengan tujuan mengusir Belanda dan membangun klaim kedaulatan terhadap wilayah yang pernah dikuasai pemerintah Hindia Belanda (Irfan Abubakar, 2005: 114). Indonesia mematok batas timur negaranya di Merauke, yaitu batas negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan alasan sejarah penjajahan. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan penjajahan Belanda di Indonesia adalah mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan itu dijalankan oleh Belanda dari Batavia (sekarang Jakarta) yang bertanggung jawab kepada

Ratu Kerajaan Belanda. Sedangkan penjajahan Belanda di Papua Barat dijalankan dari Hollandia (sekarang Numbay) yang bertanggung jawab kepada Ratu Belanda. Indonesia dan Papua Barat masing-masing berdiri sendiri atau tidak senasib (Yakobus F. Dumupa, 2006: 123-124).

Presiden pertama Indonesia, Soekarno mengumandangkan rencana militer untuk mengembalikan Papua Barat (disebut Indonesia sebagai Irian Barat). Invasi militer Indonesia terhadap Papua Barat menarik perhatian Internasional ditengah-tengah kecemasan Perang Dingin. Amerika kemudian menjadi mediator, yang berupaya menarik simpati Indonesia dan menjaga Jakarta tidak masuk kedalam sumbu Soviet (Irfan Abubakar, 2005: 114). Amerika mendukung integrasi Papua Barat ke Indonesia demi kepentingan kapitalismenya. Hal ini terjadi dalam proses persiapan sampai pelaksanaan PEPERA. Amerika, Belanda dan PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Sedangkan rakyat Papua Barat tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan sejak dicetuskan *New York Agreement* sampai dilaksanakan, orang Papua Barat dijadikan “boneka mainan”(Yakobus F. Dumupa, 2006: 113).

Menurut Saafroedin Bahar (1996: 223) Pada fase peralihan (1963-1969) ada beberapa masalah di Irian Jaya, yang menyebabkan bangkitnya kembali sikap beberapa kalangan di Irian Jaya antara lain:

1. Sikap sebagian pejabat di Irian Jaya seperti orang yang baru “menang perang”, sehingga menumbuhkan persepsi dikalangan penduduk asli bahwa pendatang itu adalah “*The New Colonial Masters*”.
2. Beberapa pejabat sipil dan militer juga mengangkut barang-barang peninggalan Belanda di Irian Jaya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pejabat itu “merampok Irian”, walaupun sebenarnya tidak sedikit pejabat pemerintah yang benar-benar berdedikasi dengan semangat untuk membangun Irian Jaya. Namun seperti peribahasa Indonesia “karena nila setitik maka rusak susu sebelangga”. Oleh karena itu timbul pula sikap anti-Indonesia di Irian Jaya.
3. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa sulitnya ekonomi. Dampak ekonomi juga merembet ke Irian Barat. Dampak pertama adalah

kesulitan untuk membangun Irian Barat, yaitu kebutuhan pokok penduduk pada saat itu sulit didapat di pasar, walaupun ada harganya sangat tinggi. Kesulitan yang kedua adalah banyaknya migrasi penduduk dari Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur ke Irian Barat. Khususnya dari Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk mengadu nasib di wilayah Irian Barat. Hal ini sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak menikmati pembangunan, tetapi juga terpengaruh dari posisi sebagai pedagang di pasar Irian Barat.

4. Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Irian Jaya, yang menyebabkan banyak orang-orang Irian yang terpengaruh dari posisi di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Belanda tidak sedikit orang Irian yang duduk dipemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Pemerintah Indonesia menganggap pegawai dari Irian tidak memenuhi standart kepegawaian, sehingga perlu diganti. Namun dampak politiknya timbul pandangan bahwa telah terjadi pengalihan posisi dari penduduk asli kependatang.

Pada kurun waktu antara tahun 1963 sampai 1969, Indonesia mempersiapkan orang-orang Papua Barat yang akan bersuara saat PEPERA. Orde Baru dibawah pimpinn Jenderal Besar Soeharto merencanakan suatu aturan melalui “Operasi Khusus” (Opsus) dipimpin oleh Ali Murtopo yaitu memutar balikkan aturan permainan yang telah disepakati bersama, melenceng dari perjanjian New York. Rekanisasi yang dilakukan Orde Baru bukan lagi semata-mata *one man one vote* atau satu orang satu suara, tetapi melalui sistem perwakilan. Untuk menunjang sistem perwakilan dibentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) di Irian Jaya, yang beranggotakan 1025 orang wakil yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan orisinal pilihan rakyat. Alasan pembentukan DMP adalah selain pertimbangan kesulitan dan kendala geografis, alam dan angkutan, alasan dari pemerintah Indonesia yakni tingkat pemahaman politik dari rakyat yang digambarkan masih bodoh dan primitif. Berbagai cara dan strategi dihalalkan oleh Opsus untuk memenangkan tugas membela negara. Selain memutarbalikkan praktek pelaksanaan PEPERA 1969, pemerintah Indonesia

melalui tiga tokohnya: Jenderal Ali Murtopo, Jenderal Sarwo Edhi Wibowo dan Pangdam XVII Cenderawasih pada waktu itu juga melakukan intimidasi, teror, ancaman bahkan pembunuhan atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau memilih bergabung dengan Indonesia (Frans Maniagasi, 2001: 78-79).

Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, lembaga Operasi Khusus (Opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua pro-Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan di Irian Barat dengan menghimpun kekuatan, dalam bentuk gerakan bawah tanah atau sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan yang bersifat ilegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintahan Belanda maupun pemerintah Indonesia. Organisasi gerakan bawah tanah yang muncul di Irian Jaya seperti di Jayapura, yaitu Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Gerakan ini timbul pada tahun 1963 yang dipelopori Asder Demotekay, mantan kepala distrik Demta Kabupaten Jayapura. Kemudian tahun 1964 di Manokwari munculah suatu gerakan politik yang diberi nama “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat”. Oleh pemerintah dalam hal ini pihak keamanan menamakan gerakan itu sebagai “Organisasi Papua Merdeka” (OPM). Nama Organisasi Papua Merdeka, belakangan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi atau fraksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri. Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian yang pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan, memerdekakan Irian Jaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001: 119-120).

Lahirnya Organisasi Papua Merdeka dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional dalam dan luar negeri. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Faktor-faktor kondisional yang menyebabkan lahirnya Organisasi Papua Merdeka adalah: 1) faktor dari dalam negeri: perang suksesi tahun 1965, yaitu terjadi pengalihan kekuasaan dengan pemberontakan, pembunuhan

dan penggulingan kekuasaan; kemelut politik dalam negeri, yaitu pemerintah Indonesia kurang memperhatikan persoalan/disintegrasi yang ditumbuhkan dari luar; kepentingan Orde Baru atas propinsi Irian Jaya, yaitu mengambil sumber daya alamnya dan menjualnya kepada negara lain; 2) faktor dari luar, yaitu adanya kepentingan dari luar untuk menguasai sumber daya alam Irian Jaya. Karena luar negeri tidak senang negara Indonesia utuh, maka luar negeri mengupas atau memprofokasi Irian Jaya untuk keluar dari negara Indonesia (Sudarmono, 15 Januari 2007).

Indonesia mempunyai kepentingan atas Papua Barat dan tidak ingin melepaskan Papua Barat kepada pihak lain (Belanda) maupun kepada rakyat Papua Barat sebagai negara merdeka. Indonesia mengambil Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa yang dijajah oleh Belanda, tetapi karena alasan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ali Murtopo (perancang PEPERA, yaitu orang kepercayaan Soeharto) “Jika kamu orang Papua ingin merdeka, maka pergilah mengemis kepada Amerika dan meminta salah satu pulau di Pasifik atau pergilah ke bulan dan dirikan negara Papua disana, sebab kami tidak membutuhkan orang Papua, tetapi kami membutuhkan tanah Papua” (Yakobus F. Dumupa, 2006: 36-37).

PEPERA yang diselenggarakan, yaitu proses pengambilan keputusan hampir tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun sebagai partisipasi masyarakat Papua yang sah. Sejak awal sejumlah besar kelompok masyarakat Papua menentang penggabungan dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia secara sepihak memilih 1025 orang (dari total penduduk Papua) dan membuat para wakil itu menyetujui integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia menggunakan sistem musyawarah antar suku di seluruh wilayah. Selain itu Indonesia hanya mengizinkan pengawas PBB untuk memantau referendum di 195 dari 1000 pemilihan. Kecurangan itu bahkan tersirat dalam laporan pemerintah Indonesia kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan perjanjian (New York). Tindakan pemilihan versi Indonesia sama sekali bukanlah pilihan

bebas. Lebih buruk lagi, yaitu para wakil itu memilih berintegrasi dengan Indonesia, karena ancaman, intimidasi, pembunuhan dengan kekuatan militer (Teodor Rathgeber, 2006: 46-47).

Kekecewaan rakyat Irian Jaya terhadap pemerintah Indonesia karena kesenjangan ekonomi dan kesenjangan politik. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Kekecewaan rakyat Irian Jaya kepada pemerintah Republik Indonesia yaitu kesenjangan ekonomi dan politik. Kesenjangan ekonomi adalah di Irian Jaya kekurangan pangan, sedangkan wilayah Indonesia lain kelebihan makanan. Sedangkan kesenjangan politik adalah putra-putra Irian Jaya tidak ada yang menjadi pejabat (Pawito, 19 Januari 2007).

Pada awal tahun 1967 telah terjadi kerusuhan di Irian Barat, dan kerusuhan itu disebabkan oleh ketidakpuasan penduduk Irian Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Irian Barat. Kerusuhan itu juga dipicu oleh kurangnya kebutuhan sehari-hari, yang dikarenakan toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari tutup dan kosong karena telah diborong oleh petugas Indonesia yang bertugas di Irian Barat. Bahkan kapal-kapal yang mengangkut barang-barang ke Irian Barat suka membelok di jalan, sehingga barang-barang tidak sampai di Irian Barat (Kompas, 2 Mei 1967). Sebagai reaksi langsung dari perlakuan yang tidak adil terhadap kepentingan Papua, yaitu masyarakat Papua mulai mengorganisasi artikulasi politik. Sepanjang tahun 1969, di beberapa kota di Papua masyarakat mengadakan demonstrasi menentang referendum dan untuk menyuarakan penolakan terhadap proses penyatuan Papua kedalam wilayah Indonesia yang dinilai sarat kecurangan. Demonstrasi digelar pada tanggal 14 Juli di Merauke, 16 Juli di Jayawijaya, 19 Juli di Paniai, 23 Juli di Fak-fak, 26 Juli di Sorong, 29 Juli di Manokwari, 31 Juli di Teluk Cenderawasih, dan 2 Agustus di Jayapura (Teodor Rathgeber, 2006: 48).

Pada tahun 1969, di bawah pengawasan PBB pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). PEPERA dilakukan dengan cara mengabaikan bangsa Papua dari

kebebasan berbicara, bergerak dan berkumpul. Hal ini disahkan berdasarkan Dekrit Presiden No. 8 / 1963 yang menyebutkan bahwa: Dalam daerah Irian Barat, untuk sementara waktu dilarang untuk melakukan kegiatan politik dalam bentuk unjuk rasa, rapat, demonstrasi atau penerbitan, publikasi, pengumuman, pengeluaran, penyebarluasan, perdagangan atau pertunjukan di depan publik artikel, gambar, photo tanpa ijin pemerintah atau lembaga yang telah ditunjuk (Tim Sekretariat Keuskupan Papua, 2006: 116). Masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan apapun yang berkaitan dengan status politik Papua. Pemerintah Indonesia bahkan mengabaikan hak masyarakat Papua untuk berpartisipasi baik dalam negosiasi ditingkat bilateral maupun internasional. Dan lebih jauh untuk memenangkan referendum (PEPERA), pemerintah Indonesia mulai menghapus semua institusi dan simbol yang berkaitan dengan identitas Papua. Pemerintah Indonesia bahkan melarang hak paling mendasar yakni kemerdekaan untuk berekspresi, berkumpul dan mengadakan pergerakan (Teodor Rathgeber, 2006: 45).

Berikut tentang pelaksanaan PEPERA di Irian Jaya pada tahun 1969:

Tanggal Tahun	Kabupaten	Anggota Dewan Musyawarah PEPERA	Jumlah Penduduk
1	2		
14-7-1969	Merauke	175	144.171
16-7-1969	Jayawijaya	175	165.000
19-7-1969	Paniai	175	156.000
23-7-1969	Fak-fak	75	43.187
26-7-1969	Sorong	110	75.474
29-7-1969	Manokwari	75	49.875
31-7-1969	Teluk Cenderawasih	130	91.870
2-8-1969	Jayapura	110	83.760
JUMLAH		1.025	809.337

(JRG. Djopari. 1993: 75).

Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat pada bulan Juli-Agustus 1969. Hasil PEPERA tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969 dengan perincian 84 (setuju), 0 (menentang), dan 30 (absten). Dengan demikian secara hukum internasional sejak saat itu Irian Barat yang kemudian menjadi Irian Jaya resmi menjadi wilayah Indonesia (Syamsudin Haris, 1999: 190).

Indonesia mematok batas timur negaranya di Merauke, karena ingin menjadikan Papua Barat sebagai lahan produksi kandungan bumi (kekayaan alam) dan sumber devisa negara. Selain itu tanah Papua Barat dibutuhkan untuk kepentingan penyebaran penduduk Indonesia yang semakin bertambah terutama di pulau Jawa, yaitu melalui program transmigrasi (Yakobus F. Dumupa, 2006: 127). Orientasi pembangunan di Irian Jaya ternyata lebih diarahkan kepada masyarakat di daerah transmigrasi, yang menurut hukum adat setempat merupakan hak ulayat golongan kekerabatan penduduk asli. Persoalan juga terjadi bidang agama. Prosentase pembinaan ternyata lebih besar diberikan kepada orang Islam. Pada hal jumlah orang Kristen lebih besar (Syamsudin Haris, 1999: 205). Keberadaan kaum pendatang di Papua Barat menyebabkan timbulnya rasa rendah diri dan tidak percaya diri bagi orang Papua Barat. Hal ini timbul karena muncul wacana yang dibangun kaum pendatang adalah kaum pintar, serba bisa dan manusia yang benar-benar manusia, sehingga secara otomatis rakyat Papua Barat dianggap manusia yang bodoh, kotor dan mendekati alam binatang dan harus dipintarkan, dibersihkan serta dimanusiakan (Yakobus F. Dumupa, 2006: 177).

Sejak Irian Jaya integrasi dengan Indonesia terjadi dominasi politik oleh etnis non-Irian baik dipusat maupun di Pemda Irian sendiri. Pembinaan aparatur dari pusat maupun daerah dipandang tidak menghasilkan putera daerah Irian, baik tingkat pusat maupun daerah. Bahkan pejabat di Pemda maupun kantor departemen teknis di daerah Tingkat I dan II ternyata diisi oleh orang-orang non-Irian. Dominasi non-Irian pada hakikatnya hanya menghasilkan kebijakan, penyelesaian masalah politik yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat

asli Irian (Syamsudin Haris, 1999: 212). Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Politik Orde Baru dan Soeharto adalah politik Jawa yang tertutup dan sentralistik. Jawanisasi kehidupan politik sangat jelas dalam perilaku politik Orde Baru. Hal ini tanpa disadari menyimpan boom waktu gejala anti Jawa/Jakarta muncul berupa aksi-aksi pemisahan diri dari pihak Irian Jaya. Segala sesuatu harus atas/dengan persetujuan dari Presiden (Totok Sarsito, 24 Januari 2007).

Perbedaan kesejahteraan atau taraf ekonomi antar warga di Papua, hal ini dalam kenyataannya warga dari luar Papua sering menduduki posisi yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Di pasar para pedagang asli Irian sering duduk dilantai, sedangkan kios-kios dimiliki oleh orang dari luar Papua. Perbedaan ini sangat mudah menimbulkan kecemburuan dan kebencian (Tim Sekretariat Keuskupan Papua, 2006:10-11). Pada umumnya muncul tuntutan “merdeka” dari rakyat dan penduduk Papua Barat, semata-mata merupakan persoalan politik dan yang paling menonjol adalah sikap untuk melepaskan tanah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Frans Maniagasi, 2001: 30). Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Rakyat Irian Jaya ingin merdeka dari Indonesia karena “Irian Jaya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi bangsa Indonesia mengambil dan menjual sumber daya alam Irian Jaya kepada negara lain. Hasil penjualan sumber daya alam itu tidak digunakan untuk membangun Irian Jaya, tetapi dimiliki Indonesia. Sehingga rakyat Irian Jaya beranggapan, apabila Irian Jaya merdeka sendiri dari Indonesia Irian Jaya bisa menjual sumber daya alamnya kepada negara lain dan Irian Jaya dapat membangun daerahnya (Sudarmono, 15 Januari 2007).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis yang relatif tua. OPM sejak lahir tahun 1960-an telah melakukan aksi gerilya guna menuntut pemisahan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Organisasi Papua Merdeka didirikan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya (Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, 2000: 146). Alasan Rakyat Irian Jaya ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah: 1) Rakyat Irian Jaya merasa diperlakukan tidak adil; 2) Rakyat Irian Jaya merasa ditinggalkan, kurang mendapat perhatian yang serius dan disepelekan; 3) Aspirasi rakyat Irian Jaya kurang diakomodir sebagai bagian dari suatu bangsa (Soedarjanto, 2000: 14). Meletusnya gerakan Organisasi Papua Merdeka ternyata sebagai akibat terbatasnya komunikasi antara masyarakat Irian Jaya dan rakyat Indonesia, khususnya dalam arti politik. Pada hal komunikasi justru sangat diperlukan atau diharapkan memberi efek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya (Syamsudin Haris, 1999: 198).

Kondisi penduduk Irian Jaya yang terbelakang serta infrastruktur yang minim, sungguh sangat ironis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya eskalasi kekecewaan rakyat Irian Jaya. Hal ini ditengarai juga dengan beberapa negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat berada dibelakang maraknya separatis ini (Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, 2000: 147). Sebenarnya apabila dibuat pemilahan, maka aspirasi masyarakat Papua terbelah dalam beberapa kubu yaitu: 1) yang menghendaki kemerdekaan atau lepas dari NKRI, gerakan inipun terpecah menjadi dua yakni, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelik Kwalik dan Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh Theys Hiyo Eluay; 2) warga yang menghendaki Papua bagian dari NKRI (Adrizal, 2006: 33). Bersemunya Papua, telah menunjukkan suatu kelemahan pada pemerintah Indonesia dan kurangnya penerimaan Papua terhadap pemerintah Indonesia. Penerapan otoritas Jakarta yang dilaksanakan dengan titik berat pada pemaksaan, dan kekerasan negara (Khusnul Mar'iyah, 2005: 73).

Menurut August Kafiari dalam Soedarjanto (2000: 18) penyebab munculnya aspirasi merdeka adalah: 1) Sikap defensif aparat pemerintah terhadap masyarakat Irian Jaya; 2) Dalam pergaulan, kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah maupun sesama komponen bangsa menjaga jarak terhadap masyarakat

Papua; 3) Masyarakat Papua Kurang diberdayakan; 4) Kurangnya sistem komunikasi kemanusiaan dan kultural yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan menggunakan sistem komando.

B. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka

Perjuangan Organisasi Papua Merdeka dalam mencapai tujuannya yaitu dengan melakukan pemberontakan atau perlawanan, kepada pemerintah Republik Indonesia, mencari dukungan kepada masyarakat Irian Jaya, dan mencari dukungan dunia internasional. Seperti yang diungkapkan seorang responden: “Organisasi Papua Merdeka dalam memperjuangkan tujuannya dengan membuat kekacauan di Irian Jaya atau pemberontakan kepada pemerintah Indonesia yaitu menyerang pos-pos TNI di Irian Jaya yang menimbulkan korban jiwa” (Wawancara dengan Tyanri, 15 januari 2007).

1. Pemberontakan atau Perlawanan

Di Irian Jaya tidak ada integrasi politik diantara sesama penduduk asli maupun antara masyarakat Indonesia lainnya. Tiadanya integrasi politik diantara sesama penduduk asli telah menimbulkan aneka macam organisasi pemberontakan yang diluar kelihatan sebagai suatu perlawanan bersama, karena adanya kesamaan tujuan. Tiadanya integrasi politik dengan rakyat Indonesia lainnya merupakan sebab utama meletusnya pemberontakan di Irian Jaya (Nazarudin Syamsudin, 1989: 108). Proses integrasi di Irian Jaya dengan Republik Indonesia menjadi pengalaman bagi komunitas itu, ketika simbol kebangsaan Papua Barat, lagu, bendera bahkan nama Papua dinyatakan terlarang. Larangan itu telah mengakibatkan meletusnya pemberontakan bersenjata pertama di Manokwari (26 Juli 1965) yang dimotori oleh Mandatjan dan Awom bersaudara dengan dukungan politikus senior John Ariks (Frans Maniagasi, 2001: 25). Bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua merupakan salah satu simbol Nasionalisme Papua yang menghendaki wilayah Papua Barat (Irian Jaya) menjadi negara-bangsa (nation-state) yang merdeka dan berdaulat

penuh. Nasionalisme Papua seperti ini pada awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda, terutama pada masa menjelang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, bahkan sejak tahun 1945 ([Http://dephan.go.id/modules.php?name:feedback&op=puintpage&opid=855](http://dephan.go.id/modules.php?name:feedback&op=puintpage&opid=855), 2 Januari 2007).

Situasi buruk di Irian Jaya membangkitkan kembali sikap “anti asing” (anti amberi) yang kemudian berubah menjadi pemberontakan. Gagasan untuk mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga muncul pada tahun 1963 dan 1964 yang kemudian secara resmi terbentuk pada awal tahun 1965 di daerah Ayamuru (Saafroedin Bahar, 1996: 224). Sejak Irian Jaya kembali kepangkuan RI, tetapi masih ada sisa-sisa separatis pada tahun 1965 mendirikan Organisasi Papua Merdeka. Gerakan yang dipimpin oleh Permanes Awom dan Johan Ariks menyerang Shell Oil Company dan pasukan RPKAD di Arfai. Sedangkan Marcus Kaisiepo di negeri Belanda mengklaim sebagai presiden Organisasi Papua Merdeka di pengasingan dan Nicolaas Jouwe membentuk panitia Kemerdekaan Papua Barat (Tempo, 24 Agustus 2003).

Pemberontakan meletus pada akhir Juli 1965, sebelum perlawanan dilancarkan secara diam-diam di beberapa tempat telah disebarakan pamflet yang tertanggal 19 April 1965. Pamflet itu berisi tuntutan pembentukan Negara Papua Merdeka (Nazarudin Syamsudin, 1989: 96). Pada tanggal 28 Juli 1965, salah satu peristiwa perlawanan yang paling besar di Oransbari Manokwari dibawah pimpinan Permanes ferry Awom. Pada dasarnya peristiwa itu terjadi diakibatkan oleh kesulitan ekonomi yang meningkat, seperti pengangguran dan kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok sehari-hari. Pemberontakan itu juga terjadi di Biak, Enarotali dan Waghete (Saafroedin Bahar, 1996: 224).

Menurut Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cenderawasih ([Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 28 November 2006) ada lima sebab yang menyebabkan Organisasi Papua Merdeka Melakukan pemberontakan, yaitu:

1. Aspek Politik: Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda menjanjikan kepada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) Papua yang terlepas dari Republik Indonesia. Beberapa

pemimpin putera daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Janji pemerintah Belanda tidak terealisasi sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia melalui perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian itu terdapat pasal tentang hak untuk nasib sendiri, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Indonesia yang disaksikan oleh PBB.

2. Aspek Ekonomi: Tahun 1964-1966 kondisi perekonomian Indonesia pada umumnya buruk, sehingga berdampak juga terhadap Irian Jaya. Pengiriman barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama berupa pangan dan sandang ke Irian Jaya mengalami kemacetan. Kondisi ini lebih diperburuk oleh ulah sebagian petugas RI yang suka memborong barang-barang di Irian Jaya untuk dikirim keluar Irian Jaya guna memperkaya diri sendiri. Kondisi ini menyebabkan rakyat Irian Jaya kekurangan pangan dan sandang, pada hal semasa penjajahan Belanda Irian Jaya tidak mengalami hal demikian.
3. Aspek Psikologis: Sulitnya jangkauan didaerah pedalaman Irian Jaya, maka sebagian besar penduduk Irian Jaya berpendidikan sangat rendah, juga penduduk diwilayah pantai berpendidikan ala kadarnya. Kondisi seperti ini menyebabkan penduduk Irian Jaya kurang dapat berfikir kritis. Keterbatasan pola fikir ini menyebabkan rakyat Irian Jaya mudah dipengaruhi. Dan lebih banyak bertindak dengan emosi sewaktu dihadapkan pada masalah tertentu. Terutama masalah janji yang tidak ditepati, maka segenap rakyat Irian Jaya dapat berubah sikap dengan segera.
4. Aspek Sosial: Semasa pemerintahan Belanda, para pejabat lokal di Irian Jaya umumnya diangkat dari kalangan kepala suku (dibandingkan dengan di Jawa, dimana Belanda mengangkat pegawai dari golongan priyayi). Kalau rakyat Irian Jaya memberontak, maka rakyat Irian Jaya akan mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya dalam suasana yang genting kepala suku itu harus berada ditengah-tengah suku yaitu.

5. Aspek Ideologis: Di kalangan rakyat Irian Jaya hidup suatu kepercayaan tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu adil yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur. Gerakan ini di Biak disebut gerakan Koreri (Heilstaat) atau Manseren Manggundi. Kepercayaan ini yang memberikan motivasi bagi pemberontakan yang dipimpin oleh M. Awom di Biak, dimana M. Awom dianggap sebagai pimpinan besar menyerupai Nabi Musa yang oleh para pengukutnya dianggap sakti.

Menurut Saafroedin Bahar (1996: 225-226) Sebab-sebab Organisasi Papua Merdeka melakukan aksi pemberontakan adalah:

1. Munculnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1975, ternyata Irian Jaya juga bisa dan mampu bertahan sebagai negara merdeka. Secara geografis dan topografis, di Irian Jaya terdapat sumber-sumber alam yang cukup banyak hanya saja sejarah kedua wilayah tersebut memang berbeda sehingga Irian Jaya tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan PNG bisa menjadi negara sendiri.
2. Letak Irian Jaya yang berada di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan PNG merupakan sumber inspiratif bagi beberapa kalangan di daerah itu untuk tetap mempertahankan Organisasi Papua Merdeka. Artinya, gerakan-gerakan Organisasi Papua Merdeka bisa digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar mempertahankan pembangunan ekonomi, sosial dan politik di daerah Irian Jaya.
3. Sikap anti-Indonesia di Irian Jaya adalah pembangunan di daerah itu terabaikan, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, para pejabat non-Irian memandang rendah orang Irian sebagai warga negara kelas dua, para transmigran lebih mendapatkan bantuan daripada penduduk asli, dan kesempatan kerja bagi para penduduk asli amat terbatas.
4. Masalah ekonomi, sosial, politik dan hankam yang ada di Irian Jaya tidak jauh berbeda dengan situasi pada masa peralihan, yaitu sikap segelintir

pejabat di wilayah Irian Jaya masih menganggap rendah orang Irian. Hal ini menyebabkan tidak jarang orang Irian merasa harga dirinya dihina, sehingga orang Irian Jaya ingin merdeka.

Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka terbagi menjadi dua yaitu pemberontakan fisik dan non fisik. Seperti yang diungkapkan seorang responden: bahwa “pemberontakan fisik adalah pemberontakan yang menggunakan senjata untuk melawan pemerintah RI yaitu menyerang pos-pos TNI, sedangkan pemberontakan non fisik adalah pemberontakan yang dilakukan dengan pernyataan-pernyataan, pengibaran bendera” (Wawancara dengan MT. Arifin, 13 Januari 2007).

a. Pemberontakan Fisik

Pemberontakan pertama kali pecah di Kebar yang merupakan pusat salah satu distrik dari Kabupaten Manokwari yaitu distrik Kebar. Pada tanggal 26 Juli 1965 sewaktu upacara bendera “Sumpah Prasetya” dilaksanakan dan diikuti oleh anggota PUTERPRA, pegawai Kehutanan dan Pertanian setempat, Organisasi Papua Merdeka melakukan serangan bersenjata terhadap para peserta upacara dan menewaskan 3 anggota PUTERPRA yaitu Serma Hamid, Kopral Ojen dan Praka Marinus. Pasukan Organisasi Papua Merdeka dipimpin oleh Johannis Djambuani (mantan anggota kepolisian Manokwari), dibantu oleh Lambertus Anari, Andreas Andjoi, Daniel M dan Rodulf Anrai adalah pegawai Kehutanan peserta upacara bendera. Setelah mengadakan serangan, maka gerombolan atau pasukan Organisasi Papua Merdeka melarikan ke hutan dengan merampas 4 pucuk SMG, 1 pucuk Garand dari PUTERPRA, 3 pucuk Mauser dari kepolisian dan 1 pucuk doubleloop serta 1 pucuk cis dari jawatan kehutanan (JRG. Djopari, 1993: 110)

Pemberontakan di Arfai terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, gerombolan atau pasukan Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan lebih kurang 400 orang dengan senjata api ringan campuran, panah, parang dan tombak dibawah pimpinan Permanes Ferry Awom menyerang asrama Jonif 641 Cenderawasih I di Arfai. Gerombolan itu sebagian besar terdiri dari suku-suku Biak, Serui, Ayamuru dan Numfor. Peristiwa itu menewaskan 3 orang prajurit dan melukai 4 orang lainnya. Di pihak gerombolan yang tewas sebanyak 30 orang. Dari pihak

Organisasi Papua Merdeka, militer merampas 1 pucuk senapan dan 1 pucuk pistol. Sedangkan pihak gerombolan Organisasi Papua Merdeka merampas 1 pucuk Bren dan 1 pucuk SMG. Setelah mundur dari Arfai, gerombolan Organisasi Papua Merdeka menyerang pos Jonif 641 Cenderawasih I di Warmare dan menewaskan Prada Pakkaurilukijo. Pos ini kemudian dikosongkan pada tanggal 1 Agustus 1965 untuk menghindari korban yang lebih banyak. Sejak saat itu, Organisasi Papua Merdeka berturut-turut menyerang pos-pos militer Kodam XVII Cenderawasih yang jauh dan terpencil serta melakukan penghadangan terhadap satuan-satuan militer atau ABRI yang melakukan operasi penumpasan terhadap Organisasi Papua Merdeka. Pada tahun 1967 Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan masuk hutan dan mendukung Permanes Ferry Awom atau mendukung Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan 14.000 orang suku Arfak. Kekuatan ini didukung oleh Kapten Tituler Barents Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Meidotga. Di Saukorem, Organisasi Papua Merdeka melakukan beberapa kali penghadangan yang menyebabkan beberapa anggota ABRI gugur. Di Ransiki gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin J. Rumbiak, E. Rumaropen dan David Werfandu menghadang pasukan ABRI dan terjadi kontak senjata yang menelan korban meninggal di pihak Organisasi Papua Merdeka sebanyak 13 orang (Tuhana Taufik A, 2001: 130-131).

Pemberontakan di Pos Makbon yang terjadi pada tanggal 21 Januari 1968, kurang lebih 150 orang gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Daniel Wanma, Zadrak dan T.M. Osok yang menyerang pos Makbon dengan kekuatan 8 Angkatan Darat yaitu 2 anggota PUTERPRA dan 6 anggota Kompi II Jonif 752 Cenderawasih. Aksi ini telah menimbulkan korban jiwa yaitu Praka Usman dan Serka Enar. Bantuan pasukan yang didatangkan ternyata terlambat sehingga Organisasi Papua Merdeka dapat masuk hutan (JRG. Djopari, 1993: 111).

Pemberontakan di Pos Saosapor terjadi pada tanggal 2 Februari 1968, gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Julianus Wanma dan David Prawar menyerang pos PUTERPRA dengan kekuatan 200 orang, serangan didahului dengan senjata api, kemudian disusul dengan panah, tombak, parang

dan kampak. Pada penyerangan itu 3 orang anggota Jonif 752 Cenderawasih putra daerah Irian Jaya ikut membelot dengan Organisasi Papua Merdeka dan menyerang pasukan ABRI yang bukan putra daerah Irian Jaya. Salah seorang di antaranya adalah Koptu Mauritz Rumaseb (Tuhana Taufik A, 2001: 131-132).

Pemberontakan di Pos Irai Anggi yang terjadi pada tanggal 4 Maret 1968, yaitu gerombolan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Joseph Indey menyerang pos Kompi III 341 Siliwangi. Pertempuran berlangsung secara sporadis di daerah Irai Anggi sampai tanggal 6 Maret 1968, dan gerombolan itu melarikan diri setelah terus dikejar dan didesak oleh pasukan ABRI yang menewaskan 5 orang gerombolan Organisasi Papua Merdeka dan ABRI juga merampas 38 pucuk senjata campuran (JRG. Djopari, 1993: 112).

Pada tanggal 8 April 1969, gerombolan Organisasi Papua Merdeka menyerang pos Erambo Merauke dan telah menimbulkan korban jiwa dipihak ABRI yaitu Sersan Sambas dan Kopda Sarikun serta anggota TBO (Tenaga Bantuan Organik) Thalib Sjamsudin. Organisasi Papua Merdeka berhasil merampas 1 pucuk senjata AK, 1 pucuk Thomson dan 1 pucuk pistol FN-43 dan sejumlah peluru dari pihak ABRI (Tuhana Taufik A, 2001: 133).

Pada tanggal 5 Juli 1969 di kampung Dubu wilayah Kecamatan Ubrub Kabupaten Jayapura telah terjadi serangan oleh rakyat yang dipimpin oleh Bernadus Wally selaku pemimpin gerombolan Organisasi Papua Merdeka. Peristiwa itu telah menewaskan Lettu A. Hasmi, Serda Masduki dan AIP I T. Meho, dan Organisasi Papua Merdeka berhasil merampas 1 pucuk senjata AK, 1 pucuk senjata Garand dan 2 pucuk pistol (JRG. Djopari, 1993: 112-113).

Pemberontakan di Enarotali, yaitu pemberontakan oleh rakyat dimulai dari bulan Februari 1969 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 1969 dengan turunnya A.R. Wamafma mantan KPS Tigi sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab. Tokoh-tokoh lainnya adalah: IPTU H. Mambrisauw (DANDIS Kepolisian Paniai). David Pekei (Wakil Ketua DPRD Paniai), dan 95 anggota Kepolisian antara lain: Senen Mote, Mapia Mote dan Thomas Douw. David Pekei adalah tokoh Organisasi Papua Merdeka yang ikut mengembangkan ideologi OPM kepada rakyatnya di Enarotali dan kepada anggota Kepolisian terutama anggota

kepolisian dari Paniai. Selain itu kegiatan didukung oleh L. Zonngonau dan para kepala suku di Enarotali, Waghete dan Moanemani. Beberapa kepala kampung yang membuat pernyataan antu pemerintah Republik Indonesia dan ABRI adalah: Otto Dogopia (kepala kampung Waghete I), Dumapi Mote (kepala kampung Waghete II), dan Karel Madai (pesuruh kantor KPS Tigi). Pada tanggal 30 Maret 1969 dalam percobaan pendaratan di lapangan Enarotali yang gagal, pesawat merpati jenis Twin Otter yang ditumpangi oleh Panglima Kodam XVII Cenderawasih Brigjen Sarwo Edhi Wibowo ditembak dari bawah oleh Organisasi Papua Merdeka yang melubangi perut pesawat dan mengenai kaki Akp Sakunto Komandan Resort (DANRES) Kepolisian Paniai. Pemberontakan ini bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Paniai dari Enarotali ke Nabire atas kebijaksanaan Bupati AKBP Drs. Soerodjo Tanojo, SH karena Nabire dinilai lebih strategis dengan fasilitas perhubungan yang memadai. Juga penggantian KPS Tigi dari A.R. Wamafma kepada Sunarjo, BA yang merupakan orang pendatang dari luar Irian Jaya, dan pelayanan pengiriman jatah makanan dan keperluan pegawai dan polisi dari Nabire selalu terlambat dan tidak memuaskan sehingga dinilai sebagai suatu kesengajaan dari Bupati. Peristiwa ini menelan korban dipihak ABRI sebanyak 14 orang gugur dan di pihak Organisasi papua Merdeka atau rakyat yang gugur sebanyak puluhan orang dan pihak ABRI kehilangan 17 pucuk senjata (Tuhana Taufik A, 2001: 133-134)

Peristiwa Pyramid Jayawijaya terjadi pada tanggal 21 Juli 1969 yaitu pembunuhan atas dua anggota KODIM 1702 Wamena yaitu Kopka D. Hutadjulu dan Koptu Suwarso. Pembunuhan itu dilakukan oleh rakyat dari kampung Alogonik. Peristiwa itu didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka yang diorganisir oleh B. Zonggonau mantan KPS Baliem (JRG. Djopari, 1993: 113-114).

Gerombolan Organisasi Papua Merdeka menyerang pos ABRI di Korem serta beberapa pos lainnya di Biak Utara. Pemberontakan yang dipimpin oleh Jan Pieter Karma ini terjadi pada tahun 1968. Pemberontakan oleh Organisasi Papua Merdeka pimpinan Jan Pieter Karma tersebut berhenti pada bulan April 1969. Maka selanjutnya Organisasi Papua Merdeka dipimpin oleh Melkianus Awom dan Nataniel Awom. Organisasi Papua Merdeka melakukan aksi-aksi pimpinan

Jan Pieter Karma tersebut berhenti pada bulan April 1969. Maka selanjutnya Organisasi Papua Merdeka dipimpin oleh Melkianus Awom dan Nataniel Awom. Organisasi Papua Merdeka melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap pos ABRI serta aksi pengibaran bendera Papua di Manokwari yaitu didepan kantor Kehutanan Reremi pada tanggal 1 November 1965. Di Biak bendera Organisasi Papua Merdeka pada umumnya dikibarkan di hutan dan diatas gunung yang digunakan sebagai markas pasukan Organisasi Papua Merdeka vbaik di Biak Barat maupun di Biak Utara (Tuhana Taufik A, 2001: 135).

Pada tahun 1975 kegiatan Organisasi Papua Merdeka di Merauke yang dipimpin oleh B. Mawen dengan tugas utama selain menanamkan ideologi OPM kepada rakyat Irian Jaya adalah mengajak atau menhasut rakyat sekitar perbatasan untuk menyerang pos-pos tentara Indonesia atau ABRI, kemudian menyeberang lintas batas ke Papua New Guinea sampai pertengahan tahun 1980-an. Di Jayawijaya, menjelang pemilihan umum pada tahun 1977 terjadi suatu gejolak sosial atau pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Alex Degey dan Matias Tabuni di kabupaten Jayawijaya. Peristiwa ini berawal dengan diserangnya pos pemerintah atau pos Gereja Kristen Injili (GKI) di Pagai pada tanggal 7 April 1977 oleh Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Matias Tabuni. Organisasi Papua Merdeka mengambil 2 karung beras persiapan pemilu, 1 senjata double lope milik GKI, 1 motor temple Johnson 25 PK, dan berbagai bahan pangan dan sandang lainnya. Pada tanggal 13 April 1977, Organisasi Papua Merdeka masuk kampung atau pos Pireme Kecamatan Makki yang dipimpin oleh Baas Wanimbo dan didukung oleh 200 pengikut dan memaksa rakyat Irian Jaya masuk hutan dan bersiap untuk menyerang ABRI di Makki. Pada akhir bulan April 1977 Organisasi Papua Merdeka Alex Degey/Deray menyerang pos militer Kabakma dan menewaskan Koprak Rochim dan melukai dua anggota ABRI. Dan pos Makki dikuasai oleh Organisasi Papua Merdeka serta pos pyramid diserang yang menimbulkan korba jiwa dipihak ABRI yaitu Letda Safrin. Pada saat yang sama pos Petriver dikuasai Organisasi Papua Merdeka dengan menutup lapangan terbang. Dan pada tanggal 28 April 1977 pos Kurubaga diserang, pesawat

terbang IAT (Indonesia Air Transfort) dirusak dan pos di Tiom diserang Organisasi Papua Merdeka (JRG. Djopari, 1993: 120-121).

Di Jayapura, pada 16 Mei 1978 Marten Tabu dan para pengikutnya melakukan pemberontakan dengan kegiatan menyerang pos-pos ABRI dan pusat-pusat Kecamatan serta aksi penyanderaan terhadap aparat pemerintah dan ABRI. Khususnya mengenai penyanderaan, maka pada tanggal 16 mei 1978 dalam suatu jebakan dikampung Aurina Kecamatan Kaureh Marten E. Tabu menyandera Komandan Korem 172 Kolonel Ismail, Asisten intel kodam XVII Cenderawasih Letnan Kolonel Fajar Admiral, Ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya, Pendeta Willem Malodi, Pastor Aloysius Umbos, dan pengusaha Frans Liu (Samsudin, 1995: 7). Aksi Marten Tabu berulang pada tanggal 25 September 1978-9 Mei 1979. Kali ini yang disandera adalah Camat Arso, Billy W. Jamlean (Gatra,27 Januari 1996).

Aksi gerombolan pengacau keamanan (GPK) di Irian Jaya semakin meningkat. GPK menyandera 25 orang di Mapemduma Kecamatan Tiom Kabupaten Jayawijaya tercatat yang paling menarik dunia internasional, karena adanya 7 WNA yang ikut tersandera. Penyanderaan itu menyebabkan sisa-sisa aktifis Organisasi Papua Merdeka memanfaatkan momentum itu untuk melancarkan propaganda (Tifa Irian, 22 Januari 1996). Penyanderaan itu dipimpin oleh Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kagoya yang terjadi pada tanggal 8 Januari 1996 GPK/Organisasi Papua Merdeka menculik Tim peneliti WWF yang sedang mengadakan Ekspedisi Lorens 1995. Sandera terdiri dari 10 peneliti dari Tim Ekspedisi Lorens, 3 periset WWF dan UNESCO, serta 12 penduduk dan 7 diantaranya warga negara asing. Dalam upaya penyelamatan sanderaan itu terjadi aksi baku tembak antara gerombolan Organisasi Papua Merdeka dengan TNI, yang menyebabkan dua sandera terbunuh ditangan Organisasi Papua Merdeka (Gatra, 25 Mei 1996).

b. Pemberontakan Non Fisik

Pada tanggal 28 Juli 1965 di Arfai Manokwari dan beberapa kota lainnya secara sponan didirikan beberapa organisasi illegal yang diberi nama IPARI, IRPARI, SAMPARI yang memberikan dukungan dan semangat pepada Organisasi Papua Merdeka. Kegiatan berbagai Organisasi itu antara lain

menyebarkan pamflet atau selebaran yang bernada anti Indonesia dan menyatakan perjuangan Organisasi Papua Merdeka untuk kemerdekaan Papua Barat (JRG. Djopari, 1993: 116).

Di wilayah Jayapura dekat perbatasan, Seth Rumkorem membuat suatu markas Komando Tentara Pembebasan Nasional (TPN) yang kemudian disebut dengan nama Tentara Nasional Papua (TNP) dan markas Komando TNP diberi nama markas Viktoria. Selain Rumkorem mantan anggota Tentara Nasional Indonesia dari Kodam Diponegoro, maka Jacob Pray mantan mahasiswa Universitas Cenderawasih yang membentuk markas Pemka (Pemulihan Keadilan) dan pasukannya diberi nama Pasukan Pembebasan Nasional (PEPENAL). Pada tanggal 1 Juli 1971 di markas Viktoria Seth Rumkorem memproklamasikan pemerintahan Papua Barat dengan naskah Proklamasi (Tuhana Taufik A, 2001: 137).

Menurut JRG. Djopari (1993: 116) Naskah proklamasi pemerintahan Papua Barat sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kepada rakyat Papua sekalian, dari Numbay sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai Baliem (Pegungan Bintang) dan dari Biak sampai Pulau Adi: Dengan berkat dan pertolongan Tuhan kami mendapatkan kesempatan hari ini, menyampaikan pada kamu sekalian berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua, bahwa Bangsa dan Tanah Papua hari ini 1 Juli 1971, menjadi satu bangsa dan Tanah Air yang merdeka dan berdaulat penuh. Kiranya Tuhan menyertai kita dan dengan ini dunia menjadi maklum, bahwa keinginan luhur Bangsa Papua untuk merdeka atas tanah Airnya Papua Barat telah menjadi nyata.

Viktoria, 1 Juli 1971

Atas nama Rakyat dan Pemerintah

Papua Barat, Presiden,

Seth Jafet Rumkorem.

Brigadir Jenderal

Menurut Tuhana Taufik A (1993: 137-138) Pada tanggal 5 Februari 1973 Seth Jafet Rumkorem melengkapi *The Provisional Government of Republic of West Papua* dengan susunan kabinetnya sebagai berikut:

Presiden	: Brigjen Seth Jafet Rumkorem
Wakil Presiden	: Herman Womsiwor
Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Justisi	: Amos F. Indey
Menteri Pertahanan, Pertambangan dan Industri	: F. J. T. Jufuway
Manteri Kesejahteraan Dan Kemajuan Masyarakat	: D. R. Maury
Menteri Penerangan dan Duta Keliling Berkuasa Penuh	: B. M. R. Tanggahma
Menteri Muda Pertahanan	: D. Kareway

Kabinet Seth Jafet Rumkorem kemudian pada tahun 1976, susunannya diubah dengan diberi nama kabinet Pemerintahan Revolusioner Papua Barat. Jumlah menteri 10 orang dan untuk keselamatan dan keamanan, maka 4 nama menteri tidak diumumkan. Susunan kabinet itu adalah:

Menteri dan Perdana Menteri	: Brigjen Seth Jafet Rumkorem
Menteri Pertahanan	: Robert Uria Joweni
Menteri Luar Negeri	: Bernart M. R. Tanggahma
Menteri Kehakiman	: Amos F. Indey
Menteri Kesehatan	: Dorius R. Maury
Menteri Keuangan	: Tan Seng They

Dibentuk pula badan Senat Revolusioner yang beranggotakan 35 orang dengan Ketua Senat Jacob Pray, Wakil I Luis Nussi, Wakil II Anton Numbum (JRG. Djopari, 1993: 116-117).

Menurut Tuhana Taufik A (2001: 141-142) Tujuan pembuatan kabinet Pemerintahan Revolusioner Papua Barat adalah:

- 1) Membuat rakyat Irian Jaya sadar dan dengan berbagai organisasi massa yang ada berjuang dalam kerangka OPM

- 2) Memperkuat kerjasama antar revolusi rakyat Papua Barat atau Irian Jaya dengan bangsa-bangsa di Asia, Pasifik, dan Afrika.
- 3) Mengembangkan kesadaran akan paham Pan-Melanesia atas dasar nasionalisme dan kekuatan demokrasi bagi Rakyat Papua Barat.
- 4) Memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan bangsa Papua dari segala bentuk kolonialisme, paternalisme dan berbagai bentuk penindasan lainnya serta berusaha untuk mewujudkan Federasi Melanesia yang ambil bagian dalam forum Pasifik.
- 5) Kerjasama dengan seluruh dunia atas dasar pemilikan eksistensi yang sama serta ambil bagian dalam Front Aksi Rakyat Pasifik (PPAF) dengan solidaritas ras yang sama serta demokrasi dunia.
- 6) Memberikan dukungan kepada seluruh bangsa yang berjuang untuk menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, dan apartheid.

Menurut JRG. Djopari (1993: 118) Pada tanggal 15 Juli 1977, Aksi Nasional dari Pemerintah Revolusioner Sementara Negara Papua Barat membuat tiga program. Tiga program itu adalah:

- a. Program untuk jangka pendek: Menyadarkan penduduk dan mengorganisir massa dari penduduk Irian Jaya dalam kerangka kerja dari OPM. Memobilisir penduduk terus sehingga pada akhirnya mereka dapat memberikan perlawanan dalam bentuk manipulasi melalui pembangunan social. Memperkuat hubungan baik antara Revolusi dari penduduk Irian Jaya dengan persekutuan internasional tingkat tinggi, teristimewa masyarakat Pasifik, Asia, dan Afrika. Memperkuat garis depan sehingga menimbulkan perlawanan untuk menentang berbagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan. Menciptakan keseimbangan dan persatuan pada tingkat nasional, memajukan kesadaran bagi kekuatan nasionalisasi dan demokrasi, terutama pada pulau-pulau yang tidak dibatasi/berbatas, dengan keseimbangan sampai pada pembelaan dari Revolusi rakyat Papua/Irian Barat Raya. Juga memperoleh jaminan untuk hidup terus atau mengembangkan pemikiran ini.

- b. Program jangka panjang: Pembebasan Nasional bagi seluruh rakyat Papua Barat dari semua bentuk kolonialisme, paternalisme dalam hal mewujudkan suatu kebebasan sepenuhnya. Rakyat Papua Barat diarahkan untuk mengambil bagian sebagai bangsa Papua Barat dalam sistem pemerintahan Republik. Merealisasi suatu kesatuan nasional yang otentik lewat Papua-Raya atas dasar pemikiran ras yang sama, menjadi suatu republik Serikat Papua New Guinea. Usaha yang sebaik-baiknya menuju suatu ikatan kerjasama yang lebih luas, dalam rangka Federasi Melanesia untuk mengambil bagian dalam Forum Pasifik.
- c. Program tingkat persahabatan luar negeri: Bekerjasama dengan seluruh dunia atas dasar hidup berdampingan dengan damai. Ikut ambil bagian dalam Front Aksi Rakyat Pasifik dan pergerakan untuk pemikiran ras yang sama dan demokrasi dunia. Pengamatan dan tinjauan atas bantuan dari sosialisme Senegal pada tingkat perkembangan peralihan sebagai suatu sarana pendobrak dari komplotan terhadap keinginan Papua Barat menuju ekspresi sendiri untuk digagalkan. Memberi bantuan dan dukungan kepada semua masyarakat yang berperang menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, dan politik rasialis/apartheid.

Pada tahun 1972 di Merauke dibentuk suatu gerakan yang bernama Gerakan Nasional Papua (GENAPA), Natural Papua Nasional (NAPAN) dan Santa Pewrawan Maria (SPM). Berbagai gerakan atau organisasi ini dipimpin oleh Petrus Kmur, Karel Runawir dan E. P. Ius. Sedangkan aktifitas organisasi itu yang paling utama adalah menanamkan ideologi Organisasi Papua Merdeka kepada rakyat Irian Jaya, menyebarkan pamflet dengan isi yang anti-Indonesia serta memberikan semangat bagi perjuangan Organisasi Papua Merdeka, mengajak rakyat untuk melakukan sabotase, pengacauan dan menyebarkan rasa permusuhan dengan Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001: 142).

Pada tahun 1975 di Nabire dan Serui, Organisasi Papua Merdeka mengadakan aksi yaitu membuat pernyataan Rakyat Yapen Waropen untuk membentuk dan mempertahankan bangsa dan negara Papua, pernyataan itu

adalah: (1) Kami bangsa Samaray sampai Sorong mengenal hak-hak kami, hak mutlak, bahkan hak moyang kami atas hak tanah dan bangsa Papua, sebab itu Samaray sampai Sorong akan merdeka 100% di luar Republik Indonesia; (2) Kami bangsa Samaray sampai Sorong, mendesak Indonesia harus keluar dari tanah Papua batas 1 Januari 1975 sampai 28 Februari 1975; (3) Kami bangsa Papua Samaray sampai Sorong berseru PBB harus mengirimkan pasukan keamanannya mulai Januari 1975, menerima kekuasaan dan penjagaan di tanah Papua. Pernyataan ini ditandatangani pula oleh enam orang: S. Satya (ketua umum), Y. Ch. Mirino (wakil ketua I), P. Muabuai (wakil ketua II), A.M. Tewa (sekretaris I), P.J. Pedei (sekretaris II), dan W. Rum (bendahara). Di Jayawijaya pada tahun 1978 Organisasi Papua Merdeka memberikan semangat kepada rakyat Jayawijaya: bahwa apabila Papua Merdeka melalui Organisasi Papua Merdeka, maka akan dibangun sebuah terowongan besar dari Mulia, Tiom, Karubaga, Makki, Kelila, Bakondini, Wamena, Pyramid sampai menembus Jayapura dan dari Jayapura akan didatangkan barang-barang keperluan rakyat. Dan rakyat akan mendapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan Papua merupakan saat yang membahagiakan, dimana rakyat Papua hidup secara makmur lepas dari pemerintah Indonesia. Organisasi Papua Merdeka dengan senjata peninggalan Perang Dunia II, senjata berburu dan senjata rampasan dari ABRI serta dengan amunisi yang terbatas hanya melakukan penyerangan tiba-tiba terhadap pos-pos terpencil dan terus menyebarkan ideologi. Cara ini dianggap Organisasi Papua Merdeka sangat efektif, efektifnya ideologi Organisasi Papua Merdeka itu dapat dilihat masih ada rakyat Irian Jaya yang terus mendukung Organisasi Papua Merdeka baik sebagai partisipasi maupun simpatisan (JRG. Djopari, 1993: 121-122)

Pada tanggal 14 Agustus 1980, enam orang wanita mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka didepan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pada tanggal 3 Juli 1982 juga terjadi pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka di depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pelakunya sembilan mahasiswa Universitas Negeri Cenderawasih, Jayapura (Gatra, 27 Januari 1996). Pada bulan Maret 1981, sebuah petisi ditandatangani oleh 50 orang dan diserahkan kepada Gubernur Irian Jaya. Petisi berisi 3 butir

pernyataan: (a) Protes terhadap penyelenggaraan *Act of Free Choice* tahun 1969, dimana seharusnya dilakukan pemungutan suara bagi seluruh penduduk/rakyat (satu orang satu suara) sebagaimana yang dilakukan pada pemilihan umum tahun 1971 dan 1977 di Irian Jaya; (b) Suatu pernyataan dukungan terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat; (c) Suatu seruan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan dari rakyat Papua Barat (JRG. Djopari, 1993: 122-123). Pada tanggal 22 November 1995 Organisasi Papua Merdeka menculik dua pelajar SMA warga transmigran di wilayah Arso sebelah Tenggara Jayapura. Kedua pelajar itu disekap disebuah kamp Organisasi Papua Merdeka. Kamp itu dibangun oleh pemerintah Papua Nugini untuk menampung anggota Organisasi Papua Merdeka yang melarikan diri melintas perbatasan ke Papua Nugini, dengan dalih kemanusiaan (Gatra, 20 Januari 1996).

2. Mencari Dukungan Kepada Rakyat Irian Jaya

Keinginan pemerintah untuk mempercepat Indonesisasi di Irian Jaya, yaitu integrasi masyarakat Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyebabkan penggunaan pendekatan keamanan lebih menonjol daripada pendekatan persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Dampak negatifnya, tidak sedikit orang Irian Jaya yang dahulu mendukung Indonesia dan mau bekerja sama dengan Indonesia berbalik sikap menjadi anti-Indonesia. Dan masyarakat Irian Jaya mempunyai pandangan “jika Irian Barat merdeka, masyarakat Irian Jaya bisa mengatur negara sendiri dan menikmati kemakmuran”. (Saafroedin Bahar, 1996: 223).

Menurut JRG. Djopari (1993: 127-128) Tokoh-tokoh Papua yang pro-Indonesia kemudian berbalik mendukung dan bersimpati dengan Organisasi Papua Merdeka disebabkan oleh:

1. Belanda merubah sistem dengan cara penjajahan di Irian Jaya sedemikian rupa, sehingga rakyat Irian Jaya tidak merasa dijajah. Tetapi Rakyat Irian Jaya merasa dibangun dan dipersiapkan sebagai suatu bangsa yang memiliki tanah air, karunia Tuhan dan pada suatu saat mencapai kemerdekaan.

2. Perkembangan kebudayaan yang berbeda jauh antara masyarakat Irian Jaya dengan penduduk dan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya.
3. Tidak ada andil masyarakat Irian Jaya dalam perjuangan Indonesia merdeka.
4. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan faham “unitarisme”, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan maka rakyat Irian Jaya tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa Sumpah Pemuda.
5. Adanya solidaritas yang kuat, yaitu solidaritas ras Melanesia.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang salah, telah membuat sebagian masyarakat Irian Jaya diam-diam maupun terang-terangan akhirnya justru mendukung Organisasi Papua Merdeka dan memandang pemerintah Indonesia sebagai penjajah baru. Seperti terefleksi dari tindakan kesewenang-wenangan oknum aparat pemerintah, sipil atau ABRI. Tindakan kesewenang-wenangan itu seperti pengambilan paksa barang-barang yang ditinggalkan Belanda atau memanfaatkan isu tuduhan terlibat Organisasi Papua Merdeka, untuk membenarkan tindakan yang tidak terpuji dari rakyat (Syamsudin Haris, 1999: 202).

Sejak tahun 1965, terutama tahun 1966 Organisasi Papua Merdeka mendapat dukungan dari pihak kepolisian dan Angkatan Darat serta pegawai negeri illegal, yaitu putra-putra daerah Irian Jaya. Dukungan yang dimaksud adalah berupa peminjaman senjata dan pemberian peluru kepada gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang terjadi di Taminabuan dan Ayamuru. Partisipasi rakyat Irian Jaya terhadap Organisasi Papua Merdeka tidak hanya diberikan oleh kebanyakan desa-desa dan wilayah terpencil saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, sipil dan kaum terpelajar yaitu: cendikiawan, mahasiswa dan pelajar termasuk kelompok kecil ABRI dan Polisi (JRG. Djopari, 1993: 129).

Usaha Organisasi Papua Merdeka untuk mencari dukungan rakyat Irian Jaya yaitu dengan mempengaruhi rakyat Irian Jaya. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Organisasi Papua Merdeka dalam mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya yaitu dengan cara mempengaruhi rakyat Irian Jaya terutama di daerah terpencil/pedalaman. Karena rakyat Irian Jaya dipedalaman mudah

diprovokasi. Organisasi Papua Merdeka juga mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya yang anti-Indonesia, tetapi tidak semua rakyat Irian Jaya mendukung Organisasi Papua Merdeka. Sikap rakyat Irian Jaya adalah aktif terhadap Organisasi Papua Merdeka, yaitu mendukung Organisasi Papua Merdeka baik ikut/berpartisipasi dalam pemberontakan maupun rapat-rapat. Tetapi apabila pemerintah Republik Indonesia mengerahkan TNI untuk mengadakan operasi intelijen sikap rakyat Irian Jaya adalah pasif atau pura-pura tidak tahu menahu tentang Organisasi Papua Merdeka (Totok Sarsito, 24 Januari 2007).

Menurut Tuhana Taufik A (2001: 142-143) Bentuk dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya kepada Organisasi Papua Merdeka adalah:

1. Terlibat atau berpartisipasi dalam aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka seperti perlawanan fisik, penyebaran selebaran/pamflet, penyebaran informasi, pencarian informasi dan menghadiri rapat.
2. Memberikan dukungan sandang, pangan, obat-obatan dan dana. Khususnya mengenai dana, maka tiap bulan untuk para pegawai pemerintah disodorkan sebuah daftar atau list untuk mengumpulkan dana/sumbangan sukarela. Juga pemberian bahan-bahan keperluan lainnya seperti baterai radio dan senter, rokok, serta alat tulis-menulis.
3. Memberikan dukungan semangat, dorongan melalui cerita-cerita herois Organisasi Papua Merdeka serta sosialisasi nilai-nilai Organisasi Papua Merdeka yang dikaitkan dengan keharusan membalas dendam atas korban-korban keluarga dan orang-orang Irian Jaya yang telah mati ditangan Indonesia, dan memberikan ilustrasi serta pandangan-pandangan atas dasar realita yang ada sekarang ini dan tidak menguntungkan rakyat Irian Jaya. Misalnya: keadaan ekonomi yang buruk, korupsi, kesempatan kerja,

sekolah atau kuliah, kesempatan memperoleh jabatan, pemilikan hak-hak atas tanah, dan kesempatan berusaha.

4. Memberikan pemikiran yaitu selalu menyumbangkan informasi yang berupa pemikiran dan analisa atau telaahan terhadap situasi daerah maupun situasi nasional kepada tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka baik yang berada di Irian Jaya maupun di luar negeri melalui berbagai kesempatan dan jalur yang ada secara timbal balik.

Banyak penduduk Irian Jaya yang mendukung atau simpati kepada Organisasi Papua Merdeka dan merasa tidak aman di Irian Jaya dan memutuskan untuk pindah atau mengungsi ke PNG. Puncak dari kegiatan pengungsian ini pertama terjadi selama tahun 1984, yang dimulai pada bulan Februari 1984 sebanyak 3000 penduduk Irian Jaya tiba di Vanimo ibukota propinsi West Sepik PNG yang berjarak 35 km dari perbatasan, 70 km dari Jayapura ibukota propinsi Irian Jaya Indonesia (JRG. Djopari, 1993: 125).

3. Mencari Dukungan Kepada Dunia Internasional

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka di Papua masih terus melakukan aktifitasnya, antara lain dengan pola propaganda, hasutan terror, merampok dan menekan masyarakat. Tindakan Organisasi Papua Merdeka dan simpatisannya meningkatkan aktifitasnya dengan membangun jaringan di luar negeri untuk mencari dukungan masyarakat internasional ([Http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm](http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm), 13 Februari 2007). Secara umum Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi terbagi atas dua jenis kegiatan yang masing-masing mengkoordinasi kegiatan politik dan kegiatan militer. Kegiatan militer bergerak didalam negeri dan kegiatan politik bergerak diluar negeri (Nazarudin Syamsudin, 1989: 99).

Medan gerilya diplomasi Organisasi Papua Merdeka diluar negeri meliputi:

- 1) negara-negara yang serumpun, seperti Papua Nugini dan Vanuatu;
- 2) negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda, Swedia yang terdapat kelompok yang mendukung Organisasi Papua Merdeka karena tidak setuju terhadap rezim Soeharto dan solidaritas dengan kelompok minoritas yang tertindas, serta melihat perjuangan Organisasi Papua Merdeka sejalan dengan faham neo-marxis;
- 3)

negara Afrika: Sinegal yang mendukung Organisasi Papua Merdeka berdasarkan paham negritude yang memperjuangkan solidaritas seluruh ras hitam. Dari ibukota Sinegal Dakar juga dibangun hubungan diplomatik Organisasi Papua Merdeka dengan 15 negara Afrika Barat dan Tengah yang menolak hasil PEPERA dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 (George Junus Aditjondro, 2000: 12).

Kegiatan politik diluar negeri yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka dapat bergerak dengan lebih leluasa dibandingkan dengan kegiatan politik Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan di Irian Jaya (Papua) ([Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 13 Februari 2007). Perjuangan untuk Papua Merdeka diluar negeri di mulai di Belanda oleh Marcus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe dan kawan-kawannya serta Herman Womsiwor. Perjuangan ini makin gigih pada saat terjadi pemberontakan senjata oleh Organisasi Papua Merdeka yang dimulai tahun 1965 (JRG. Djopari, 1993: 135). Perjuangan politik Organisasi Papua Merdeka diluar negeri didasarkan pada tiga alasan. Tiga alasan itu adalah: 1) Rakyat Papua ditolak dalam keseluruhannya masuk kedalam imperialisme Indonesia yang berpolitik ekspansionis yang didasarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945; 2) Secara geografis maupun etnologis, rakyat Papua tidak termasuk Indonesia; 3) Rakyat Papua menolak paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas tanah airnya sendiri. Bertolak dari ketiga alasan itu maka ada dua faktor yang mendorong Organisasi Papua Merdeka melakukan perjuangan diluar negeri. Dua faktor itu adalah: 1) Dunia tidak mengetahui duduk permasalahan dari bangsa atau rakyat Papua; 2) Adanya informasi sepihak dari Belanda pada masa lampau dan dari Indonesia. Indonesia memberikan interpretasi atau penafsiran sendiri secara menyeluruh terhadap masa depan (bangsa Papua) mengenai perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dan tertutup negeri Indonesia dan negeri Belanda, dimana negeri Belanda dengan tangan sendiri menyerahkan kedaulatan dari rakyat Papua diluar pengetahuan rakyat Papua ([Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 28 November 2006).

Pada mulanya kegiatan politik Organisasi Papua Merdeka dinegeri Belanda dan dari sinilah gerakan Organisasi Papua Merdeka dipusatkan.

Dukungan yang diberikan oleh sekelompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia terhadap gerakan-gerakan “pembebasan” diseluruh dunia. Hal ini mendorong Organisasi Papua Merdeka membuka sebuah perwakilan di Stockholm tahun 1972 dan Organisasi Papua Merdeka mendapat dukungan secara terbuka dalam forum internasional. Adanya dorongan beberapa negara Afrika hitam, Organisasi Papua Merdeka membuka perwakilan di Dakkar Sinegal pada tahun 1975 dan 1984 sampai sekarang. Pusat gerakan Organisasi Papua Merdeka di negeri Belanda sangat berorientasi kebarat, karena dikuasai oleh pemimpin-pemimpin tua seperti: Marcus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Kedua tokoh ini merupakan mantan anggota Dewan Nieuw Guinea. Berlainan dengan Organisasi Papua Merdeka dinegeri, maka perwakilan di Stockholm dan Dakkar dikuasai oleh pemimpin pemuda kiri yang beraliran neo-marxis, Ben Tanggahma yang menguasai perwakilan ini dan mendapat bantuan orang-orang kiri Swedia dan Sinegal. Perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Dakkar didukung sepenuhnya oleh Presiden Sengor, antara lain dengan menyalurkan dana-dana swasta. Dukungan Presiden Sengor didasarkan atas prinsip pribadinya sebagai tokoh yang memajukan kebudayaan “negrito” yang tidak saja terdapat di Afrika. Ben Tanggahma juga dibantu oleh beberapa anggota kelompok “Brazzaville 13” yang memang tidak mendukung Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Jaya di PBB sejak awal tahun 1960-an (Nazarudin Syamsudin, 1989: 100-101).

Pada tanggal 1 Juni 1975 tepatnya di kantor penerangan Organisasi Papua Merdeka di Dakkar dengan nama *Information and Coordinatioan Office of the Privisional Governmen of the of West Papua / Nieuw Guinea* yang digunakan Ben Tanggahma. Di Afrika Organisasi Papua Merdeka juga mengadakan kampanye dengan tema “bangsa Papua adalah etnis yang termasuk bangsa Negroid” dan tujuan dari kampanye adalah mencari dukungan bagi pengakuan di PBB sehingga “*National Liberation Movement*” yang disejajarkan dengan gerakan kemerdekaan Namibia dan Swapo. Di dalam majalah Sinegal yang bernama “Le Soleil” Ben Tanggahma menyatakan antara lain: 1) Papua ingin menarik pengalaman dari Afrika mengenai dekolonisasi; 2) Perjuangan O.P.M untuk merdeka sama dengan keadaan perjuangan negara-negara bekas jajahan Portugis di Angola, Guinea

Bissau dan Mozambik; 3) mengharap sokongan moril dan materiil dan negara-negara Afrika bagi perjuangan O.P.M mengingat Papua secara etnis lebih dekat dengan bangsa Afrika; 4) Apabila Papua Barat (West Papua) tidak merdeka dalam 25 tahun mendatang, orang-orang Papua akan hidup direserfat seperti orang-orang Indian di Amerika Serikat dan orang-orang Aborigine di Australia; 5) Orang-orang Indonesia menjual kekayaan Irian Jaya kepada modal asing melalui konsesi-konsesi (JRG. Djopari, 1993: 136-137).

Kapanye anti Indonesia juga dilakukan di benua Afrika dengan dukungan Presiden Sengor dari Sinegal seperti yang terdapat dalam sebuah buletin Organisasi Papua Merdeka yang diberi judul “*A Negro Race Being Murdered*” yang memperkenalkan kepada bangsa Afrika adanya bangsa Negro di Papua 3 juta orang, dimana 1 juta yang mendiami Papua Barat sedang bergulat memperjuangkan pembebasan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Juga sebuah judul lain dari buletin Organisasi Papua Merdeka yaitu *A Cry of Distress from Negroes to Negroes* yang diberi pengantar oleh Nicolaas Jouwe antara lain:

Saudara-saudari di Afrika. Apakah anda tahu, saudara-saudari dari Afrika
Bahwa pulau Nieuw Guinea adalah yang terbesar didunia setelah Greenland
Dan situasi di Pasifik dimana didiami oleh 3 juta orang Negro?
Dapatkah saudara-saudari pernah memikirkan tentang orang-orang
Negro itu secara khusus terhadap 1 juta Negro yang mendiami sebelah barat
Yang merupakan setengah dari pulau besar itu dimana mereka sedang
Melawan dengan perkelahian secara teguh untuk kebebasan terhadap
Tekanan atau penindasan dari Indonesia?

([Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 28 November 2006)

Menurut JRG. Djopari (1993: 138) Nicolaas Jouwe juga membentuk sebuah badan yang bernama *Board of Freedom Committee of West Papua/Nieuw Guinea in Exile* dengan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Nicolaas Jouwe
Wakil Ketua	: Filemon T. J. Jufuway
Sekretaris	: Cornelis J. Joku

Anggota : Vitalia Katua

Anggota : Ben Tanggahma

Menurut JRG. Djopari (1993: 138-139) Di Papua New Guinea, secara geografis pemimpin Organisasi Papua Merdeka menjadikan Papua New Guinea sebagai basis pertemuan antara pemimpin gerakan politik dan militer (Nazarudin Syamsudin, 1989: 102). Di Papua New Guinea, tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka mencari dukungan dengan menempuh jalan diplomasi bertema “satu etnis bangsa Papua dan satu rumpun Melanesia” atau lebih dikenal dengan gerakan “Pan Melanesia atau Melanesia Brotherhood”. Tema ini mendapat sambutan dari tokoh Papua New Guinea dan membiarkan Organisasi Papua Merdeka mengembangkan aktivitasnya di wilayah Papua New Guinea. Tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka yang melakukan perang gerilya di Irian Jaya maupun melakukan aktivitas politik di Papua New Guinea yaitu: Mozes Weror, Fred Warikar, Elieser Hamadi, James Anyari. Dengan adanya dukungan dari Papua New Guinea kepada Organisasi Papua Merdeka, maka pada tahun 1972 di Port Moresby dibentuk “Pemerintah Sementara Sorong Samaray” dengan susunan kabinet sebagai berikut:

Perdana Menteri	: Marcus Kaisiepo (Nederland)
Menteri Dalam Negeri	: E. J. Bonay (Jayapura)
Menteri Luar Negeri	: Nicolas Jouwe (Nederland)
Menteri Kesehatan	: Fred Jirwa (Fiji)
Menteri Pendidikan	: T. H. Meset (Jayapura)
Menteri Perdagangan	: Mozes Weror (PNG)
Menteri Pertanian	: Kaleb Taran (Jayapura)
Menteri Keuangan	: Amos F. Indey (PNG)
Menteri Negara	: Titus Dan Sidan (Jayapura)
Sekretaris Negara	: B. Niccu (Nederland)
Ketua DPR	: Dirk S. Ajamiseba (Jayapura)
Ketua MPA	: Herman Wajoi (Jayapura)
Gubernur Nurban Papua	: Ferry Josep Way (Jayapura)
Duta untuk Australia	: Clement Runawary (Jayapura)

Duta untuk Nederland	: Kerky Jomungge (Jayapura)
Duta untuk Jerman Barat	: Silas Tokore (Jayapura)
Duta untuk Israel	: Nataniel Maidepa (Jayapura)
Duta untuk Inggris	: Dorinus R. Maury (PNG)

Papua New Guinea mendukung Organisasi Papua Merdeka didasari oleh solidaritas etnis Papua yang masih ada dan tidak hilang dari pikiran dan perasaan orang-orang Papua New Guinea. Solidaritas Papua di Papua New Guinea lebih dikenal dengan istilah “*One Talk*”, yang dapat ditafsirkan lebih luas yaitu “Persamaan dan Persaudaraan” termasuk agama Kristen ([Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 28 November 2006).

Pada tahun 1982 Dewan Revolusioner Organisasi Papua Merdeka didirikan, dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN ([Http://www.id.wikipediaorg/wiki/organisasi papua_merdeka](http://www.id.wikipediaorg/wiki/organisasi_papua_merdeka), 13 februari 2007)

Organisasi Papua Merdeka juga mencari dukungan ke Fiji dan Vanuatu, yaitu negara yang berada di wilayah Pasifik Selatan. Dan Vanuatu adalah yang memberi sambutan positif, terutama wakil Perdana Menteri Barak Sope yang beraliran kiri. Organisasi Papua Merdeka di Vanuatu juga merencanakan memberi latihan gerilya dan militer kepada pemuda-pemuda Papua Barat yang akan dipindahkan ke Vanuatu. Organisasi Papua Merdeka dan Barak Sope juga merencanakan membeli senjata untuk Organisasi Papua Merdeka dari RRC dibawah panji Vanuatu, kemudian dikirim kewilayah perbatasan kepada militer Organisasi Papua Merdeka dibawah koordinasi Daniel Kafiar yang telah mengikuti latihan gerilya di Libya (JRG. Djopari, 1993: 143-144). Organisasi Papua Merdeka juga menjadikan negara Vanuatu sebagai negara kecil di Samudera Pasifik sebagai basis politiknya (Nazarudin Syamsudin, 1989: 102).

Di Amerika Serikat, Marcus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe juga membina hubungan dengan pemimpin Negro dan membentuk suatu badan yang bernama “*The American Friends of West Nieuw Guinea*” dengan tokohnya W.R. Blake dan

J.A.Tinlli, sedangkan di Inggris, Organisasi Papua merdeka melakukan hubungan dengan suatu Organisasi yang bernama “*The Anglo Melanesian Aid Commite*” dengan tokoh pimpinannya P. Greenfield dan A. Preston (JRG. Djopari, 1993: 102). Negara-negara yang mendukung Organisasi Papua Merdeka itu hanya bersifat pasif saja, dan tidak bersifat aktif. Karena apabila negara-negara yang mendukung Organisasi Papua Merdeka itu bersifat aktif, maka akan melanggar hubungan internasional. Dan Organisasi Papua Merdeka dinegara-negara itu hanya didukung oleh segelintir orang saja (Wawancara dengan: Totok Sarsito, 24 Januari 2007).

Keterlibatan pihak-pihak tertentu di Australia yang secara pribadi membantu Organisasi Papua Merdeka seperti kasus Gary Scott. Gary Scott 38 tahun, adalah mantan Letnan pada angkatan darat Australia yang mencoba mensuplai senjata untuk Organisasi Papua Merdeka. Polisi Australia menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Scott telah berhubungan dengan suatu kelompok Melanesia di Irian Jaya. Atas permintaan kelompok itu, Scott telah menyiapkan daftar harga berbagai jenis senjata, untuk dikirim kepada Organisasi Papua Merdeka (Tempo, 17 November 1984: 13).

Secara keseluruhan kegiatan Organisasi Papua Merdeka diluar negeri atau di dunia internasional adalah untuk mencari dukungan politik, maupun untuk mencari dana dan dukungan persenjataan serta amunisi bagi perjuangan Organisasi Papua Merdeka. Namun kenyataan bahwa dengan dukungan yang diharapkan itu tidak lebih dari bantuan kemanusiaan saja atau bantuan terbatas, karena orientasi dunia sudah mengarah pada penyusunan tata dunia baru yang aman dan damai. Apalagi negara-negara barat sangat berkepentingan dengan Indonesia. Karena Indonesia, negara yang berpenduduk besar di Asia Tenggara, maka dengan sendirinya merupakan daerah pasaran hasil produk dari negara-negara Barat dan juga Indonesia dapat mensuplai/menyalurkan bahan-bahan mentah kebutuhan negara-negara Barat (JRG Djopari, 1993: 145-146).

C. Usaha Pemerintah Republik Indonesia Dalam Memadamkan Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

Sejak dikembalikannya Irian Jaya kepada NKRI oleh Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Mei 1963. Ternyata sampai kini daerah Irian Jaya tetap menyimpan segudang masalah yang rumit termasuk khususnya dalam soal keamanan dalam kaitannya dengan Integrasi Nasional. Problem ini secara riil dari pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang meletus sejak 26 Juli 1965. Gerakan yang dimulai dari Manokwari ini yang dipimpin oleh Serma Permanes Ferry Awom, mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrijwilligers Korps) buatan Belanda (Samsudin Haris, 1999: 197).

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memadamkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yaitu dengan pendekatan keamanan atau sekuriti dan pendekatan kesejahteraan. Kedua pendekatan itu telah dilakukan sejak awal Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963. Pendekatan keamanan dilakukan dengan cara meningkatkan tugas-tugas inteligen sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat (JRG. Djopari, 1993: 154).

Untuk memadamkan Organisasi Papua Merdeka pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan TNI Ke Irian Jaya. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Usaha pemerintah Republik Indonesia untuk memadamkan Organisasi Papua Merdeka yaitu dengan mengirimkan pasukan TNI ke Irian Jaya. Tujuan dari pada pengiriman TNI ke Irian Jaya adalah untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka dan mendekati/menyikapi masyarakat Irian Jaya supaya tidak bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka. Selain itu aparat TNI juga menyadarkan masyarakat Irian Jaya, supaya menjadi masyarakat Indonesia yang baik. Karena menurut pemerintah dengan pendekatan keamanan yang paling pantas dilakukan, hal ini disebabkan oleh Organisasi Papua Merdeka/Gerakan Pengacau Keamanan berada di Irian Jaya dan melakukan perlawanan senjata. Sehingga harus ditumpas dengan senjata pula. Selain itu TNI juga mendekati masyarakat Irian Jaya

dahulu kemudian secara pelan-pelan menyikapi Organisasi Papua Merdeka/separatis bersenjata (Tyanri, 15 Januari 2007).

Untuk menghadapi pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, pemerintah melakukan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Dengan pecahnya pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, maka pemerintah melakukan pendekatan sekuriti atau keamanan dan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersama-sama dengan peningkatan intensitasnya masing-masing. Dengan kata lain setelah digempur dengan operasi militer, baru diadakan pembangunan. Untuk melaksanakan pendekatan kesejahteraan, TNI dilibatkan secara aktif (MT. Arifin, 13 Januari 2007).

Untuk mengatasi pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, pemerintah telah mengambil serangkaian tindakan militer dan non militer. Kebijakan non militer berpijak pada kenyataan bahwa rakyat Irian Jaya masih merasa asing terhadap Indonesia, dan sebaliknya orang-orang Indonesia lainnya juga masih belum dekat dengan penduduk setempat. Oleh karena itu usaha dibidang non militer ditujukan untuk menarik hati penduduk setempat dan memisahkannya dari pengaruh kaum pemberontak. Kebijakan ini berkaitan juga dengan taktik militer. Karena kenyataan menunjukkan bahwa pemberontak dibantu oleh suku-suku tertentu, dan pemberontak menjadikan suku-suku itu sebagai tameng. Maka pemerintah mengucilkan para pemberontak dari suku-suku itu. Dan salah satu kunci dalam pemberontakan di Irian Jaya adalah peranan yang dimainkan oleh para kepala suku sangat berpengaruh kepada suku-suku itu (Nazarudin Syamsudin, 1989: 98-99).

1. Pendekatan Sekuriti atau Keamanan

Pendekatan sekuriti atau keamanan adalah berbagai operasi yang dilakukan oleh militer atau ABRI untuk menumpas pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yang dimulai sejak awal pemberontakan sampai tahun 1998. Kebijakan

operasi militer untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka dilakukan dengan nama tersendiri sesuai dengan kebijakan pimpinan militer Indonesia (JRG. Djopari, 1993:154). Seperti yang diungkapkan oleh seorang responden: “Untuk menumpas Gerakan Pengacau Keamanan/Organisasi Papua Merdeka di Irian Jaya pemerintah menggunakan pendekatan keamanan, dan dalam pendekatan keamanan ini TNI/tentara sangat berperan karena pemerintahahn orde baru adalah pemerintahan otoriter” (Wawancara dengan Totok Sarsito, 24 Januari 2007).

Operasi Sadar yang berlangsung 1965-1967 merupakan operasi gabungan ketiga angkatan dan kepolisian negara. Sebelum operasi dilakukan berdasarkan perintah Panglima KODAM XVII Cenderawasih, I. Brigadir Jenderal TNI U. Rukmana. II Brigadir Jenderal R. Kartidjo terlebih dahulu melakukan tindakan pengamanan. Tindakan itu dilakukan dengan meningkatkan inteligen; mengumpulkan kepala suku untuk dimintai pendapat saran dan keterangan; menyiapkan pasukan cadangan; mengadakan penangkapan dan pengusutan terhadap orang-orang yang termasuk dalam anggota Organisasi Papua Merdeka; melakukan pencatatan terhadap orang-orang yang mengikuti gerakan Organisasi Papua Merdeka; mengadakan peringatan dengan jalan melalui keluarga yang ditinggalkan untuk memanggil yang melarikan diri supaya kembali menjadi warga negara yang baik. Tugas pokok operasi sadar adalah: melakukan penghancuran terhadap gerombolan yang bergerak di sekitar Manokwari, Warmare dan Kebar sakaligus minimum menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma, baik mati maupun hidup sebelum tanggal 17 Agustus 1965 (Tim SKP, 2006: 116).

Panglima Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Cenderawasih yang ke-3 Brigjen TNI R. Bintoro mengeluarkan Surat Perintah Operasi Baratayudha dengan tujuan pokok operasi: untuk menghancurkan gerombolan di bawah pimpinan Ferry Awon yang berkekuatan lebih kurang 14.000 dengan lebih kurang 1000 pucuk senjata api tua campuran dan penguasaan wilayah secara total. Pada tahun 1967, operasi itu dapat menewaskan pimpinan gerombolan J. M. Wambrauw, Lettu Tituler Irogi Meidotga, Simon Salosa, dan David Werfandu. Dan berhasil merampas 39 pucuk senjata api, 60 orang tertangkap, 73 orang tertembak mati dan 3539 rakyat pengikut organisasi Papua Merdeka

menyerahkan diri. Di pihak ABRI 3 tentara gugur dan 4 luka-luka. Dan pada tahun 1968 operasi mencapai sukses dengan: 149 rakyat menyerah di Manokwari, 137 orang tertembak mati, 214 pucuk senjata dirampas beserta peluru, tombak, parang, panah. Peristiwa ini terjadi di pos Makbon, Sausapor, Irai/Anggi (JRG. Djopari, 1993: 156).

Pada tanggal 25 Juni 1968 Brigjen TNI Sarwo Edhie Wibowo menjadi Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih yang ke-4 dan melancarkan operasi wibawa dengan mengulurkan tangan bagi gerombolan Organisasi Papua Merdeka untuk kembali ke kampungnya masing-masing dengan batas waktu tanggal 1 sampai 30 November 1968. Melalui seruan itu, Mayor Tituler Lodewijk Mandtjan dan Kapten Tituler Barends turun dari hutan bersama 595 pasukan dengan 106 pucuk senjata peninggalan PD II serta 3.835 suku Arfak. Tugas pokok operasi wibawa adalah menyelesaikan masalah gangguan keamanan; mengamankan dan memenangkan PEPERA dan menumbuhkan, memelihara perintah sebagai kelanjutan dari operasi sadar. Tujuan utama operasi wibawa adalah meningkatkan kewibawaan segenap unsur pemerintah dan ABRI dengan jalan menguasai dan membina wilayah Irian Barat. Kegiatan operasi diarahkan untuk mengamankan PEPERA yaitu dilakukan dengan jalan mensinkronisasikan operasi tempur, operasi territorial, dan operasi inteligen (Tim SKP, 2006: 116).

Pada tanggal 31 Januari 1970 Kolonel Acub Zainal menjadi Panglima Komando Militer XVII/Cenderawasih dan mengeluarkan perintah operasi pamungkas. Tujuan dari operasi pamungkas adalah untuk memusnahkan gerombolan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Melkianus Awom dan Nataniel Awom. Operasi pamungkas diterapkan di Biak Utara dan Biak Barat dan berhasil pimpinan gerombolan Lettu Juliana Bonsapia, Jacob Bonsapia serta yang tertembak mati adalah Kapten Lodwijk Asaribab, Laurens Awom, dan Ananias beserta rakyat pengikut Organisasi Papua Merdeka menyerahkan diri. Operasi pamungkas yang digelar, telah membuat Ferry Awom menyerah dengan 18 anggota pasukan, 20 kepala suku dan 400 rakyat dengan 18 pucuk senjata api beserta panah, tombak dan parang. Operasi pamungkas itu, juga telah menangkap lima orang yang terkenal sebagai pedagang di Biak dan merupakan “cukong” dari

gerakan Organisasi Papua Merdeka. Dan lima orang cukong itu juga telah membantu Organisasi Papua Merdeka dibidang logistik: beras, tembakau shag, pakaian seragam Organisasi Papua Merdeka, dan uang. Bahkan kelima cukong itu juga membantu anggota Organisasi Papua Merdeka melarikan diri ke PNG (Kompas, 10 Juli 1970).

Kemudian pada tahun 1980 Panglima KODAM XVII Cenderawasih Brigjen TNI Radja Kami Meliala Sembiring dalam melaksanakan penumpasan Organisasi Papua Merdeka menggunakan jalur keagamaan. Jalur keagamaan dilakukan, mengingat Organisasi Papua Merdeka menggunakan dasar-dasar agama Kristen yang diambil dari dalam Alkitab untuk membenarkan perjuangannya. Ternyata dengan jalur keagamaan yang ditempuh Brigjen TNI Radja Kami Meliala Sembiring kelihatan bahwa intensitas gangguan keamanan wilayah mulai berkurang, namun kegiatan Organisasi Papua Merdeka diarahkan kepada menggerakkan rakyat untuk mnyeberang ke PNG (JRG. Djopari, 1993: 158-159).

Untuk memberantas separatisme di Papua, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan keamanan yang berbentuk operasi militer besar-besaran. Termasuk operasi di Jayawijaya (1977-1982); operasi sapu bersih I dan II (1981); operasi galang I dan II (1982); operasi tumpas (1983-1984) dan operasi sapu bersih (1985) (Tim Sekretariat Keuskupan Papua, 2006: 117). Pada tanggal 8 Januari 1996 terjadi aksi penyanderaan Panglima KODAM XVII/Cenderawasih menyelenggarakan operasi Rajawali, yaitu untuk menyelamatkan Tim Ekspedisi Lorens yang berjumlah 25 orang dan 7 diantaranya warga negara asing. Operasi cenderawasih itu TNI juga melibatkan ICRC (Palang Merah Internasional). Tanggal 12 Januari 1996, 9 sandera dibebaskan dan selama 4 bulan sandera 7 lainnya dapat dibebaskan. Tetapi baru pada tanggal 15 Mei 1996, 9 sandera dapat dibebaskan walaupun dua sandera lainnya meninggal ditangan anak buah Kelly Kwalik. Pembebasan sandera yang berjumlah 7 orang itu karena atas bantuan KOPASUS pimpinan Brigjen Prabowo Subianto (Gatra, 25 Mei 1996).

Pendekatan keamanan itu ditingkatkan ketika Papua secara resmi dibawah status Daerah Operasi Militer (DOM) sampai tahun 1998 (Tim SKP, 2006: 117). Seperti yang diungkapkan oleh seorang responden: “Alasan pemerintah Indonesia

memberlakukan Irian Jaya menjadi status Daerah Operasi Militer adalah karena daerah Irian Jaya belum begitu aman, dan Gerakan Pengacau Keamanan/Organisasi Papua Merdeka masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia” (Wawancara dengan Tyanri, 15 Januari 2007).

2. Pendekatan Kesejahteraan

Sejak Irian Jaya kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas yang datang ke Irian Jaya dan menggantikannya posisi orang Belanda adalah “meng-Indonesiakan” orang-orang Irian Jaya. Aktifitas itu dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang ada di Irian Jaya. Dalam rangka “meng-Indonesiakan” orang Irian atau memantapkan integrasi politik di Irian Jaya yaitu dengan menerima rakyat Irian sebagai saudara dan sebangsa Indonesia. Maka di Irian Jaya diadakan pembangunan diberbagai bidang dengan sungguh-sungguh dan jujur serta adil. Masyarakat Irian juga dibina menjadi masyarakat Irian Jaya yang berencana dan berkesinambungan untuk proses alih tugas dan dengan cepat menyerahkan tanggung jawab lebih banyak kepada putera Irian Jaya untuk menjadi pemimpin atau kepala berbagai struktur jajaran pembangunan di Irian Jaya (JRG. Djopari, 1993: 162). Salah satu putera Irian Jaya yang menjadi pemimpin atau Gubernur Irian Jaya adalah Izaak Hindom (Tempo, 28 April 1984).

Untuk memantapkan integrasi di Irian Jaya adalah kita dapat bergaul dengan baik, jujur, dan adil dengan rakyat Irian Jaya. Dan Indonesia adalah negara kita secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi meluasnya ideologi Organisasi Papua Merdeka serta pemberontakannya, maka ABRI melakukan berbagai aktifitas pembangunan bagi masyarakat Irian Jaya dalam bidang: pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian/ kerajinan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan. Aktifitas militer ini di Irian Jaya pada prinsipnya menunjang program pembangunan pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya (JRG. Djopari, 1993: 162). Untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Irian Jaya, anggota TNI juga membantu dan mengusahakan kebun-kebun masyarakat

yang terbengkalai, menjadi kebun yang dapat mencukupi kebutuhan makan rakyat Irian Jaya (Kompas, 10 Juli 1970).

Bentuk pendekatan kesejahteraan, pemerintah melibatkan TNI untuk membangun Irian Jaya. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden bahwa:

Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Irian Jaya yaitu dengan melibatkan TNI untuk memberi pekerjaan, supaya tidak mendukung Organisasi Papua Merdeka. Walaupun pekerjaan itu hanya seadanya, yang penting dapat menghasilkan uang. Dan TNI juga mengajari masyarakat Irian Jaya untuk bercocok tanam yang baik, yaitu dengan cara TNI memberikan contoh “kebun percontohan” singkong, ubi, padi, kelapa atau tanaman yang disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Irian Jaya (Tyanri, 15 Januari 2007).

Sejak tahun 1963, setelah Irian Jaya kembali ke pangkuan Indonesia usaha pembangunan dilakukan secara nasional. Anggaran yang diberikan cukup besar, tetapi karena luas daerah hampir seperempat kali Jawa dan hanya dihuni 1,2 juta ditambah kondisi alam atau daerah yang kurang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengubah keadaan. Masalah utama adalah tempatnya yang terpencar dan susah untuk dihubungi. Peranan Irian Jaya dalam pembangunan nasional adalah menyumbang hasil alam dan daerah yang luas dengan jumlah penduduk sedikit, maka pemecahannya dengan program transmigrasi (Tempo, 28 April 1984). Seperti yang diungkapkan oleh seorang responden: “Untuk membangun Irian Jaya pemerintah Indonesia banyak mengalirkan dana ke Irian Jaya, tetapi ditelan belantara. Jadi berapa pun dana yang dialirkan ke Irian Jaya tidak nampak, karena daerahnya luas dan masyarakatnya terpencar-pencar” (Wawancara dengan Pawito, 19 Januari 2007).

Seorang Gubernur Irian Jaya yaitu Acub Zaenal ingin memajukan Rakyat Irian Jaya. Maka Acub Zaenal melakukan operasi memasyarakatkan masyarakat pedalaman dengan nama gebrakan “Operasi Koteka” (OK). Operasi Koteka bertujuan untuk mempersiapkan rakyat Irian Jaya memasuki era pembangunan.

Selain itu Acub Zaenal juga mengembangkan potensi alamiah yang ada di Irian Jaya, karena rakyat Irian Jaya membutuhkan kebanggaan nasional Indonesia. Maka cara yang ditempuh adalah meningkatkan olahraga, terutama sepak bola, atletik dan tinju. Pada tahun 1970 sampai 1975 prestasi atlet Irian Jaya sangat menonjol dibidang-bidang itu secara nasional, dan pada tahun 1974 kesebelasan Persipura meraih prestasi juara II untuk kompetisi wilayah Asia (Tempo, 28 April 1984).

Meliala Sembiring juga dikenal sebagai seorang bapak yang membangkitkan kebanggaan nasional bagi putera-putera Irian Jaya melalui pengembangan kesenian daerah dan perekrutan dalam bidang militer. Banyak pemuda Irian Jaya yang direkrut menjadi militer khususnya Angkatan Darat oleh KODAM XVII Cenderawasih, karena rakyat Irian Jaya memiliki kesempatan yang sama dengan rakyat Indonesia lainnya untuk menjadi TNI (JRG. Djopari, 1993: 163).

Usaha pemerintah untuk memperlancar transportasi yaitu dengan membangun jalan tran-Irian, khususnya sektor utara yang dibangun mulai Jayapura (Abepura), yang sudah mencapai 80 km yaitu melewati Arso kemudian ke Waris. Jalan itu menyusur keselatan menuju Senggen, Ubrub, Vyuruf dan bertemu dengan jalan tran-Irian yang dibangun dari sektor Selatan mulai dari Merauke. Panjang jalan keseluruhan akan mencapai 1.500 km. Dan pemerintah juga menyediakan angkutan pedesaan yang berupa Toyota Kijang (Tempo, 16 Juni 1984).

Upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan dengan membangun sekolah dan untuk bidang kesehatan pemerintah membangun rumah sakit. Seperti yang diungkapkan oleh seorang responden: “Untuk memajukan rakyat Irian Jaya, pemerintah juga membangun sarana pendidikan yaitu sekolah SD, SMP, SMA, Universitas dan mendatangkan pengajar/guru dari luar Irian Jaya. Dan untuk bidang kesehatan pemerintah juga membangun rumah sakit dan mendatangkan tenaga medis dari luar Irian Jaya” (Wawancara dengan Pawito, 19 Januari 2007). Hambatan utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Irian Jaya adalah motivasi masyarakat masih kurang. Bahkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat pedalaman masih rendah dan belum mampu menyaingi masyarakat pendatang (Tempo, 5 Mei 1984).

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Latar belakang munculnya Organisasi Papua Merdeka adalah: a. Pengaruh pemerintahan Belanda di Irian Jaya yaitu pada masa pemerintahan Belanda di Irian Jaya (*Nederland Nieuw Guinea*) Residen J. P. van Eechoud mempunyai peranan yang besar dalam menghasilkan atau menumbuhkan “nasionalisme Papua”. Hal ini ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Hampir bersamaan dengan itu, Dr. Sam Ratulangi, Soegoro Admoprasodjo, dan dr. Gerungan berhasil pula melahirkan elit politik Papua yang pro-Indonesia. Pada tahun 1960-an telah terpolarisasi dua kelompok elit politik yaitu elit pro-Papua seperti: Marcus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Hermanus Wajoi dan yang pro-Indonesia seperti: Silas Papare, Albert Kurubuy, Lukas Rumkorem, Marten Indey. Elit politik pro-Papua dalam aktivitasnya terbagi dua yaitu bekerjasama dengan Belanda dan yang tidak bekerjasama dengan Belanda. Dan Belanda akan memberi kemerdekaan kepada Papua Barat selambat-lambatnya tahun 1970-an, namun cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara merdeka telah dihadang oleh perjanjian New York (15 Agustus 1962) yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia; b. Kekecewaan rakyat Irian Jaya kepada pemerintah Indonesia yaitu Indonesia mempunyai kepentingan atas Papua Barat/Irian Jaya dan tidak ingin melepaskan Papua Barat kepada pihak lain (Belanda)

maupun kepada rakyat Papua Barat sebagai negara yang merdeka. Indonesia mengambil Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa yang terjajah oleh Belanda, tetapi karena alasan ekonomi. Dan untuk menentukan status Papua Barat, yaitu merdeka atau berintegrasi dengan Indonesia, maka Indonesia melaksanakan PEPERA pada tahun 1969. Untuk memenangkan PEPERA, pemerintah Indonesia memutar balikan aturan bersama dan melenceng dari perjanjian New York yaitu satu orang satu suara (*One Man One Vote*) diganti dengan sistem musyawarah (perwakilan). Anggota musyawarah sejumlah 1025 yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan pilihan rakyat Papua. Dan untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, teror, ancaman atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak 19 November 1969 Papua menjadi wilayah/berintegrasi dengan NKRI. Dan setelah berintegrasi dengan Indonesia terjadi dominasi politik oleh etnis non-Irian baik dipusat maupun di Pemda Irian. Di Irian Jaya muncul aspirasi merdeka dari rakyat Irian Jaya karena persoalan politik, yaitu untuk melepaskan tanah Papua dari NKRI. Namun proses integrasi politik tidak berjalan lancar, karena sejak awal sudah dihadang oleh pemberontakan di Manokwari 26 Juli 1965 yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom yang oleh pemerintah Indonesia disebut Gerakan Pengacau Keamanan/Organisasi Papua Merdeka.

Perjuangan Organisasi Papua Merdeka yaitu: a. melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah Indonesia diantaranya pemberontakan Fisik di Kebar, Arfai, Pos Makbon, Pas Saosapor, Pos Irai Anggi, Pos Erambo Merauke, Dubu Jayapura, Enarotali, Pyramid Jayawijaya, Biak Utara, dan Mapenduma. Pemberontakan non fisik yaitu melakukan penculikan, pengibaran bendera bintang kejora, proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktoria; b. Mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka dalam mencari dukungan rakyat Irian Jaya yaitu dengan cara mempengaruhi rakyat yang tinggal dipedalaman, karena

mudah diprovokasi. Bentuk dukungan rakyat Irian Jaya kepada Organisasi Papua Merdeka adalah terlibat atau berpartisipasi dalam aksi Organisasi Papua Merdeka, memberi dukungan sandang, pangan, obat-obatan, dan dana. Memberi dukungan semangat, serta sosialisasi nilai-nilai Organisasi Papua Merdeka yang dikaitkan dengan keharusan membalas dendam atas korban keluarga dan orang-orang Irian Jaya yang telah mati ditangan pemerintah Indonesia, memberi informasi tentang situasi daerah maupun nasional kepada tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka; c. Mencari dukungan kepada dunia internasional. Medan gerilya diplomasi Organisasi Papua Merdeka meliputi: negara-negara yang serumpun, negara Eropa Barat, negara Afrika.

Usaha pemerintah Republik Indonesia dalam memadamkan Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yaitu dengan: a. Pendekatan keamanan adalah berbagai kegiatan operasi yang dilakukan oleh militer atau ABRI untuk menumpas pemberontakan Organisasi Papua Merdeka di Irian Jaya. Kebijakan operasi militer untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka dilakukan dengan nama tersendiri sesuai kebijakan pimpinan militer Indonesia atau ABRI; b. Pendekatan kesejahteraan adalah pemerintah dalam membangun Irian Jaya melibatkan anggota ABRI. Anggota ABRI melakukan berbagai aktivitas pembangunan bagi masyarakat Irian Jaya dalam bidang: pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian/kerajinan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan. Dan pemerintah juga mengirim pasukan TNI ke Irian Jaya pada prinsipnya yaitu untuk menunjang program pembangunan pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan implikasi dari penelitian ini secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian Organisasi Papua Merdeka. Seharusnya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah separatist Organisasi Papua Merdeka dengan cara “cinta kasih” atau atas dasar persamaan dan persaudaraan bukan dengan cara militer. Karena penyelesaian separatist Organisasi Papua Merdeka dengan cara militer dapat menyebabkan korban jiwa dari penduduk setempat, dengan timbulnya korban jiwa masyarakat akan merasa dendam apabila ada anggota keluarganya yang menjadi korban dari operasi militer. Dan masyarakat akan mendukung Organisasi Papua Merdeka untuk membentuk negara sendiri yaitu lepas dari NKRI.

Apabila pemerintah menyelesaikan separatist Organisasi Papua Merdeka dengan cara militer dan kekayaan alam Irian Jaya diambil oleh Indonesia dan pembangunan hanya terpusat di Jawa, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan rakyat Irian Jaya terhadap pemerintah RI yang mengakibatkan suatu usaha untuk mendirikan negara yang merdeka. Salah satunya bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI. Karena dengan mengadakan perlawanan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan rakyat Irian Jaya terhadap pemerintah RI.

2. Praktis

Implikasi praktis dari peristiwa perlawanan Organisasi Papua Merdeka terhadap dunia pendidikan, bahwa penerapan dari suatu hasil penelitian dapat dikembangkan sesuai dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan, sehingga nantinya akan lebih bermanfaat praktis. Paling tidak sebagai dasar untuk penulisan yang lebih baik dan bermanfaat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai Organisasi Papua Merdeka ini, antara lain:

- 1. Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa P.IPS/Sejarah yang ingin mengadakan penelitian tentang Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia) agar menggali sumber yang lebih banyak lagi.*
- 2. Kepada generasi muda, seyogyanya dapat mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.*

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

A. Heuken SJ. 1973. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka

_____. 1991. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka

Afan Gafar. 1989. *Beberapa Aspek Perkembangan Politik*. Jakarta: Rajawali

_____. 2000. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad. 2000. *Federasi atau Disintegrasi*. Yogyakarta: Madani Press

Chusnul Mar'iyah. 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan politik Bilateral*. Jakarta: Granit

Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos

- Frans Maniagasi. 2001. *Masa Depan Papua*. Jakarta: Millenium Publiser
- George Junus Aditjondro. 2000. *Cahaya bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomidan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Haris Munandar. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Helius Sjamsudin. 1996. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen
- Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim. 2005. *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Jack C. Plano. 1989. *Kamus analisa Politik*. Jakarta: CV. Rajawali
- JRG. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kartini Kartono. 1976. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumnii Offset
- Lexy Moleong. 1989 *Metode Peneltutan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Louis Gottschalk. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia
- _____. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press

- M Wresniwiro. 1996. *Membangun Budaya Pengamana Swakarya*. Jakarta: Dede Permana
- Moch Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Nazaridin Syamsudin. 1989. *Integrasi politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Nogroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Saafroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samsudin. 1995. *Pergokan di perbatasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Samuel P. Huntington. 1983. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sartono Kartodirjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syamsudin Haris. 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga
- T May Rudy. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Theodor Rathgeber. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*. Jakarta: Pustaka Harapan

Tim Sekretariat Keuskupan Papua Jayapura. 2005. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar menangani Konflik di Papua*. Jayapura: Tim SKP

Tuhana Taufik A. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media

W.J.S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Yakobus F Dumupa. 2006. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media

Sumber Majalah:

Bambang Harimurti. 1984. Mei. "Setelah Sinterklaas Membangun Irian". *Tempo*. 14-15

Muchlis DJ Tolomundu. 1984. Juni. "Laporan dari Perbatasan". *Tempo*. 42

_____. 1984. April. "Menghidupkan Mesin Besar". *Tempo*. 15

Rapport. 1984. November. "Suplai Senjata Baru OPM". *Tempo*. 13

_____. 2003. Agustus. "Gerakan Separatis Belum Usai". *Tempo*. 80-81

Reuters. 1996. Mei. "Sandra". *Gatra*. 21

Amran Nasution. 1996. Januari. "Teror OPM". *Gatra*. 21

_____. 1996. Januari. "Kelly Kwalik". *Gatra*. 26

Soedarjanto. 2000. Juli. "Politik dan Keamanan: Demokrasi, Integrasi, dan Supremasi Hukum". *Polkam*. 14, 18

Adrizal. 2006. Juli. "Jaga Nama Baik Kodam Diponegoro". *Gema Diponegoro*. 32-33

Sumber Koran:

“Irian Barat Tak Dilupakan”. 1967. Mei. *Kompas*. 2

“Rapat Gelap Rencanakan Negara Papua Merdeka”. 1967. September. *Kompas*. 1

“OPM Ternyata di Kendalikan Oleh Warga Negara Belanda”. 1969. April. *Suara Merdeka*. 1

“Bukti Pengacauan OPM”. 1969. Mei. *Kompas*. 1

“Tjukong-tjukong OPM di Irian Barat di Tahan”. 1970. Juli. *Kompas*. 1

“GPK dari Mana dan Mau Kemana”. 1996. Januari. *Tifa Irian*. 1

Sumber Internet:

[Http://www.flickr.com/photos/39469869@N00/34546111/](http://www.flickr.com/photos/39469869@N00/34546111/), 28 November 2006

[Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 28 November 2006

[Http://dephan.go.id/modules.php?name:feedback&op=puintpage&opid=855,2](http://dephan.go.id/modules.php?name:feedback&op=puintpage&opid=855,2) Januari 2007

[Http://www.dephan.go.id/buku-putih/bab-v.htm](http://www.dephan.go.id/buku-putih/bab-v.htm), 13 Februari 2007

[Http://www.geocities.com/opm-irja](http://www.geocities.com/opm-irja), 13 Februari 2007

[Http://www.id.wikipediaorg/wiki/organisasi_papua_merdeka](http://www.id.wikipediaorg/wiki/organisasi_papua_merdeka), 13 Februari 2007

Organisasi Papua Merdeka Ternyata dikendalikan Oleh Warga Negara Belanda

Yang menamakan diri “**Organisasi Papua Merdeka**” dan mengandalkan diri untuk membebaskan tanah Papua ternyata adalah suatu kumpulan yang pimpinannya praktis didalam tangan warganegara Belanda, demikian keterangan yang diperoleh oleh wartawan “Antara” di Nederland.

Tokoh-tokoh pemegang peranan yang sebegitu jauh-jauh dikira orang-orang Irian Barat serta pula menonjolkan diri mereka sebagai tokoh-tokoh “Pejuang Papua Merdeka” terbukti sejak lama telah meminta dan menerima kewarganegaraan Belanda.

Diantara mereka terdapat Herman Womsiwor, B. Tangahma, dan F. Malaiholo, yang sesungguhnya telah lama menjalankan kewajiban-kewajiban dan menikmati hak-hak penuh sebagai warganegara Kerajaan Belanda.

Dari hasil pengecekan pada “*RIJKSINSPECTIE VAN DE BEVOLKINGREGISTER*” di Den Haag, yang merupakan instansi yang berwenang di Nederland menghimpun catatan-catatan kewarganegaraan telah menemukan nama-nama dari sekurang-kurangnya 6 tokoh pimpinan **Organisasi Papua Merdeka** yang dicatat sebagai warganegara Belanda sepenuhnya. Ke-6 tokoh itu adalah: 1) J.E. Papare yang bertempat tinggal di Apedoorn; 2) Herman Womsiwor yang bertempat tinggal di Den Haag; 3) Bernadus Tangahma yang bertempat tinggal di Den Haag; 4) F. Malaiholo yang bertempat tinggal di Hoogeveen; 5) W.J. Aringaneng yang bertempat tinggal di Hoogeveen; 6) O.A. Dakilwadji yang bertempat tinggal di Hoogeveen.

Dikalangan banyak pemuka-pemuka Irian Barat, orang menyatakan keragu-raguan besar mengenai integritas dan maksud para gembong yang mengaku sebagai pemimpin-pemimpin **Organisasi Papua Merdeka** (Antara).

Sumber: Koran Suara Merdeka, 25 April 1969, Halaman: 1

Organisasi Papua Merdeka Ternyata dikendalikan Oleh Warga Negara Belanda

Yang menamakan diri "**Organisasi Papua Merdeka**" dan mengandalkan diri untuk membebaskan tanah Papua ternyata adalah suatu kumpulan yang pimpinannya praktis didalam tangan warganegara Belanda, demikian keterangan yang diperoleh oleh wartawan "Antara" di Nederland.

Tokoh-tokoh pemegang peranan yang sebegitu jauh-jauh dikira orang-orang Irian Barat serta pula menonjolkan diri mereka sebagai tokoh-tokoh "Pejuang Papua Merdeka" terbukti sejak lama telah meminta dan menerima kewarganegaraan Belanda.

Diantara mereka terdapat Herman Womsiwor, B. Tangahma, dan F. Malaiholo, yang sesungguhnya telah lama menjalankan kewajiban-kewajiban dan menikmati hak-hak penuh sebagai warganegara Kerajaan Belanda.

Dari hasil pengecekan pada "**RIJKSINSPECTIE VAN DE BEVOLKINGREGISTER**" di Den Haag, yang merupakan instansi yang berwenang di Nederland menghimpun catatan-catatan kewarganegaraan telah menemukan nama-nama dari sekurang-kurangnya 6 tokoh pimpinan **Organisasi Papua Merdeka** yang dicatat sebagai warganegara Belanda sepenuhnya. Ke-6 tokoh itu adalah: 1) J.E. Papare yang bertempat tinggal di Apedoorn; 2) Herman Womsiwor yang bertempat tinggal di Den Haag; 3) Bernadus Tangahma yang bertempat tinggal di Den Haag; 4) F. Malaiholo yang bertempat tinggal di Hoogeveen; 5) W.J. Aringaneng yang bertempat tinggal di Hoogeveen; 6) O.A. Dakilwadji yang bertempat tinggal di Hoogeveen.

Dikalangan banyak pemuka-pemuka Irian Barat, orang menyatakan keragu-raguan besar mengenai integritas dan maksud para gembong yang mengaku sebagai pemimpin-pemimpin **Organisasi Papua Merdeka** (Antara).

Sumber: Koran Suara Merdeka, 25 April 1969, Halaman: 1

